

**LAPORAN RANCANGAN AKHIR  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN  
SUB KEGIATAN FASILITASI, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**



**JUDUL RISET  
RENCANA INDUK DAN PETA PEMAJUAN IPTEK CLUSTER  
SOSIAL-PEMERINTAHAN**

**KELOMPOK RISET KOLABORATIF**

- 1. Prof. Dr. H. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H (Ketua)**
- 2. Dr. Ahmad Firman, S.E, M.Si (Anggota)**
- 3. Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak.CA (Anggota)**
- 4. Dr. Azlan Azhari, S.E., MM (Anggota)**
- 5. Fitriani Latif, S.P., MM (Anggota)**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**TAHUN 2023**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Secara filosofis, pembangunan merupakan hal yang amat esensial dan harus terus digalakkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan ialah pemerintah yang memainkan peran vital dan strategis dalam rangka pencapaian tujuan tersebut melalui serangkaian proses kebijakan yaitu, formulasi, pengambilan keputusan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan itu sendiri. Konsepsi pembangunan mengisyaratkan suatu makna esensial bertalian erat dengan ketersediaan potensi dan sumber daya, regulasi, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri, di mana ketiga elemen itu menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Dalam paradigma tersebut, pembangunan diarahkan pada perluasan aksesibilitas publik dalam memperoleh potensi dan sumber daya yang dibutuhkan guna peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat, aksesibel terhadap layanan publik baik fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial, air bersih, listrik, perlindungan dan keamanan dan sebagainya), serta menjamin ketersediaan infrastruktur dan tata ruang kota yang berorientasi *clen, green and resilient ecology* secara menyeluruh dan kontinuitas bagi semua masyarakat guna kelangsungan hidup mereka. Terlebih lagi, bila kita mengelaborasi secara mendalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota dari perspektif ekonomi makro, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi elemen penting dan signifikan berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada suatu kondisi yang diharapkan (*necessary condition*) guna pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial (*gini ratio*) bahkan *stunting* yang menjadi isu aktual dewasa sekarang. Oleh karena itu, penyediaan modal fisik (*physical capital*), sumber daya manusia (*human resources*) yang kreatif dan inovatif, sumber daya alam yang terbarukan, dan modal sosial (*social capital*) menjadi hal yang tak terelakkan untuk harus diadakan dan disediakan secara kontinuitas untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang fantastis.

Dalam kurun waktu periodik 2019-2022 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi negatif yang terjadi sepanjang tahun 2019 dan 2020 sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama. Terjadinya kontraksi ekonomi negatif baik pada konteks nasional maupun kota Makassar tak terlepas dari adanya bencana non alamiah

yakni, pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang tak pernah diperkirakan bakal terjadi dan mulanya ditemukan di Wuhan telah mendistruksi sendi-sendi kehidupan manusia dan organisasi global baik pada tatanan birokrasi, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya di hampir seluruh negara di dunia.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Makassar dan Nasional  
Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Makassar (%)</b>	<b>Nasional (%)</b>
2018	8,42	5,17
2019	8,79	5,02
2020	-1,27	-2,07
2021	4,47	3,70
2022	5,40	5,31

*Sumber: BPS Kota Makassar (2022).*

Badai pandemi *Covid-19* yang telah melanda Indonesia sejak maret 2020 telah memaksa pemerintah untuk mengkontruksi pembangunannya dengan pendekatan kompromistis dalam penanggulangan bencana non alamiah *Covid-19*, mengatasi perlambatan ekonomi dan ancaman resesi global, mengatasi resiko fiskal yang masih tinggi, terjadinya kemiskinan dan ketimpangan yang semakin melebar, serta kontraksi ketenagakerjaan akibat semakin banyaknya pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional sebagai pengejawantahan terhadap pandemi Covid-19, proses perencanaan pembangunan Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar terus diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri melalui serangkaian proses pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya baik dari aspek ekonomi, politik, budaya sosial maupun sarana prasarana.

Relevan dengan hal tersebut, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Makassar sejatinya telah berjalan optimal, ditandai dengan diraihnya penghargaan Purnakarya Nugraha di tahun 2019 dan Top Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat beberapa area pelayanan publik

lainnya yang memerlukan penguatan diantaranya pencapaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 yang berada pada kategori B dengan nilai 62.23 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perbaikan atau pembaharuan yang signifikan dalam penerapan agenda reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar. Beberapa catatan penting Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kota Makassar antara lain: 1) pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal di tingkat pemda dan perangkat daerah; 2) belum tersusunnya *road map* reformasi birokrasi 2020-2024; 3) kapasitas dan kapabilitas assessor reformasi birokrasi di lingkup Pemkot Makassar masih rendah; 4) penerapan *e-governement* belum terintegrasi sepenuhnya; 5) pengelolaan sistem manajemen karier sumber daya aparatur belum berjalan optimal mencakup assessment pegawai belum menyeluruh, evaluasi jabatan belum berdasarkan standar kompetensi jabatan.

Sementara itu, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Makassar masih berada pada predikat B yang ditandai dengan nilai SAKIP sebesar 68,82 pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 68,69. Secara kualitatif data di atas menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Makassar belum akseleratif sebagaimana yang diharapkan. Penguatan terhadap penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Selanjutnya, dalam konteks kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan publik, Pemerintah Kota Makassar berada pada kategori baik yaitu, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2022 sebesar 80,47 atau mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu, sebesar 78,97. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai IKM Pemerintah Kota Makassar berada pada rentang 74 s.d 77 atau bergerak dari mutu layanan publik kategori C atau kurang baik (65,00 – 80,47) ke mutu pelayanan publik B atau baik (76,61 – 88,30), sehingga perlunya dilakukan pembenahan dalam sektor pelayanan publik untuk lompatan akseleratif guna pencapaian mutu layanan A atau sangat baik di rentang interval (88,31 – 100,00).

Dalam konteks pembangunan di bidang sosial, pemerintah kota Makassar masih diperhadapkan oleh problematika konvensional yakni, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, belum optimalnya pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE); dan meningkatnya jumlah penyandang difabel, orang dengan

gangguan jiwa serta lansia terlantar. Meningkatnya problematika sosial tidak terlepas dari melonjaknya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di kota Makassar setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada Tahun 2020 melansir bahwa angka kemiskinan mengalami peningkatan dari 4,28 persen menjadi 4,5 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan (8,99 persen) maupun tingkat kemiskinan nasional (10,19 persen), Tingkat kemiskinan di Kota Makassar secara relatif masih lebih baik. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tidak pernah berkurang secara signifikan walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi secara konsisten naik sebelum terjadinya pandemi. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini belum cukup inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada kategori kelompok miskin. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia di kelompok penduduk miskin masih rendah, baik yang terkait dengan kualitas hidup di bidang kesehatan dan pendidikan maupun kualitas keterampilan berusaha yang dimiliki. Terjadinya pandemi covid-19 juga menjadi faktor utama terhadap naiknya angka kemiskinan di Kota Makassar.

Sepanjang rentang waktu 2016-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar selalu di atas dua digit atau di rentang 10,39 s.d 12,19 persen. Jika dibandingkan dengan posisi relatif Kota Makassar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (6,31 persen) dan Nasional (7,07 persen), angka TPT Kota Makassar cukup tinggi dan kembali mengkonfirmasi bahwa ada permasalahan pada dimensi kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama ini. Pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten naik ternyata tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup di Kota Makassar. Salah satu penyebab masih tingginya pengangguran tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi. Selain itu link and match antara kebutuhan dunia industri dan penyediaan pendidikan bagi tenaga kerja masih rendah. Hal ini ditandai dengan jumlah pengangguran terdidik di Kota Makassar yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penganggur yang berpendidikan rendah. Selain itu, posisi sentral Kota Makassar sebagai pusat aktivitas bisnis dan perekonomian tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia (KTI), menjadikan kota ini sebagai tujuan bagi para pencari kerja yang berasal dari kawasan sekitarnya. Jumlah angkatan kerja di Kota Makassar terus naik selama beberapa tahun terakhir dan mencapai angka 585 ribu di tahun 2020 yang lalu.

Lonjakan peningkatan terhadap angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di kota Makassar amat mempengaruhi tingkat indeks gini ratio atau ketimpangan pendapatan masyarakat di mana pada tahun 2020 indeks gini ratio Makassar mencapai 0,400 atau lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,389 dan indeks gini ratio Nasional sebesar 0,381. Tingginya nominatif gini ratio tersebut menyiratkan dua hal penting yakni, 1) pertumbuhan ekonomi kota Makassar belum cukup inklusif dalam memperbaiki capaian-capaian indikator makro perekonomian lainnya; dan 2) implikasi pandemic Covid-19 yang signifikan menurunkan kinerja perekonomian daerah.

Berakar dari problematika konvensional pada sektor ekonomi sosial yang hampir dihadapi sebagian besar kota-kota metropolitan di Indonesia, tak terkecuali kota Makassar, dengan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang fluktuatif dari tahun ke tahun ternyata berimplikasi pula terhadap tumbuh suburnya problematika kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada perempuan dan anak, tingkat kriminalitas di wilayah Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan kasus tindak pidana umum terdatat sebanyak 25.357 laporan mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 15.410 kasus (Polda Sulsel, 2023), meningkatnya angka kematian Ibu (AKI) dan angka stunting yang pada tahun 2022 sebesar 4,05 persen. Oleh karena itu, kondisi ini amat mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembenahan dan penguatan dalam aspek tata kelola pelayanan publik baik pada aspek kesehatan dengan peningkatan kualitas layanan mulai pada tingkat posyandu, penguatan manajemen pelayanan ibu nifas. Kemudian pada sektor tenaga kerja yakni, membangun jejaring kolaboratif dengan sektor swasta untuk distribusi angkatan kerja yang telah memperoleh pembinaan dan bimbingan keterampilan serta menguatkan sektor pariwisata utamanya mendorong lahirnya industri kreatif Lorong dan penguatan UMKM agar lebih berdaya saing dan kompetitif dengan melakukan peningkatan kapasitas pemasaran produk berbasis digital.

Disamping itu, dalam menekan laju tindak kriminalitas yang terjadi perlu lebih digalakkan sosialisasi dan edukasi untuk kekerasan dalam rumah tangga dan memasifkan program jagai anak serta mengoptimalkan peran Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat dan pemuda dalam menekan dan meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas guna menghadirkan kondisi ketertiban umum dan kenyamanan kota yang makin baik dan kondusif.

Kesuksesan pembangunan daerah amat bertalian dengan proses perencanaan serta mutu dan kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan dewasa sekarang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melahirkan kebijakan yang lebih efektif, aplikatif dan komprehensif. Karakteristik kebijakan yang berkualitas mempunyai kekhasan tersendiri, di mana sifatnya lebih aplikatif, dan terukur serta disusun dengan berbasis ilmu pengetahuan (*evidence based policy*) yang bersifat terkini, relevan, komprehensif dan valid melalui proses penyelidikan keilmiah yang lebih mendalam dan menyeluruh serta menempatkan aktifitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) yang diselenggarakan oleh lembaga/badan pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara idealnya harus mampu menyediakan hasil riset yang berbasis pengetahuan (*policy based evidence*) terhadap problematika pembangunan, sehingga bukti-bukti keilmiah tersebut akan menjadi landasan atau acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan guna penuntasan problematika pembangunan tersebut serta kebijakan tersebut akan lebih mempunyai kekhasan tersendiri dimana materi atau substansi kebijakan yang diambil lebih aplikatif, terukur dan komprehensif.

Aktifitas litbangjirap seyogyanya linear dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata, data dan informasi yang relevan dan mendukung sistem pengambilan kebijakan yang berbasiskan pengetahuan (*policy based evidence*). Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar sebagai *the best role model* penerapan konsep *smart city*, mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasiskan riset, menghasilkan riset-riset berdampak yang dapat menstimulus lahirnya terobosan-terobosan baru dan inovasi baik pada tataran perangkat daerah dan masyarakat guna pemajuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan hasil riset bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian, Pemerintah Kota Makassar juga perlu mengembangkan *big data hub* yang telah tersedia pada *war room* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, penguatan implementasi *cascading* konektifitas dan sinkronisasi antara program, kegiatan dan sub kegiatan dan sistem perencanaan pembangunan, mengintegrasikan penatataan ruang *spatial*, *sectoral* dan tematik perencanaan pembangunan serta *memapping* program prioritas dan memperkuat kebijakan berbasis pengetahuan (*policy based evidence*) Sehingga output dan outcome dari aktifitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan

penerapan dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan kota Makassar.

Relevan dengan pandangan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Eksistensi badan litbang diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbang tersebut diharapkan dapat mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka akseleratif pembangunan daerah secara efektif, kompetitif dan berkelanjutan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang membantu tugas Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kota Makassar memegang peranan vital dalam menyediakan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah yang lebih berkualitas dan aplikatif serta menstimulus perangkat daerah untuk senantiasa menciptakan terobosan-terobosan baru dan inovasi yang dapat menuntaskan problematikan yang sedang dihadapi dan menjaga eksistensi organisasional untuk senantiasa eksis dan survive dalam menghadapi perkembangan zaman yang amat dinamis dan kompetitif sehingga pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat kota Makassar secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Upaya pencapaian pada kondisi ideal sebagaimana dimaksud, tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi Balitbangda Kota Makassar untuk mengedepankan rasionalitas dan kavaliditas data, riset, temuan dan rekomendasi yang berperan penting bagi kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilandaskan pada pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukti data dan rekomendasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan terkini (*evidence and knowledge based development planning*).

Rekomendasi hasil riset yang dilandaskan pada data maupun informasi di lapangan penelitian atau masyarakat dan pengetahuan mengenai tujuan pembangunan daerah ke deannya memberikan kontribusi tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil penyusunan perencanaan pembangunan kepada masyarakat secara efektif (*delivery*

*mechanism*) sehingga secara tidak langsung dengan mudahnya masyarakat mengetahui dan memahami terhadap tujuan dari pembangunan tersebut yang akan mengantarkan masyarakat kepada kondisi yang makin baik kedepannya memberikan nilai dan makna tersendiri kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan program pembangunan tersebut sehingga dengan keterlibatan dalam suksepsi pembangunan secara nyata menunjukkan bahwasanya pemerintah kota Makassar telah melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif dan sekaligus menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Makassar bersikap visioner melalui perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) sehingga keterlibatan masyarakat dapat diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu yang telah diformulasikan dengan basis data dan pengetahuan. Balitbangda Kota Makassar relevansinya dengan hal tersebut, menuntut kesigapan dan eksistensinya dalam menyediakan rekomendasi hasil riset dengan berkolaborasi bersama stakeholder terkait (perangkat daerah terkait, insan akademisi, praktisi, sektor swasta, dan lembaga kemasyarakatan) agar *evidence and knowledge policy* dapat dihasilkan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kapabilitas Balitbangda Kota Makassar dalam membangun relevansi dan keakuratan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan akan berkontribusi besar dalam menentukan arah kebijakan serta perencanaan pembangunan kota Makassar secara efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, relevansinya dengan proses pembangunan Pemerintah Kota Makassar diperlukan suatu dokumen atau pedoman yang akan memandu para peneliti dalam memilih tema yang relevan dengan kondisi Pemerintah Kota Makassar serta selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

Dalam konteks RKPD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023, tentunya program atau kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) yang lebih efektif dalam menunjang pembangunan daerah membutuhkan upaya penguatan aktifitas litbangjirap melalui peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan litbangjirap yang lebih berbobot pula, sehingga diharapkan dapat memberi kemanfaatan dalam rangka pemecahan problematika dalam pencapaian tujuan. Hal ini penting untuk disadari bersama, bahwasanya program/kegiatan pembangunan pada umumnya diseleenggarakan untuk tujuan memecahkan masalah yang terjadi dan dihadapi dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan terselesaikannya problematika yang dihadapi masyarakat secara efektif dan menyeluruh akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perwujudan fungsi Balitbangda Kota Makassar sebagai dapur kebijakan (*think tank*) yang lebih mandiri dan independent dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memfasilitasi berbagai strategi dan langkah kerja serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja litbangjirap di daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya upaya pengelolaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan seharusnya dilaksanakan dengan sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan litbangjirap satu pintu atau terintegrasi dan terpusat pada Badan Litbang tersebut.

Penting disadari bahwasanya dalam upaya perwujudan pada kondisi ideal sebagaimana di maksud pada penjelasan sebelumnya, masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi bertalian problematika pada bidang litbangjirap, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik bertalian eksistensi dan peran litbangjirap di daerah. Dalam hal ini, eksistensi dan peran Balitbangda di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbangan dan ristek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Perpres 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Permendagri 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, kebijakan regulatif dan instrumen penunjang kebijakan di bidang litbangjirap secara umum belum kondusif dapat diimplementasikan secara efektif dan menyeluruh di daerah. Hal tersebut kianya tidak dapat dipisahkakan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul dikalangan aparatur pemerintah di daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan badan litbang di daerah. Dalam kondisi demikian juga amat bertalian erat dengan persoalan masih kurang informatifnya mengenai regulasi-regulasi mengenai litbangjirap karena terbatasnya edukasi dan sosialisasi mengenai hal tersebut. Disamping itu, pemanfaatan hasil riset juga belum optimal diterapkan oleh stakeholder terkait menjadi suatu kendala tersendiri bagi Balitbangda Kota Makassar untuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugasnya sehingga membutuhkan pemupukan komitmen dan sinergitas dalam pengimplementasian rekomendasi hasil riset untuk menyelesaikan persoalan terkini dan secara tidak langsung akan memberikan umpan balik berkenaan dengan kualitas dari hasil litbangjirap tersebut.

Di sisi lain, terdapat banyak potensi litbangjirap di wilayah Kota Makassar baik berupa kelembagaan riset, lembaga penelitian dan pengembangan, serta sumber daya

manusia riset dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan yang kreatif dan inovatif. Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena lahirnya beragam hasil-hasil riset teknologi tepat guna, produk inovasi, dan industry kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat kota Makassar.

Optimalisasi pelaksanaan fungsi kelitbangan membutuhkan suatu *frame work* atau kerangka kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsepsi rencana induk dan peta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sistematis, komprehensif dan sinergis. Dokumen rencana induk dan peta pemajuan IPTEK cluster sosial pemerintahan akan menjadi dokumen arah kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memuat strategi pentahapan (*road map*) dan rincian indikasi program di bidang litbangjirap yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Mencermati urgensi arah kebijakan dan strategi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta mempertimbangkan isu strategis baik pada ekosistem global, regional dan lokal, maka penyusunan rancangan induk dan peta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Dukungan terhadap pencapaian visi, misi dan program strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2021-2026;
2. Arah kebijakan dan strategi rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025;
3. Arah kebijakan dan strategi Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana termuat dalam Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
4. Arah kebijakan dan strategi Badan Kebijakan Strategis Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;
5. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Tahun 2018-2023
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026;

## **B. Pertanyaan kelitbangan**

Bagaimanakah arah, strategi kebijakan dan indikasi program kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024-2029?

### **C. Maksud dan tujuan**

Penyusunan rencana induk dan peta kemajuan IPTEK cluster sosial Pemerintahan Kota Makassar dimaksudkan untuk terjaminnya sinkronisasi dan integrasi arah atau panduan dalam pelaksanaan aktifitas riset di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sehingga dapat menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan yang berbasis *science*, inovatif dan aplikatif dalam penuntasan problematika pemerintah kota Makassar.

Tujuan rencana induk dan peta kemajuan IPTEK cluster sosial Pemerintahan Kota Makassar adalah memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan yang konstruktif dalam penyusunan atau perubahan tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2024-2029 berbasiskan riset.

### **D. Keluaran kegiatan**

Rekomendasi 1 (satu) Laporan Rencana Induk dan Peta Pemajuan IPTEK Cluster Sosial Pemerintahan.

### **E. Metodologi**

Penyusunan dokumen rencana induk dan peta pemajuan IPTEK cluster sosial pemerintahan, tim riset menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan telaah literatur yang bertalian erat dengan penyusunan rencana induk dan peta pemajuan IPTEK cluster sosial dan ekonomi seperti, dokumen rencana induk riset nasional (RIRN) 2017-2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dokumen RPJPD Kota Makassar 2005-2025, dokumen RPJMD Kota Makassar 2021-2026, serta menggunakan analisis SWOT untuk mengelaborasi secara mendalam pencapaian Balitbangda pada rencana induk periode sebelumnya dan juga *meresilience* ancaman akan perubahan lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional dan lokal .

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI

#### A. Gambaran Umum Kota Makassar

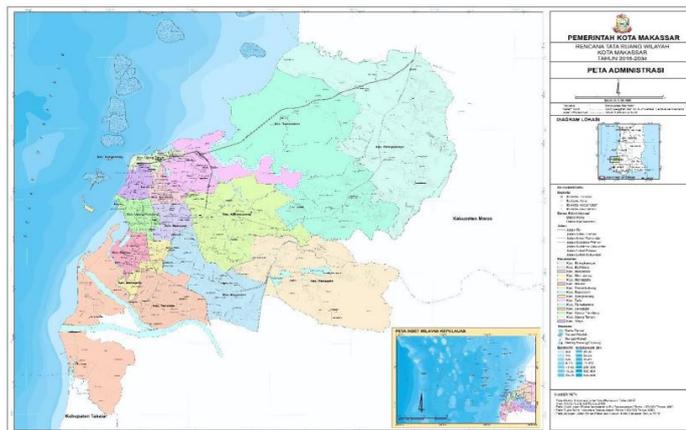
##### 2.1. Gambaran Umum Wilayah

###### 2.1.1. Aspek Geografi dan Administrasi

Kota Makassar terletak di pantai barat Pulau Sulawesi dengan koordinat geografis antara 119°4'29,038"–119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052"–5°14'0,146" Lintang Selatan. Wilayah Kota Makassar memiliki batasan yang berbeda-beda dengan kabupaten sekitarnya. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Makassar yang layak huni adalah sebesar 175,77 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar adalah Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, Tamalate, Rappocini, Manggala, Panakkukang, Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso. Perincian batasan kecamatan tersebut dapat dilihat dalam gambar yang disajikan berikut ini.

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Makassar**

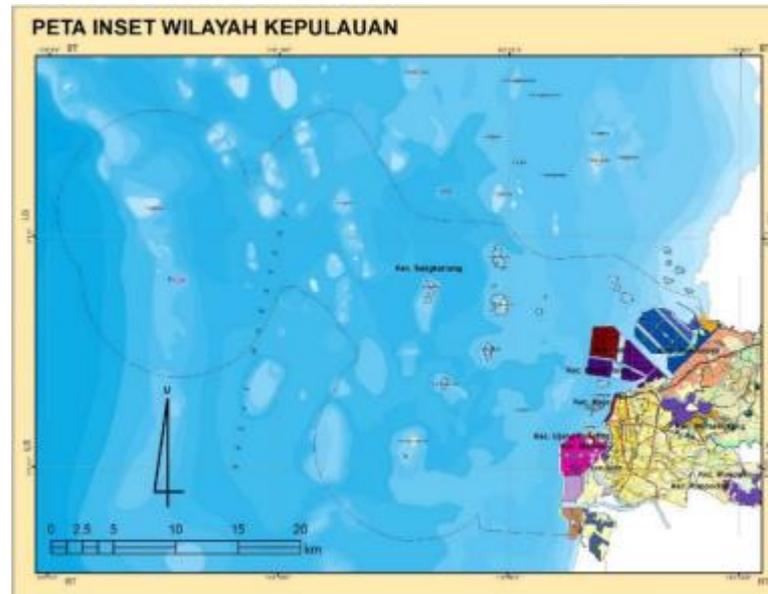


*Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034*

Kota Makassar tidak hanya terdiri dari wilayah daratan, tetapi juga memiliki wilayah kepulauan yang membentang sepanjang garis pantai. Wilayah ini terdiri dari 12 pulau karang yang merupakan bagian dari gugusan Pulau-Pulau Sangkarrang atau yang dikenal sebagai Pulau-Pulau Pabirring, juga dikenal dengan sebutan Spermonde. Pulau-pulau tersebut meliputi Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau

Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung), dan Pulau Kayangan (terdekat). Detail lokasi pulau-pulau ini dapat ditemukan dalam gambar 2.2.

**Gambar 2.2 Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar Tahun 2020**



*Sumber: Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034*

Kota Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang dan kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia. Hal ini dikarenakan Kota Makassar berada di persimpangan jalur lalu lintas yang menghubungkan wilayah selatan dan utara di Provinsi Sulawesi, serta menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia. Kota ini berperan sebagai pusat pertemuan dari berbagai arah pergerakan lalu lintas di wilayah tersebut.

## **2.1.2. Penggunaan Lahan**

Secara umum, pola ruang Kota Makassar meliputi wilayah kota yang terbagi menjadi 15 kecamatan. Di dalam wilayah ini, terdapat kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mencakup sebagian dari kecamatan-kecamatan tersebut.

### **2.1.2.1. Kawasan Lindung**

#### **2.1.2.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya memiliki tujuan untuk mempertahankan iklim mikro yang baik, mengendapkan air, menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh kawasan lindung yang melindungi kawasan di

bawahnya adalah kawasan resapan air. Di Kota Makassar, daerah resapan air terletak di sekitar Kawasan Danau Balang Tonjong, khususnya di Kecamatan Manggala yang saat ini digunakan sebagai kawasan budidaya.

Namun, tidak hanya kawasan tersebut yang dapat difungsikan sebagai area resapan air. Kawasan lain juga memiliki potensi untuk berperan dalam fungsi yang sama. Dalam perencanaan, salah satu segmen daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air adalah sekitar Sungai Tallo, yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Selain itu, Kawasan Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate juga memiliki potensi sebagai daerah resapan air.

Berdasarkan Peta Morfologi Lahan Kota Makassar, kawasan timur kota menunjukkan kualitas morfologi yang tinggi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola aliran air permukaan di sekitarnya. Dalam penataan daerah rawa dan genangan, perhatian perlu diberikan terhadap kondisi morfologi ruang sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran air dan ruang air dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya. Pemanfaatan dan kebijakan pengembangan kota ke depan harus memperhatikan aspek ini, sehingga tercipta keseimbangan yang dinamis antara manusia dan lingkungan.

#### **2.1.2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat memiliki tujuan utama untuk melindungi sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, serta menciptakan harmoni antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kawasan perlindungan setempat juga bertujuan untuk meningkatkan keberlangsungan lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk.

Di Kota Makassar, kawasan sempadan pantai membentang sepanjang kurang lebih 35 kilometer, mulai dari pesisir bagian utara hingga pesisir bagian barat dan selatan. Kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana pesisir, rekreasi, wisata bahari, penelitian dan pendidikan, serta kepentingan adat dan kearifan lokal. Bagian dari kawasan sempadan pantai di Kota Makassar juga termasuk kawasan hutan mangrove, yang berfungsi sebagai habitat alami dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan pantai dan lautan.

Kawasan sempadan sungai meliputi kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk saluran irigasi primer. Perlindungan kawasan ini penting untuk mempertahankan fungsi sungai, melindungi kualitas air, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta menjaga ekosistem sungai

dan sekitarnya. Di Kota Makassar, rencananya sempadan sungai ditetapkan di sepanjang Sungai Jeneberang, Sungai Tallo, dan sungai-sungai lain yang berada di wilayah kota.

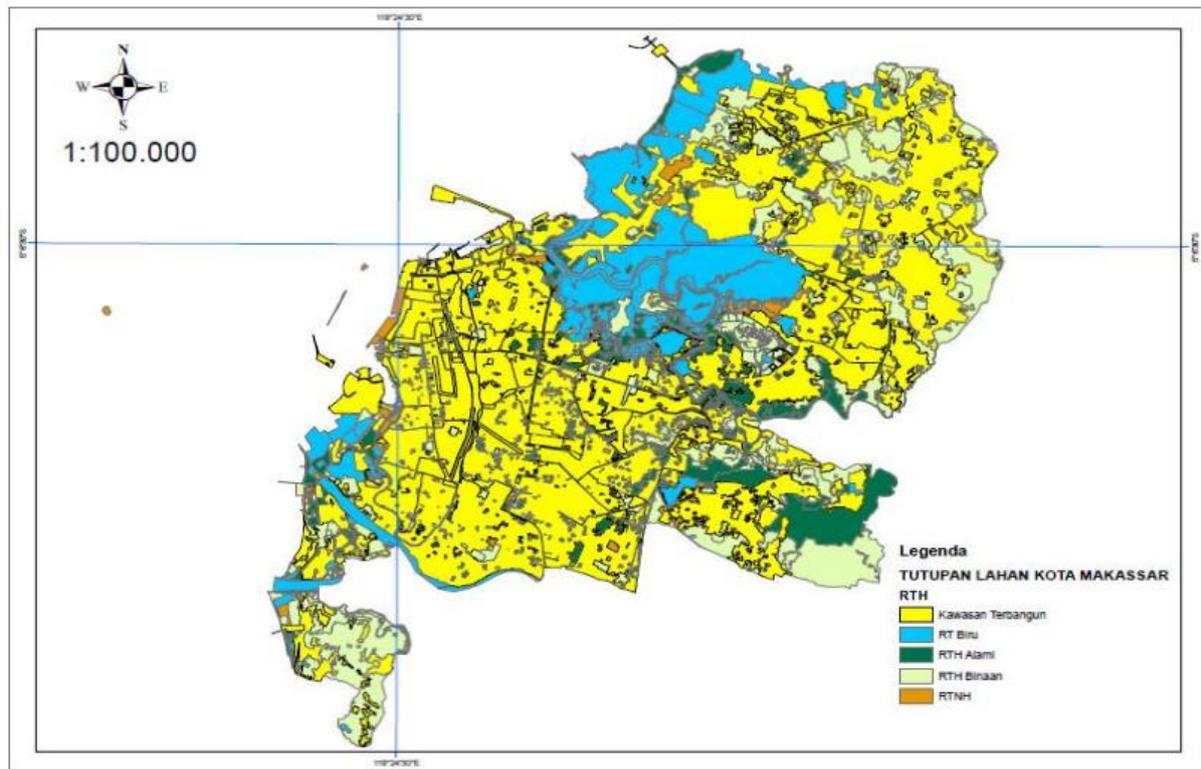
Kawasan sempadan danau atau waduk ditetapkan setidaknya 50 meter dari tepi muka air tertinggi. Di Kota Makassar, terdapat beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan sempadan danau atau waduk, seperti Danau Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Kecamatan Tamalanrea, Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala, Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate, Waduk Bitowa di Kecamatan Manggala, dan Waduk Tallo.

#### **2.1.2.1.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar merujuk pada kawasan atau area tanah yang ditumbuhi oleh tanaman dan memiliki berbagai fungsi, seperti perlindungan habitat, fasilitas kota/lingkungan, pengamanan infrastruktur, dan pertanian. RTH kota memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural, dan estetika. Dalam perencanaan pengembangan, RTH di Kota Makassar dibagi menjadi dua kategori, yaitu kawasan hijau lindung dan kawasan hijau binaan. Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari RTH yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk perlindungan habitat lokal maupun wilayah yang lebih luas. Sementara itu, Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari RTH di luar kawasan hijau lindung yang dibangun melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan vegetasi, serta dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk fungsi ekologis dan sosial kota.

Pengembangan RTH mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH dikategorikan berdasarkan tipologi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Dalam hal kepemilikan, RTH dapat dibagi menjadi RTH privat dan RTH publik. RTH privat merupakan RTH yang dimiliki oleh institusi atau individu dengan pemanfaatan terbatas, misalnya taman atau halaman rumah/milik swasta yang ditanami tumbuhan. Sementara itu, RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota dan digunakan oleh masyarakat umum.

Gambar 2.3 Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar



Sumber: Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar saat ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 30% dari total luas kota. Rincian luasan RTH Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar Tahun 2020

No	Kecamatan	Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)							Jumlah RTH (Ha)	Luas Kecamatan (Ha)	Persentase RTH terhadap Luas Kota (%)
		Hutan Kota	Hutan Hijau	Lapangan	Taman	Pemukaman	Bakau	Sempadan			
1	Biringkanya	60,67	13,05	74,53	68,09	12,75	10,1		239,2	4.822	1,36
2	Bontoala		0,45		5,29	1,2			6,94	210	0,04
3	Makassar		8,15	0,29	3,96	1,93		0,01	14,34	252	0,08
4	Manggala		0,32	0,26	2,83	4,44		0,35	8,2	2.414	0,05
5	Mamajang		2,18	13,9	10,19	37,05		4,7	68,02	225	0,39
6	Mariso	0,54	1,95	5,63	2,8				10,92	182	0,06
7	Panakkukang	17,9	10,31	21,06	16,08	13,4	1,1		79,85	1.705	0,45
8	Rappocini		7,67	11,8	7,69	2,14			29,3	923	0,17
9	Tallo		4,4	4,52	13,87	13,8	364,1		400,65	583	2,28
10	Tamalanrea	61,75	16,17	15,59	12,99	5,03	34,62	74,53	220,681	3.184	1,26
11	Tamalate	0,76	6,43	19,3	14,38	5,07		161,83	207,76	2.021	1,18
12	Ujung Pandang		4,17	8,46	3,57				16,2	263	0,09
13	Ujung Tanah		4,34	2,76	1,59				8,69	440	0,05
14	Wajo		1,63	0,02	0,85	0,04			2,54	199	0,01
15	Kepulauan Sangkarrang			0,39	0,32	0,31			1,02	154	0,01
<b>Total</b>		<b>141,6</b>	<b>81,22</b>	<b>178,51</b>	<b>164,49</b>	<b>97,16</b>	<b>409,9</b>	<b>241,42</b>	<b>1.314,31</b>	<b>17.577</b>	<b>7,48</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020

Kondisi eksisting RTH di Kota Makassar belum sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, diwajibkan alokasi luasan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari total luas kota, dengan pembagian persentase 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Oleh karena itu, pengembangan RTH Kota Makassar diupayakan untuk memenuhi luasan minimal yang telah ditetapkan tersebut.

#### **2.1.2.1.4. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya ditetapkan dengan tujuan melindungi keanekaragaman biota, ekosistem, fenomena alam, serta kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan plasma nutfah, penelitian ilmiah, dan pembangunan secara umum, serta melindungi kekayaan budaya bangsa dari ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia dan alam. Kawasan suaka alam meliputi kawasan pantai berhutan bakau yang berfungsi sebagai perlindungan pantai, penahan erosi, dan tempat berkembang biaknya biota laut. Di Kota Makassar, kawasan pantai berhutan bakau terletak di beberapa kecamatan dengan luas 558,93 hektar. Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman alam, situs purbakala, bangunan bersejarah, arkeologi, dan monumen yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi. Di Kota Makassar, terdapat beberapa kawasan cagar budaya seperti Benteng Fort Rotterdam, Benteng Somba Opu, Makam raja-raja Tallo, Kawasan Makam Lajangiru, dan Kawasan Makam Lomo Ri Antang.

#### **2.1.2.1.5. Kawasan Rawan Bencana**

Dalam mitigasi terhadap dampak bencana, perlu dilakukan perencanaan kawasan rawan bencana alam di Kota Makassar. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya dari kemungkinan terjadinya bencana. Kota Makassar dikategorikan sebagai dataran landai dengan ketinggian antara 1 hingga 22 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini dapat menyebabkan banjir atau luapan air, terutama di daerah dengan elevasi antara 1 hingga 4 meter di atas permukaan laut dan daerah dengan sistem drainase yang tidak memadai.

Kota Makassar juga dipengaruhi oleh sungai utama, yaitu Sungai Tallo dan Sungai Je'neberang. Kondisi morfologi ini juga menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Makassar. Berdasarkan Daftar Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Kota Makassar berpotensi mengalami 5 jenis bencana, yaitu banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi, dan cuaca ekstrem. Bencana-bencana tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi kembali. Berikut ini Kawasan rawan bencana di Kota Makassar terdiri atas:

### a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Makassar adalah banjir. Penyebab utama banjir ini adalah kerusakan daerah hulu sungai akibat ulah manusia, seperti perambahan hutan secara liar dan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ada, yang mengurangi kemampuan daerah untuk menyerap air (catchment area). Selain itu, cuaca juga berperan dalam meningkatkan potensi banjir. Banjir umumnya terjadi setiap tahun di beberapa bagian kota, terutama pada bulan Desember hingga Februari, saat curah hujan paling tinggi.

Beberapa banjir besar yang pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir di Kota Makassar terjadi pada tahun 2013, 2015, dan 2017. Banjir tersebut melanda sebagian besar wilayah kota. Daerah-daerah yang sering terkena banjir umumnya merupakan daerah rendah yang dulunya berupa empang atau rawa-rawa yang kemudian dikembangkan menjadi pemukiman. Daerah-daerah ini terletak sepanjang aliran Sungai Tallo, Sungai Je'neberang, dan Sungai Pampang.

Daerah langganan banjir mencakup daerah hulu atau bagian tengah dari catchment area, seperti kawasan Antang, Minasa Upa, Pelabuhan, Jalan Tol, dan beberapa kawasan lainnya. Kawasan rawan banjir juga ditetapkan di beberapa kecamatan, antara lain Wajo, Biringkanya, Tamalanrea, Tallo, Bontoala, Manggala, Tamalate, Panakkukang, Rappocini, dan Ujung Tanah. Selain itu, kawasan rawan bencana akibat sedimentasi sungai dan banjir terdapat di Tamalanrea, Tallo, Bontoala, Manggala, Tamalate, Panakkukang, Ujung Tanah, dan sekitar sungai Je'neberang. Kota Makassar juga sering mengalami luapan air, terutama di daerah padat penduduk, kawasan kumuh, dan daerah dengan sistem drainase yang kurang jelas.

Pengkajian bahaya banjir dilakukan untuk mengetahui luas daerah yang terdampak dan kelas bahaya banjir. Parameter yang digunakan dalam penentuan kajian bahaya banjir meliputi daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Berdasarkan parameter tersebut, dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah yang terdampak oleh banjir di Kota Makassar. Informasi lebih detail mengenai pengkajian bahaya banjir dapat ditemukan dalam tabel dan gambar yang terdapat dalam rencana pembangunan Kota Makassar.

**Tabel 2.2.**  
**Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Banjir Tahun 2020 Kota Makassar**

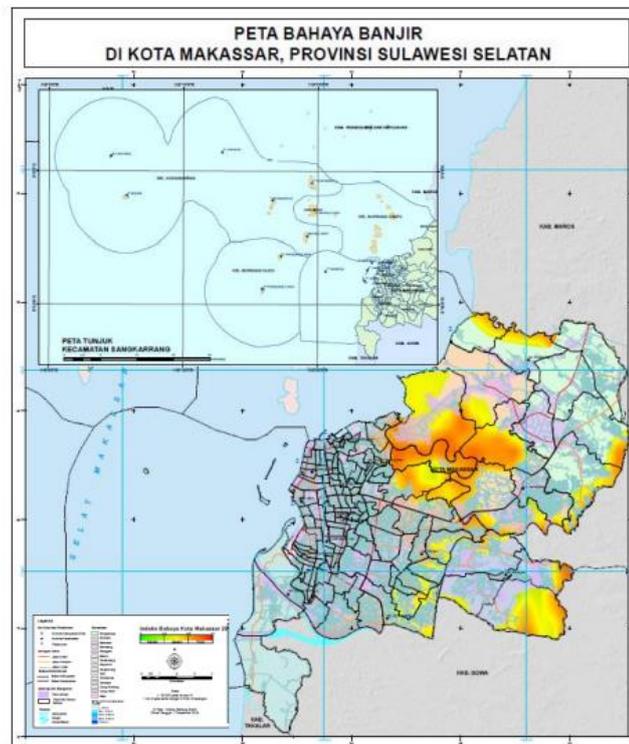
No	Kecamatan	Potensi Banjir Sedang		Potensi Banjir Tinggi		Total Kelurahan	Total Luas (Ha)
		Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)		
1	Biringkanya	5	599	1	8	6	607
2	Manggala	3	320	3	729	6	1.049
3	Panakkukang	11	1.073	1	9	12	1.082
4	Rappocini	6	496	-	-	6	496
5	Tallo	7	185	1	115	8	300

6	Tamalanrea	5	1.376	1	418	6	1.794
7	Tamalate	3	310	1	10	4	320
<b>Grand Total</b>		<b>40</b>	<b>4.359</b>	<b>8</b>	<b>1.289</b>	<b>48</b>	<b>5.648</b>

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa total luas daerah yang berpotensi terkena bencana banjir di Kota Makassar adalah 5.638 hektar. Luas daerah tersebut tersebar di 7 kecamatan dan 40 kelurahan. Kelas bahaya banjir di Kota Makassar ditentukan berdasarkan tingkat rawan jumlah kejadian yang terjadi di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan.

**Gambar 2.4. Peta Bahaya Banjir Tahun 2020**



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

#### **b. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan**

Pengkajian bahaya kekeringan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai luas daerah yang terdampak dan indeks serta kelas bahaya kekeringan di Kota Makassar. Parameter yang digunakan dalam pengkajian ini adalah faktor kekeringan meteorologi, yang diukur dengan menggunakan indeks presipitasi terstandarisasi. Berdasarkan parameter ini, dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah yang terdampak oleh bencana kekeringan di Kota Makassar.

Rekapitulasi pengkajian bahaya kekeringan di Kota Makassar dapat ditemukan dalam tabel yang tidak disertakan dalam pertanyaan. Tabel tersebut memberikan informasi mengenai luas daerah terdampak dan kelas bahaya kekeringan di berbagai wilayah Kota Makassar.

**Tabel 2.3**  
**Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Potensi Bahaya Kekeringan
1	Biringkanaya	11	4.822	Sedang
2	Bontoala	12	210	Sedang
3	Makassar	14	252	Sedang
4	Mamajang	13	225	Sedang
5	Mangga;a	8	2.414	Sedang
6	Mariso	9	182	Sedang
7	Panakkukang	11	1.705	Sedang
8	Rappocini	11	923	Sedang
9	Kepulauan Sangkarrang	3	154	Sedang
10	Tallo	15	583	Sedang
11	Tamalanrea	8	3.184	Sedang
12	Tamalate	11	2.021	Sedang
13	Ujung Pandang	10	263	Sedang
14	Ujung Tanah	9	440	Sedang
15	Wajo	8	199	Sedang
<b>Grand Total</b>		<b>153</b>	<b>17.577</b>	

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

**Gambar 2.5 Peta Bahaya Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar**



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

### c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Dan Abrasi

Beberapa wilayah di tepi pantai rentan terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Faktor penyebab utamanya adalah gelombang angin yang terbentuk akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ini memiliki energi yang dapat membentuk pantai, menyebabkan arus, dan mengangkut sedimen sepanjang pantai. Ketika angin berhembus dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut, air yang semula tenang akan bergerak dan membentuk gelombang. Gelombang dengan energi yang datang secara tegak lurus dari utara pantai akan mengikis kawasan tersebut, menyebabkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dan dapat menyebabkan perubahan garis pantai.

Pengkajian bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, dilakukan dengan penilaian terhadap luas daerah yang terdampak serta indeks dan kelas bahaya yang terkait. Beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian ini mencakup tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Dengan melakukan pengkajian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang ada dan dampak yang mungkin terjadi akibat gelombang ekstrem dan abrasi.

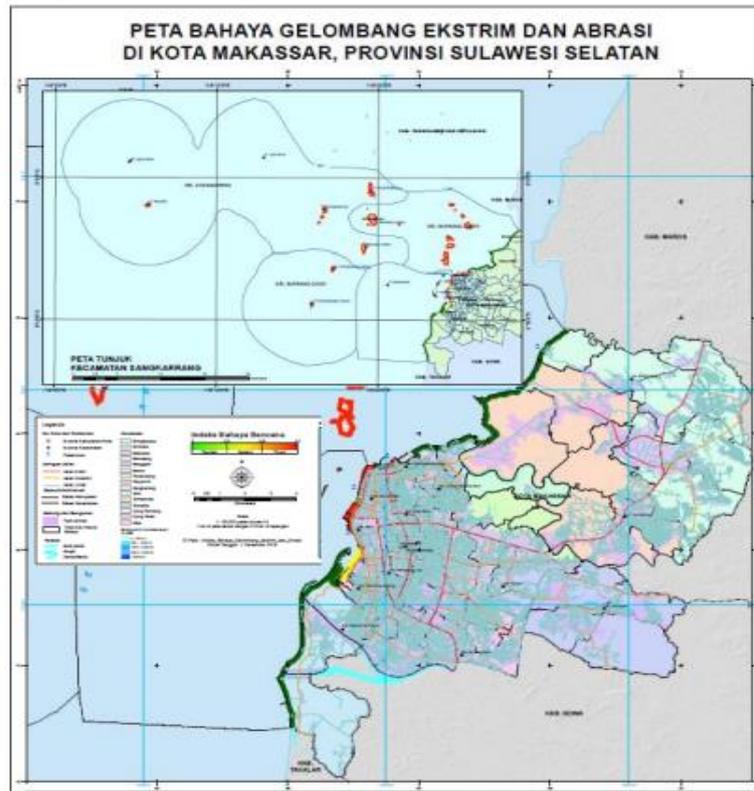
Berikut ini adalah tabel rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Kota Makassar:

**Table 2.4.**  
**Potensi Luas Daerah Terdampak Gelombang Ekstrem dan Abrasi**  
**Tahun 2020 Kota Makassar**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi
1	Biringkanaya	36,45	1	Sedang
2	Mariso	35,73	7	Sedang
3	Tallo	70,02	4	Sedang
4	Tamalanrea	118,53	2	Sedang
5	Tamalate	196,11	3	Sedang
6	Ujung Pandang	52,70	4	Sedang
7	Ujung Tanah	59,40	7	Sedang
8	Wajo	35,08	5	Sedang
9	Kepulauan Sangkarran	154,00	3	Sedang
Total		758,02	36	

*Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020*

**Gambar 2.6**  
**Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2020 Kota Makassar**



*Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020*

#### **d. Kawasan Rawasan Bencana Tsunami**

Tsunami adalah sebuah bencana yang terjadi ketika terjadi perubahan tiba-tiba pada bentuk dasar laut, yang mengganggu air laut secara impulsif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan longsoran (*landslide*) di dasar laut. Gempa bumi adalah penyebab utama dari ketiga faktor tersebut.

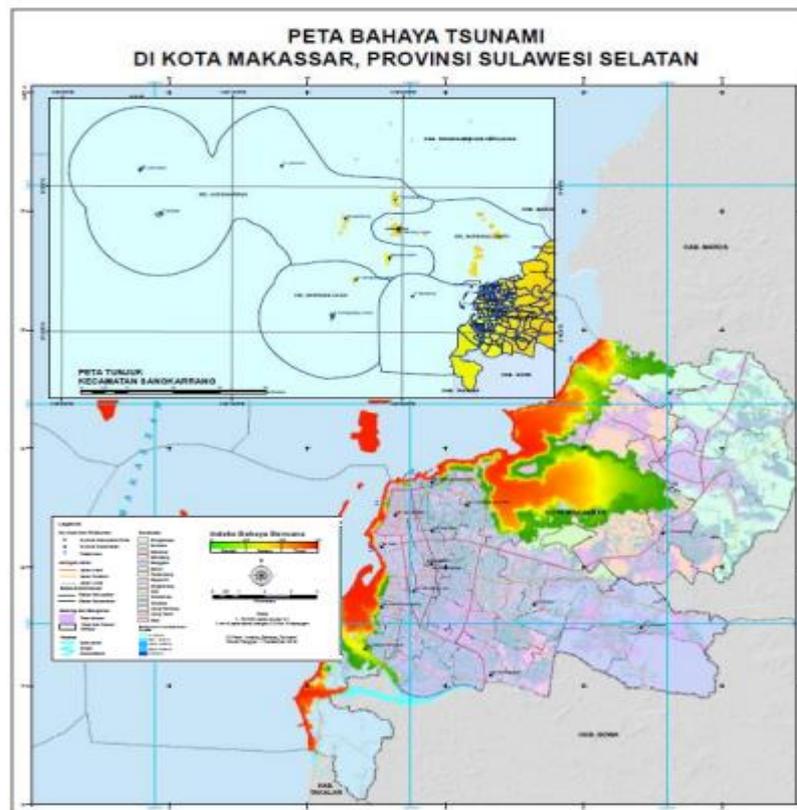
Pengkajian bahaya tsunami dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai luas daerah yang terdampak, serta indeks dan kelas bahaya tsunami di Kota Makassar. Parameter yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah yang terdampak oleh bencana tsunami.

Rekapitulasi pengkajian bahaya tsunami di Kota Makassar disajikan dalam tabel yang tidak disertakan dalam pertanyaan. Tabel tersebut memberikan informasi mengenai luas daerah yang terdampak dan kelas bahaya tsunami di berbagai wilayah Kota Makassar.

**Tabel 2.5. Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Tsunami Tahun 2020 Makassar**

No	Kecamatan	Potensi Tsunami Sedang		Potensi Tsunami Tinggi		Total Kelurahan	Total Luas (Ha)
		Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)		
1	Biringkanaya	-	-	3	364,86	3	364,86
2	Mamajang	-	-	1	3,96	1	3,96
3	Mariso	-	-	7	91,75	7	91,75
4	Panakkukang	1	2,79	1	238,68	2	241,47
5	Kepulauan Sangkarrang	-	-	3	154,00	3	154,00
6	Tallo	1	0,90	5	280,22	6	281,12
7	Tamalanrea	1	0,18	4	1.436,67	3	1.436,85
8	Tamalate	-	-	4	572,55	5	572,55
9	Ujung Pandang	-	-	4	39,87	4	39,87
10	Ujung Tanah	1	3,06	5	43,74	6	46,80
11	Wajo	-	6,93	5	33,75	5	33,75
<b>Grand Total</b>		<b>17.577</b>		<b>42</b>	<b>3.260,05</b>	<b>46</b>	<b>3.266,98</b>

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

**Gambar 2.7 Peta Bahaya Tsunami Tahun 2020 Kota Makassar**

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

#### e. Kawasan Rawan Epidemik Dan Wabah Penyakit

Untuk mengkaji bahaya epidemik dan wabah penyakit, dilakukan evaluasi terhadap luas daerah yang terdampak dan klasifikasi tingkat bahaya epidemik dan wabah penyakit. Pedoman pengkajian risiko telah menetapkan parameter yang digunakan dalam menentukan evaluasi bahaya epidemik dan wabah penyakit. Parameter tersebut meliputi kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita

demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk secara umum.

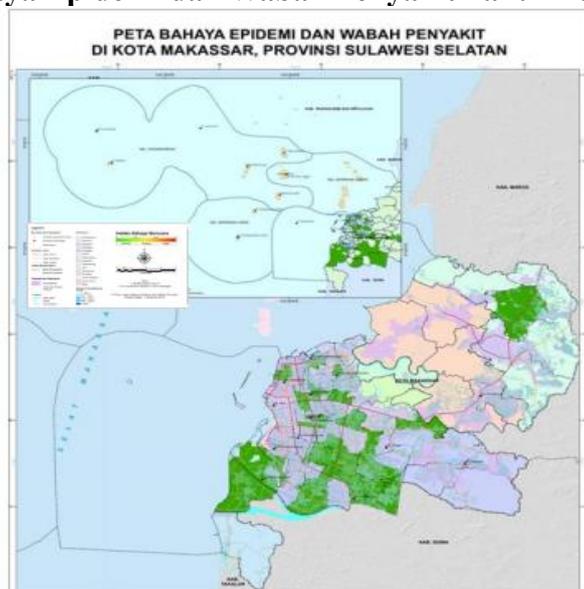
Dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, dapat ditentukan klasifikasi tingkat bahaya dan luas daerah yang terdampak oleh bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi pengkajian bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar:

**Table 2.6.**  
**Potensi Luar Daerah Terdampak Bencana Endemi dan Wabah Penyakit Kota Makassar Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Potensi Epidemi dan Wabah Penyakit
1	Biringkanaya	526,6	5	Rendah
2	Bontoala	86,14	10	Rendah
3	Makassar	87,96	13	Rendah
4	Mamajang	37,5	8	Rendah
5	Manggala	11,52	4	Rendah
6	Mariso	33,78	4	Rendah
7	Panakkukang	448,74	11	Rendah
8	Rappocini	792,18	10	Rendah
9	Tallo	67,68	11	Rendah
10	Tamalanrea	6,93	2	Rendah
11	Tamalate	783,13	8	Rendah
12	Ujung Pandang	1,08	3	Rendah
13	Ujung Tanah	2,88	5	Rendah
14	Wajo	54	5	Rendah
<b>Total</b>		<b>2.940,12</b>	<b>99</b>	

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

**Gambar 2.8. Peta Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit Tahun 2020 Kota Makassar**



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

#### **2.1.2.1.6. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana**

Ruang evakuasi bencana merupakan area yang disiapkan sebagai tempat sementara untuk mengungsikan korban bencana. Ruang evakuasi ini dirancang dengan kapasitas yang cukup dan tingkat keamanan yang terjamin, serta memiliki akses yang mudah dijangkau oleh tim bantuan kemanusiaan. Pembangunan ruang evakuasi bencana melibatkan penggunaan optimal dari ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) di dalam wilayah kota.

Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Makassar, yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar, mencakup:

- 1) Ruang evakuasi bencana banjir, yang melibatkan penggunaan lapangan terbuka yang ada di kota dengan dilengkapi fasilitas penampungan yang baik dan memadai.
- 2) Ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami. Selain memanfaatkan bangunan tinggi seperti hotel dan sekolah yang tersebar di wilayah kota, juga akan memanfaatkan lapangan terbuka yang tersedia di dalam kota.

Dengan rencana ini, diharapkan Kota Makassar memiliki kawasan ruang evakuasi bencana yang dapat digunakan secara efektif saat terjadi bencana alam, baik banjir maupun gelombang pasang dan tsunami.

#### **2.1.2.1.7. Kawasan Lindung Lainnya**

Dalam rangka melindungi dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya dengan tujuan memastikan keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya, beberapa kawasan lindung lainnya telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Beberapa kawasan lindung yang termasuk di dalamnya meliputi:

Pertama, terdapat kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup beberapa pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini antara lain Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona. Penetapan kawasan konservasi ini bertujuan untuk melindungi kelestarian alam di pulau-pulau tersebut serta memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Selain itu, terdapat juga kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Spermonde. Kawasan ini mencakup perairan yang terletak di sekitar Spermonde, dan tujuan utamanya

adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem laut di daerah tersebut.

Selanjutnya, terdapat kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove. Kawasan konservasi pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Sementara itu, kawasan konservasi mangrove ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Penetapan kawasan-kawasan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir yang penting, seperti hutan bakau dan mangrove, yang berperan dalam menjaga kualitas air, melindungi pantai dari abrasi, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan.

Selain itu, terdapat juga kawasan konservasi maritim yang melibatkan permukiman nelayan di Kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kawasan ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan aktivitas nelayan tradisional dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber Daya laut dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penetapan kawasan lindung lainnya ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan ekosistemnya. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang tepat diharapkan dapat menjaga ketersediaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mempertahankan nilai dan keanekaragaman alam yang ada dalam jangka Panjang.

#### **2.1.2.2. Kawasan budidaya**

Kawasan Budidaya Kota Makassar merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam rencana pengembangan kawasan permukiman Kota Makassar, terdapat pengelompokan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan tingkat kepadatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi terletak di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, Makassar, Mamajang, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Manggala, Biringkanaya, Wajo, dan Kepulauan Sangkarrang. Di kawasan ini, rencananya akan dibangun permukiman dengan kepadatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perumahan penduduk.

Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang. Dalam kawasan ini, rencananya akan dibangun

permukiman dengan kepadatan sedang sebagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan perumahan.

Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah terletak di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Panakkukang, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, dan Ujung Tanah. Di kawasan ini, rencananya akan dibangun permukiman dengan kepadatan rendah, mungkin dalam bentuk permukiman pedesaan, yang lebih mengedepankan ruang terbuka dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

Penetapan kawasan budidaya ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar untuk periode 2021-2026. Hal ini mencerminkan gambaran umum kondisi daerah dan upaya pengembangan kawasan permukiman dengan memperhatikan kepadatan penduduk serta potensi sumber daya yang ada.

#### **2.1.2.2.1. Kawasan peruntukan perumahan**

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan wilayah yang ditujukan untuk mengembangkan sektor ekonomi melalui kegiatan perdagangan dan jasa. Kawasan ini memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan skala pelayanan dan cakupannya.

Pertama, terdapat kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan. Kawasan ini ditetapkan di berbagai kecamatan, seperti Tallo, Mariso, Makassar, Manggala, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Bontoala, Mamajang, Biringkanaya, Tamalate, Wajo, Rappocini, Tamalanrea, Panakkukang, dan Kepulauan Sangkarrang. Kawasan ini bertujuan untuk memberikan layanan perdagangan dan jasa kepada masyarakat setempat dan sekitarnya.

Kedua, terdapat kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota. Kawasan ini ditetapkan di beberapa kecamatan, seperti Wajo, Mamajang, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Bontoala. Fokus kawasan ini adalah menyediakan layanan perdagangan dan jasa untuk kebutuhan perkotaan di wilayah tersebut.

Ketiga, terdapat kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional. Kawasan ini ditetapkan di beberapa kecamatan, seperti Tamalate, Panakkukang, Rappocini, Wajo, Ujung Pandang, Tamalanrea, Bontoala, dan Biringkanaya. Tujuan dari kawasan ini adalah memberikan layanan perdagangan dan jasa yang lebih luas dan mencakup wilayah regional.

Terakhir, terdapat kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional. Kawasan ini terletak di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate. Fungsinya adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa yang melayani skala internasional, nasional, dan regional.

Penetapan kawasan perdagangan dan jasa ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi di Kota Makassar. Dengan adanya kawasan-kawasan ini,

diharapkan dapat tercipta ruang bagi pertumbuhan dan kemajuan bisnis perdagangan dan jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah tersebut.

#### **2.1.2.2.2. Kawasan Peruntukan Perkantoran**

Kawasan perkantoran meliputi beberapa wilayah di Kota Makassar. Kawasan ini ditetapkan sebagai area khusus untuk perkantoran pemerintahan. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan terletak di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Makassar, Rappocini, Ujung Pandang, Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Penetapan kawasan perkantoran ini bertujuan untuk menyediakan ruang yang sesuai untuk kegiatan administrasi dan pelayanan pemerintahan. Dengan adanya kawasan perkantoran ini, diharapkan dapat tercipta efisiensi dan optimalisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kawasan perkantoran pemerintahan ini mencakup berbagai kecamatan di Kota Makassar, sehingga memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengurus berbagai urusan administrasi dan mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan kawasan perkantoran ini juga dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama antara unit-unit pemerintahan yang berada dalam area tersebut.

Dengan demikian, kawasan perkantoran pemerintahan di Kota Makassar menjadi pusat kegiatan administrasi, koordinasi, dan pelayanan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

#### **2.1.2.2.3. Kawasan peruntukan industri**

Kawasan peruntukan industri di Kota Makassar mencakup beberapa jenis kawasan. Kawasan peruntukan industri besar terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA), yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Rencana pengembangan kawasan ini termasuk pengembangan industri berteknologi tinggi yang ramah lingkungan, pengaturan dan pengendalian kegiatan industri yang berisiko tinggi terhadap dampak negatif pada manusia dan lingkungan, pengembangan kegiatan industri terkait perikanan dan/atau kepelabuhanan, serta pengembangan industri di satu kawasan yang terintegrasi.

Kawasan peruntukan industri sedang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, Manggala, Makassar, Tallo, dan Tamalate. Kawasan ini didedikasikan untuk kegiatan pengolahan industri.

Sedangkan kawasan peruntukan industri kecil melibatkan aglomerasi industri rumah tangga yang direncanakan tersebar merata di seluruh kecamatan dalam wilayah kota. Tujuan dari kawasan ini adalah untuk mendorong perkembangan industri kecil di berbagai sektor.

Dengan penetapan kawasan peruntukan industri yang berbeda-beda, diharapkan dapat tercipta ruang yang sesuai untuk berbagai jenis industri. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan industri yang berkelanjutan, mengendalikan risiko negatif, dan memajukan sektor industri di Kota Makassar.

#### **2.1.2.2.4. Kawasan Peruntukan Pergudangan**

Kawasan peruntukan pergudangan di Kota Makassar terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Rencana pengembangan kawasan pergudangan meliputi beberapa aspek, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan pergudangan di kawasan pelabuhan, dengan tujuan mengantisipasi perkembangan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan mendukung kegiatan perdagangan dan jasa. Kawasan pergudangan ini direncanakan agar memiliki lingkungan yang nyaman, indah, dan teratur, serta tetap terintegrasi dengan atmosfer kawasan pelabuhan.
- 2) Pengembangan kawasan pergudangan di kawasan yang mendukung kegiatan bandar udara. Rencana ini bertujuan untuk mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang dapat mendukung industri, perdagangan, dan jasa yang ada di bandar udara. Selain itu, kawasan pergudangan ini direncanakan agar memiliki tata ruang yang lebih teratur dan memperhatikan aspek lingkungan.
- 3) Pengembangan kawasan pergudangan di kawasan maritim, dengan fokus pada pengembangan kawasan pergudangan yang dapat mendukung kegiatan industri, perdagangan, dan jasa maritim. Rencana ini juga mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang lebih teratur secara tata ruang dan memperhatikan aspek lingkungan.
- 4) Pengembangan kawasan pergudangan secara umum, dengan arahan rencana sebagai berikut: merelokasi kawasan pergudangan dari dalam kota, menjadikannya sebagai pusat konsentrasi dan relokasi gudang dalam kota, serta mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang sejalan dengan nilai ruang rencana yang ingin dicapai.

Dengan rencana pengembangan ini, diharapkan kawasan pergudangan di Kota Makassar dapat dikembangkan secara terencana, efisien, dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mendukung kegiatan perdagangan, industri, dan jasa secara optimal.

#### **2.1.2.2.5. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan pariwisata Kota Makassar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, dan kawasan pariwisata buatan.

Kawasan pariwisata budaya dan sejarah merupakan tempat-tempat yang memiliki nilai budaya atau sejarah yang menarik bagi wisatawan. Kawasan ini termasuk dalam kawasan cagar budaya dan terdapat di beberapa kecamatan. Contoh kawasan pariwisata budaya di Kota Makassar meliputi Benteng Fort Rotterdam, Taman Miniatur Sulawesi/Benteng Somba Opu, Makam Raja-Raja Tallo, Bunker Jepang, Makam Pangeran Diponegoro, Monumen Korban 40.000 Jiwa, Monumen Mandala, Monumen Emmy Saelan, Museum Kota, Masjid Raya, Gereja Katedral, Klenteng Ibu Agung Bahari, dan Pecinan (China Town).

Kawasan pariwisata alam terkait dengan kegiatan rekreasi alam dan umumnya berlokasi di pantai atau pulau-pulau yang mendukung pariwisata. Di Kota Makassar, kawasan wisata alam berada di sepanjang pesisir pantai dan pulau-pulau terdekat. Contoh kawasan pariwisata alam meliputi Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pantai reklamasi kota, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Lanjukang, Delta Lakkang, serta pulau-pulau seperti Barrang Caddi, Barrang Lompo, Langkai, Bonetambung, Kodingareng Lompo, Lae-Lae, dan Lae-Lae Kecil.

Kawasan pariwisata buatan mencakup tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata kuliner, konvensi, dan rekreasi. Kawasan-kawasan ini termasuk koridor air di sepanjang pesisir, transportasi air Sungai Tallo, kawasan belanja, lorong-lorong kota, tempat kuliner, dan kawasan Biringkanal. Rencana pengembangan kawasan pariwisata ditetapkan terutama di Kecamatan Tamalate, yang merupakan kawasan bisnis dan pariwisata.

Dengan pengelompokan ini, diharapkan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Makassar dapat terarah dan teratur, sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata, baik dari segi budaya, alam, maupun fasilitas buatan, dan memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan yang datang ke kota tersebut.

#### **2.1.2.2.6. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)**

Ruang terbuka non hijau adalah area terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di Kota Makassar, ruang terbuka non hijau mencakup beberapa jenis area, antara lain:

- 1) Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan, seperti jalan bebas hambatan, arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Ini merupakan area linear yang berfungsi sebagai aksesibilitas pada jaringan jalan tertentu.

- 2) Trotoar (pedestrian way) yang terletak di sisi jalan pada jaringan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Trotoar ini dirancang untuk masyarakat umum dan juga penyandang cacat dengan memperhatikan aspek teknis bagi pengguna tersebut.
- 3) Lapangan upacara, yakni lapangan olahraga atau tempat upacara bagi instansi pemerintah provinsi dan kota.
- 4) Plaza atau pelataran yang dapat diakses oleh publik, seperti Pelataran Bahari (anjung Pantai Losari), Pelataran Toraja-Mandar, dan Pelataran Bugis-Makassar yang terletak di Kecamatan Wajo.
- 5) Ruang terbuka sebagai pembatas atau buffer yang menegaskan peralihan antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Contohnya adalah jalur pembatas sepanjang Pantai Losari di Kecamatan Wajo.
- 6) Pelataran parkir, termasuk halaman parkir, lahan parkir, dan bangunan parkir yang berada dalam wilayah kota. Ruang parkir ini diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatannya, baik pada bangunan publik maupun privat, dan dapat berada dalam kawasan yang sudah terbangun, kawasan yang belum terbangun, atau kawasan reklamasi.
- 7) Ruang terbuka non hijau di bawah jalan layang atau jembatan, seperti flyover Urip Sumoharjo yang berada di Kecamatan Panakkukang.
- 8) Kawasan ruang terbuka biru, yaitu permukaan sungai seperti Sungai Je'neberang, Sungai Tallo, dan Sungai Pampang, serta permukaan danau seperti Danau Universitas Hasanuddin di Kecamatan Tamalanrea dan Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala.

Pengelompokan ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis ruang terbuka non hijau di Kota Makassar dan memberikan pemahaman mengenai penggunaan dan fungsi masing-masing area tersebut.

#### **2.1.2.2.7. Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal**

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, sektor informal yang meliputi pedagang kaki lima diakui sebagai bagian penting yang perlu diperhatikan dan diarahkan dalam pengaturan ruang. Dalam kondisi yang ada saat ini, sekitar 80% pedagang kaki lima di kota ini berjualan di trotoar dan saluran drainase dengan jenis jualan yang bersifat tidak permanen sekitar 90%. Oleh karena itu, diperlukan arahan dalam penataan keberadaan sektor informal ini.

Secara garis besar, rencana peruntukan ruang bagi sektor informal dalam rencana tata ruang wilayah Kota Makassar berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang sektor informal adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kawasan kota yang sudah terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sektor informal sebesar 0 hingga 2% dari luas kawasan kota yang sudah terbangun. Kawasan yang sudah terbangun ini merujuk pada kawasan yang telah dibangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.
- 2) Untuk kawasan kota yang belum terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sektor informal sebesar 1 hingga 2,5% dari luas kawasan kota yang belum terbangun. Kawasan yang belum terbangun ini merujuk pada kawasan yang belum dibangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.
- 3) Untuk kawasan reklamasi, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sektor informal sebesar 2 hingga 3% dari luas kawasan reklamasi. Kawasan reklamasi ini merujuk pada kawasan reklamasi yang direncanakan sepanjang pesisir Kota Makassar.

Selanjutnya, rencana pemanfaatan ruang bagi sektor informal ini diperjelas dengan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan ruang, antara lain:

- Kawasan sektor informal dapat memanfaatkan luas maksimal 30% dari luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan klasifikasi pemanfaatan ruang.
- Kawasan sektor informal juga dapat memanfaatkan kawasan yang disediakan khusus serta beberapa ruas jalan tertentu sesuai dengan ketentuan yang lebih lanjut yang ditetapkan oleh Walikota. Dengan demikian, rencana ini memberikan gambaran mengenai alokasi ruang dan penggunaan ruang yang ditetapkan bagi sektor informal di Kota Makassar.

#### **2.1.2.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya**

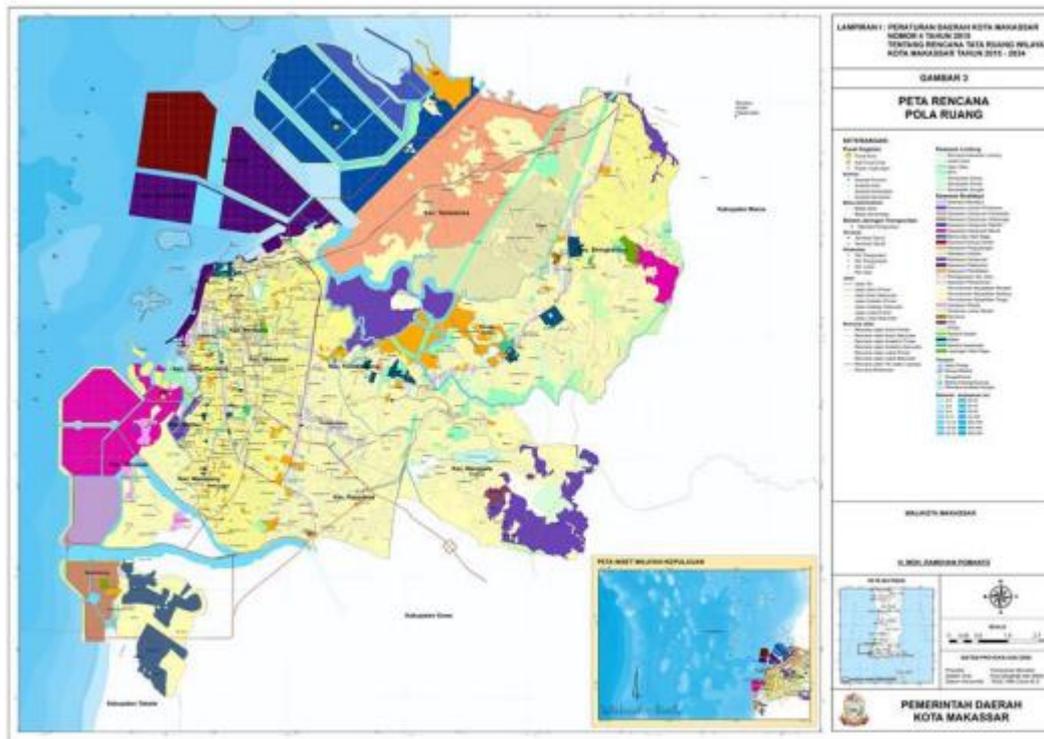
Kawasan peruntukan dalam wilayah Kota Makassar mencakup beberapa area mencakup:

- 1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara, termasuk:
  - Kawasan Markas Armada Tengah Indonesia di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo;
  - Kawasan Komando Daerah Militer VII Wirabuana di Kecamatan Panakkukang; ▪ Kantor Komando Rayon Militer 1408/BS Makassar di Kecamatan Mamajang;
  - Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Ujung Pandang; ▪ Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV di Kecamatan Ujung Tanah;
  - Kantor Komando Operasi Angkatan Udara II (KOOPSAU II) di Kecamatan Biringkanaya;

- Kantor Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Kecamatan Biringkanaya; Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya;
  - Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di Kecamatan Wajo; j. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
  - Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; ▪ Batalyon Infanteri (Yonif) 700 Raider di Kecamatan Tamalanrea; ▪ Batalyon Kavaleri 10 Serbu di Kecamatan Tamalanrea;
  - Batalyon Armed 6-76/TRK di Kecamatan Tamalate; ▪ Batalyon Yon Zipur 8/SMG di Kecamatan Mariso; dan
  - Kantor Bela Negara Walter Monginsidi di Kecamatan Mariso.
- 2) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan Tamalanrea dan Panakkukang.
  - 3) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional, dan internasional di Kecamatan Biringkanaya, Mariso, dan Tamalate.
  - 4) Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan, termasuk kawasan peruntukan kesehatan berstandar internasional di beberapa kecamatan, serta puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan.
  - 5) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi kawasan perikanan tangkap di wilayah perairan Selat Makassar, kawasan minapolitan untuk budidaya perikanan di sebagian wilayah Tamalanrea, Biringkanaya, dan Tallo, serta pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Biringkanaya.
  - 6) Kawasan peruntukan pertanian, termasuk kawasan pertanian tanaman pangan di sebagian wilayah Biringkanaya, dan kawasan usaha tanaman hias di koridor jalan lingkungan di seluruh wilayah kecamatan.
  - 7) Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya di sebagian wilayah Tamalate dan Mariso.
  - 8) Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi yang menyesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang dan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Kawasan peruntukan ruang reklamasi di beberapa kecamatan, yang merupakan hasil dari kegiatan reklamasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya, pada gambar 2.9 diilustrasikan secara mendetail pola ruang kota Makassar.

**Gambar 2.9 Pola Tata Ruang Kota Makassar**



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam mendukung struktur ruang yang telah direncanakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar menggunakan tiga tingkatan pusat pelayanan. Sistem perkotaan RTRW Kota Makassar secara struktur diklasifikasikan berdasarkan sistem pusat pelayanan yang mencakup:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK): PPK bertugas untuk memberikan pelayanan kepada seluruh wilayah kota dan/atau regional yang termasuk dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional. PPK berfungsi sebagai pusat pelayanan utama yang menyediakan layanan tingkat kota atau regional, seperti pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, stasiun kereta api, terminal bus, dan sejenisnya.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK): Sub PPK bertanggung jawab untuk melayani sub wilayah kota dalam rangka pelayanan internal wilayah. Sub PPK berperan sebagai pusat pelayanan tingkat menengah yang berada di bawah PPK. Fungsinya adalah menyediakan

fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh sub wilayah tertentu di dalam Kota Makassar. Contoh fasilitas yang ada di Sub PPK meliputi pusat kegiatan ekonomi, fasilitas pendidikan, dan pusat kegiatan masyarakat.

3. Pusat Lingkungan (PL): PL berperan dalam melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan tingkat terendah dalam hierarki pusat pelayanan. Fokus utama PL adalah menyediakan fasilitas dan layanan dasar untuk wilayah lingkungan tertentu di Kota Makassar. Contoh fasilitas yang terdapat di Pusat Lingkungan meliputi taman, pusat kegiatan sosial, pusat kegiatan olahraga, dan sejenisnya.

Dengan adanya tiga struktur pusat pelayanan ini, sistem perkotaan RTRW Kota Makassar dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah kota, mulai dari tingkat kota/regional hingga tingkat lingkungan. Hierarki ini membantu dalam perencanaan dan pengembangan ruang yang terkoordinasi dengan baik serta meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kota Makassar

#### **2.1.2.1. Pusat Pelayanan Kota (PPK)**

Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Makassar terdiri dari empat PPK yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam sistem perkotaan. Berikut ini dielaborasi mengenai keempat PPK sebagai berikut:

1. PPK I mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa. PPK I juga mencakup landmark kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian barat Kota Makassar. PPK I terletak di beberapa wilayah, termasuk Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar, Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang, serta kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, dan Ujung Pandang. Kawasan seperti Pecinan, Benteng Fort Rotterdam, dan Losari juga termasuk dalam PPK I.
2. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional. PPK II terletak di kawasan pengembangan pesisir bagian utara di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. PPK II juga mencakup pusat kegiatan yang mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.
3. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi di Kecamatan Panakkukang. Selain itu, PPK III juga merupakan pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional yang terletak di Kecamatan Panakkukang dan Tamalanrea. Kawasan ini juga menjadi pusat kegiatan industri dan pergudangan dengan

skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.

4. PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional, dan regional. PPK IV terletak di kawasan pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan Mariso. Selain itu, PPK IV juga mencakup pusat kegiatan bisnis di sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan Tamalate.

Dengan adanya pembagian PPK ini, sistem perkotaan Kota Makassar dapat terorganisir dengan baik, memungkinkan penyediaan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti pemerintahan, budaya, perdagangan, maritim, pendidikan, industri, dan bisnis.

#### **2.1.2.2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)**

Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Dalam wilayah Kota Makassar, terdapat sepuluh Sub PPK dengan fungsi dan fasilitas minimum sebagai berikut:

1. Sub PPK I: Terletak di Kawasan Daya yang meliputi sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan perdagangan.
2. Sub PPK II: Terletak di Kawasan Untia yang mencakup sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim.
3. Sub PPK III: Terletak di Kawasan Manggala yang meliputi Kecamatan Manggala. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi, serta kegiatan industri.
4. Sub PPK IV: Terletak di Kawasan Tallo yang mencakup Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi, pusat kegiatan industri, pusat pelayanan budaya, dan pusat kegiatan transportasi laut.

5. Sub PPK V: Terletak di Kawasan Panakkukang yang mencakup Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi.
6. Sub PPK VI: Terletak di Kawasan Losari yang mencakup Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan sosial budaya, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan transportasi laut.
7. Sub PPK VII: Terletak di Kawasan Sentral di Kecamatan Bontoala. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
8. Sub PPK VIII: Terletak di Kawasan Mattoanging yang mencakup Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan olahraga, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
9. Sub PPK IX: Terletak di Kawasan Barombong di Kecamatan Tamalate. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat pelayanan budaya, dan pusat pelayanan olahraga.
10. Sub PPK X: Terletak di Kawasan Sangkarrang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan pariwisata bahari.

Dengan adanya Sub PPK ini, diharapkan pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi dapat tersedia di sub wilayah kota secara lebih terorganisir, memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam bidang permukiman, peribadatan, bina sosial, olahraga/rekreasi skala kota, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/niaga, dan transportasi.

### **2.1.2.3. Pusat Lingkungan (PL)**

Pusat kegiatan lingkungan merupakan titik penghubung antara pusat kegiatan lokal. Zona ini berperan sebagai nodes dalam kawasan perkotaan lokal di sekitarnya, dengan radius pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem perkotaan untuk pusat lingkungan melibatkan kawasan fungsional yang memiliki peran penting dalam struktur ruang kota secara keseluruhan. Pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal yang terdiri dari pusat-

pusat pelayanan di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan, dengan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga/rekreasi, perdagangan dan jasa, bina sosial, dan transportasi. Penyebaran lokasi dan pengembangan pusat lingkungan diatur secara rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Sistem struktur ruang Kota Makassar dirancang berdasarkan berbagai faktor, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sistem transportasi nasional, sistem struktur Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Mamminasata, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan sistem perkotaan Kota Makassar. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Makassar 2015-2034 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana pengembangan dan distribusi ruang dalam kota.

### 2.1.3. Demografi

Dalam upaya pembangunan, penduduk memainkan peran yang sangat penting karena bukan hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi bagi kemajuan Kota Makassar jika dikelola dengan baik. Pertumbuhan jumlah penduduk Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Biringkanaya	214.432	220.456	209.048	210.076	21.288
2	Bontoala	57.009	57.197	54.996	55.102	55.239
3	Makassar	85.311	85.515	82.067	82.142	82.265
4	Mamajang	61.338	61.452	56.049	56.056	56.094
5	Manggala	145.873	149.487	146.724	147.549	148.462
6	Mariso	60.130	60.499	57.426	57.594	57.795
7	Panakkukang	149.121	149.664	139.590	139.635	139.759
8	Rappocini	168.345	170.121	144.587	144.619	144.733
9	Tallo	140.023	140.330	144.977	145.400	145.908
10	Tamalanrea	114.672	115.843	103.177	103.220	103.322
11	Tamalate	201.908	205.541	180.824	181.533	182.348
12	Ujung Pandang	28.883	29.054	24.526	24.526	24.541
13	Ujung Tanah	35.354	35.534	35.789	35.947	36.127
14	Wajo	31.297	31.453	29.972	30.033	30.110
15	Kepulauan Sangkarrang	14.458	14.531	14.125	14.187	14.258
<b>Jumlah</b>		<b>1508.154</b>	<b>1.526.677</b>	<b>1.423.877</b>	<b>1.427.619</b>	<b>1.432.189</b>

*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk mutasi penduduk seperti pindah datang dan pindah keluar, kematian, data baru, serta kelahiran. Pada tahun 2022, jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar tercatat di Kecamatan Tamalate dengan jumlah 182.348 jiwa, sementara jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah 14.258 jiwa. Dalam lima tahun terakhir, penduduk Kota Makassar mengalami penurunan dari 1.508.154 jiwa pada tahun 2016 menjadi 1.423.877 jiwa pada tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar -3,11%.

Penurunan jumlah penduduk Kota Makassar ini dapat disebabkan oleh konsolidasi data kependudukan, di mana dengan adanya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), data ganda tidak lagi diperbolehkan, sehingga data kependudukan yang tercatat merupakan data yang bersih. Proses pembersihan data ganda masih terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, penurunan jumlah penduduk juga dapat disebabkan oleh adanya data anomali, seperti kepala keluarga yang tidak jelas atau belum terdaftar secara elektronik, serta banyaknya penduduk usia 23 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman atau menjadi non-aktif sementara, bahkan ada yang data kependudukannya tercatat di daerah lain.

Selain informasi mengenai jumlah penduduk, data demografi juga mencakup informasi tentang penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Informasi mengenai penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk dapat ditemukan dalam tabel berikut ini.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang terjadi adalah terkait dengan penyebaran penduduk, apakah mereka terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu atau tersebar merata di seluruh wilayah. Idealnya, penyebaran dan kepadatan penduduk sulit ditentukan secara universal karena tergantung pada potensi wilayah dan kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi tersebut. Konsentrasi penduduk yang tinggi dapat menyebabkan risiko konflik sosial dan kesulitan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, konsentrasi penduduk yang rendah dapat memudahkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Makassar tercatat sebesar 1.432.189 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam distribusi penduduk di setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah, sehingga menghasilkan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2022 mencapai 8.148 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Makassar dengan jumlah 32.645 jiwa per kilometer

persegi, dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah 3.244 jiwa per kilometer persegi.

#### **2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat dalam konteks ini mencakup kesejahteraan ekonomi yang merata, kesejahteraan sosial, serta pengembangan seni, budaya, dan olahraga. Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, hal ini akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-faktor produksi dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Dampaknya akan terlihat dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

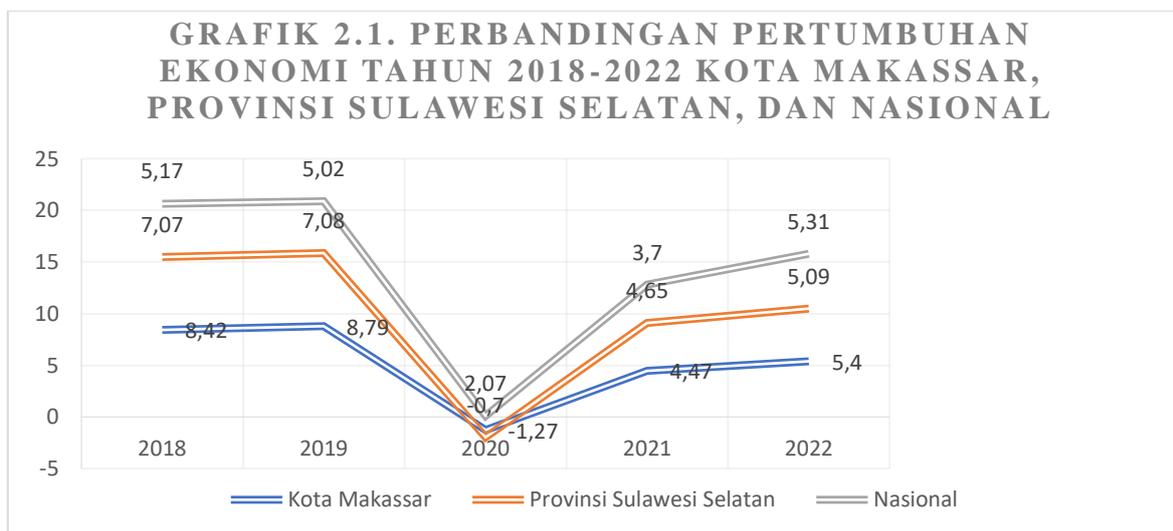
##### **2.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu dijaga dan diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti kualitas sumber daya manusia, modal, perubahan teknologi, kewirausahaan, infrastruktur yang tersedia, kebijakan pemerintah, dan stabilitas keamanan lingkungan.

Salah satu indikator kinerja ekonomi dan kemajuan Kota Makassar dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Dalam tiga tahun terakhir, Kota Makassar telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 4% per tahun pasca mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,27% pada tahun 2020 sebagai implikasi pandemic Covid-19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata hanya sekitar 3-5% per tahun, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang rata-rata sekitar 4-5% per tahun, Kota Makassar dapat dikategorikan sebagai salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,93% per tahun. Tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 0,93% dibandingkan dengan tahun 2021, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan kontraksi ekonomi sebesar -1,27%.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontruksim dan industry pengolahan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan *total output* atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB per kapita digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di daerah tersebut. PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yaitu satu tahun. Pendapatan dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan PDRB.

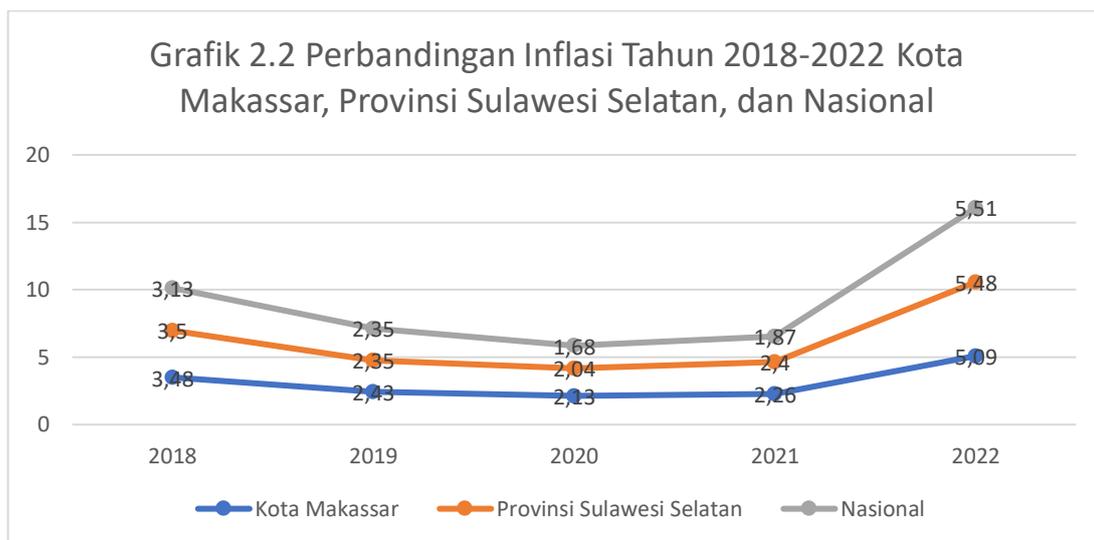
Terdapat dua jenis penilaian PDRB, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku Kota Makassar terus mengalami peningkatan secara konsisten dalam empat tahun terakhir, dari 160,21 triliun pada tahun 2018 menjadi 208,94 triliun pada tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,8% per tahun. Sementara itu, PDRB berdasarkan harga konstan meningkat dari 112,56 triliun pada tahun 2018 menjadi 133,60 triliun pada tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,52% per tahun.

Namun, pada tahun 2020, PDRB Kota Makassar mengalami penurunan, dengan PDRB atas dasar harga berlaku turun menjadi 178,33 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan menjadi 120,91 triliun. Data PDRB Kota Makassar dapat dilihat pada grafik yang disajikan. Grafik tersebut mencerminkan perubahan PDRB Kota Makassar selama periode waktu yang disebutkan, dengan peningkatan yang signifikan sebelum tahun 2020 dan penurunan pada tahun tersebut serta tren peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.

#### 2.1.4.2. Inflasi

Beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Kota Makassar mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambil kebijakan berhasil mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa. Puncak inflasi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat 5,09

persen, yang sebelumnya berada pada angka 2,26 persen pada tahun 2021, 2,13 persen pada tahun 2020, 2,43 persen pada tahun 2019, dan 3,48 persen pada tahun 2018.



*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

Berangkat dari grafik di atas, apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat inflasi nasional, inflasi di Kota Makassar menunjukkan tren yang hampir sama. Kenaikan harga barang di Kota Makassar juga tercermin dalam kenaikan harga barang secara nasional maupun provinsi. Jika kita mengambil rata-rata tingkat inflasi selama lima tahun terakhir, rata-rata inflasi di Kota Makassar adalah 3,07%, sedikit lebih rendah dari rata-rata inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan (3,15%) dan lebih tinggi dari rata-rata inflasi di tingkat inflasi nasional (2,91%).

**Tabel 2.8. Laju Rata-Rata Inflasi Tahun 2018-2022 Kota Makassar**

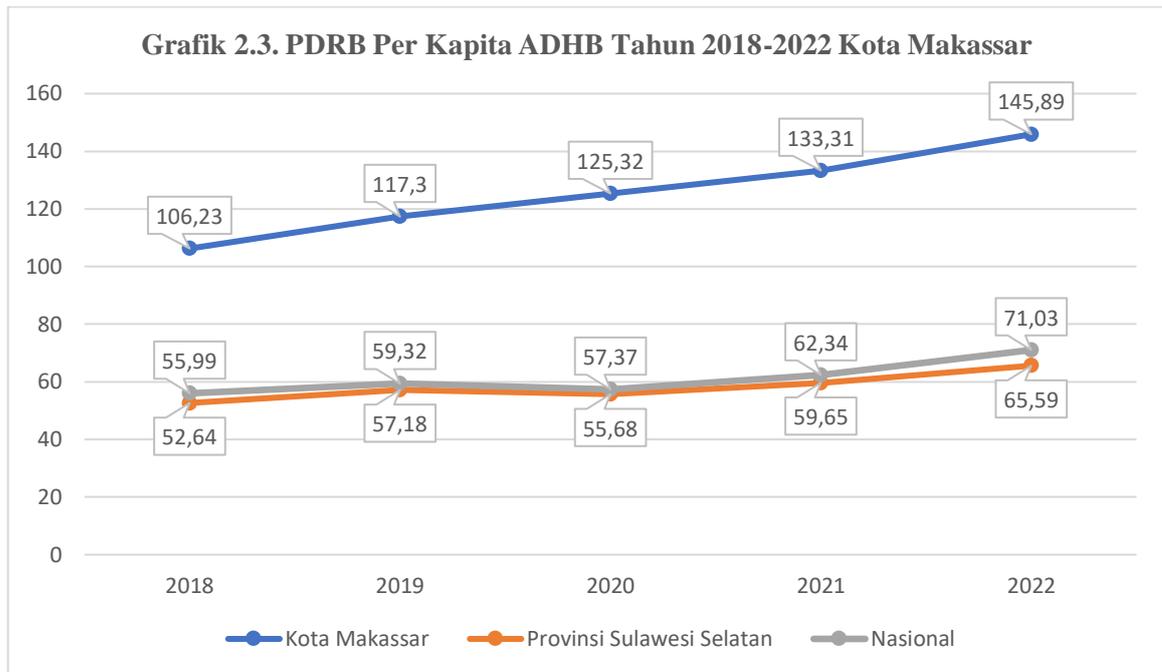
Tingkat Inflasi	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
2018	3,48	3,5	3,13
2019	2,43	2,35	2,35
2020	2,13	2,04	1,68
2021	2,26	2,4	1,87
2022	5,09	5,48	5,51

*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

#### 2.1.4.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dihitung dengan membagi total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Metode ini tidak mempertimbangkan distribusi pendapatan secara spesifik dalam kelompok pendapatan. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang ada di suatu daerah akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sementara itu, nilai PDRB secara

keseluruhan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang tersedia di daerah tersebut.



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

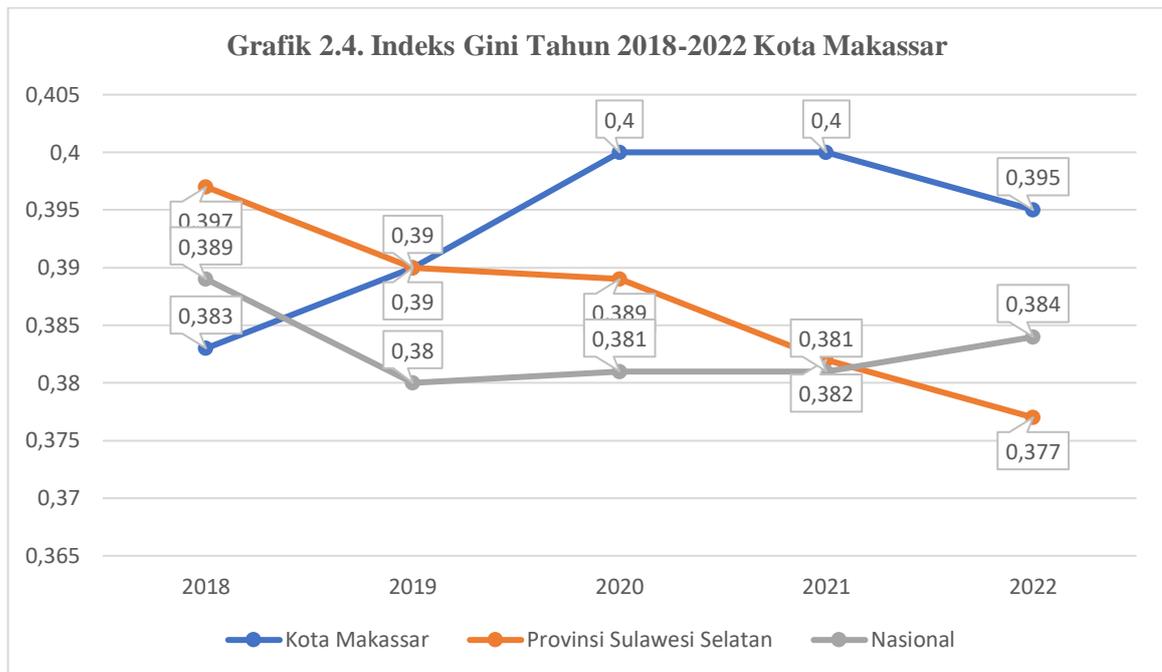
Pada tahun 2018, pendapatan per kapita Kota Makassar berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 106,23 juta per orang per tahun. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan pendapatan per kapita nasional yang masing-masing sebesar Rp.52,64 juta dan Rp. 55,99 juta. PDRB per kapita Kota Makassar juga terus mengalami peningkatan yang konsisten. Dalam empat tahun terakhir, pendapatan per kapita Kota Makassar naik dari Rp.106,23 juta pada tahun 2018 menjadi Rp.117,3 juta pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 konsisten meningkat menjadi Rp.125,32 juta meskipun dilakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar sebagai kebijakan penanganan pandemic Covid-19 dan mengalami peningkatan PDRB sebesar 133,31 pada tahun 2021 dan sebesar 145,89 pada tahun 2022.

#### 2.1.4.4. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di suatu daerah. Skala indeks Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, sedangkan semakin mendekati 1, tingkat ketimpangan pengeluaran semakin tinggi.

Selama lima tahun terakhir, indeks Gini Kota Makassar berada di atas angka indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan, namun fluktuatif jika dibandingkan dengan angka indeks Gini nasional. Pada tahun 2020, indeks Gini Kota Makassar mencapai 0,395, sedangkan Provinsi

Sulawesi Selatan memiliki indeks Gini sebesar 0,377, dan tingkat nasional sebesar 0,384. Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Makassar selama lima tahun terakhir masih dikategorikan sebagai moderat, berada dalam rentang 0,3 hingga 0,4.

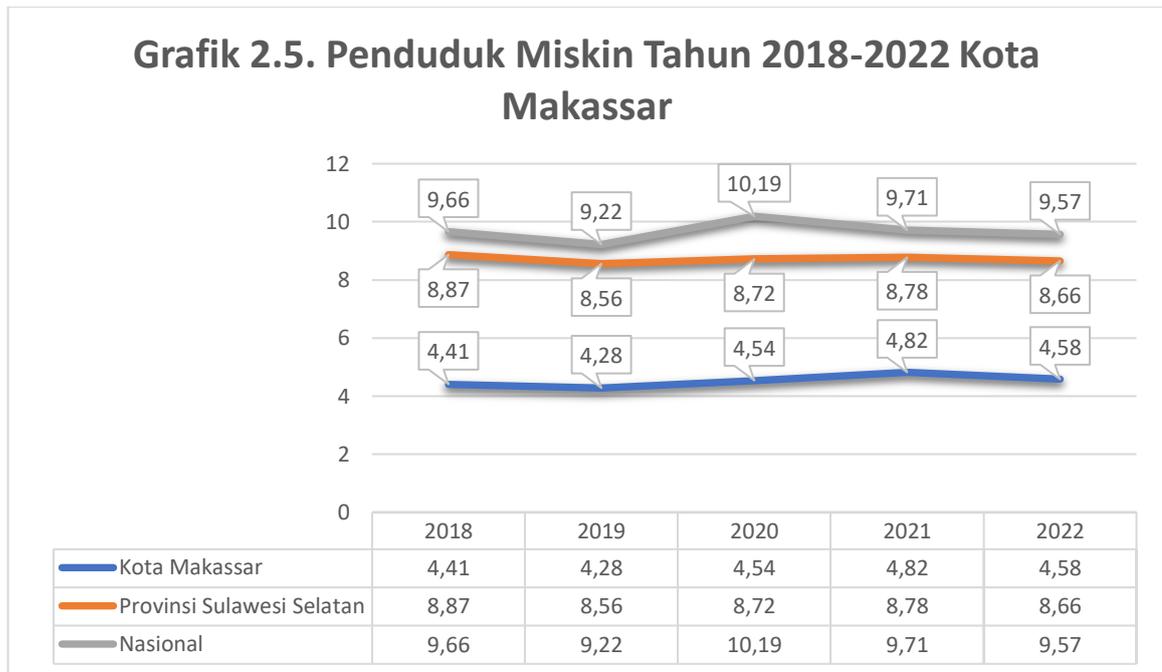


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

#### 2.1.4.5. Angka Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dalam hal makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimal yang digunakan untuk menentukan kemiskinan disebut "garis kemiskinan".

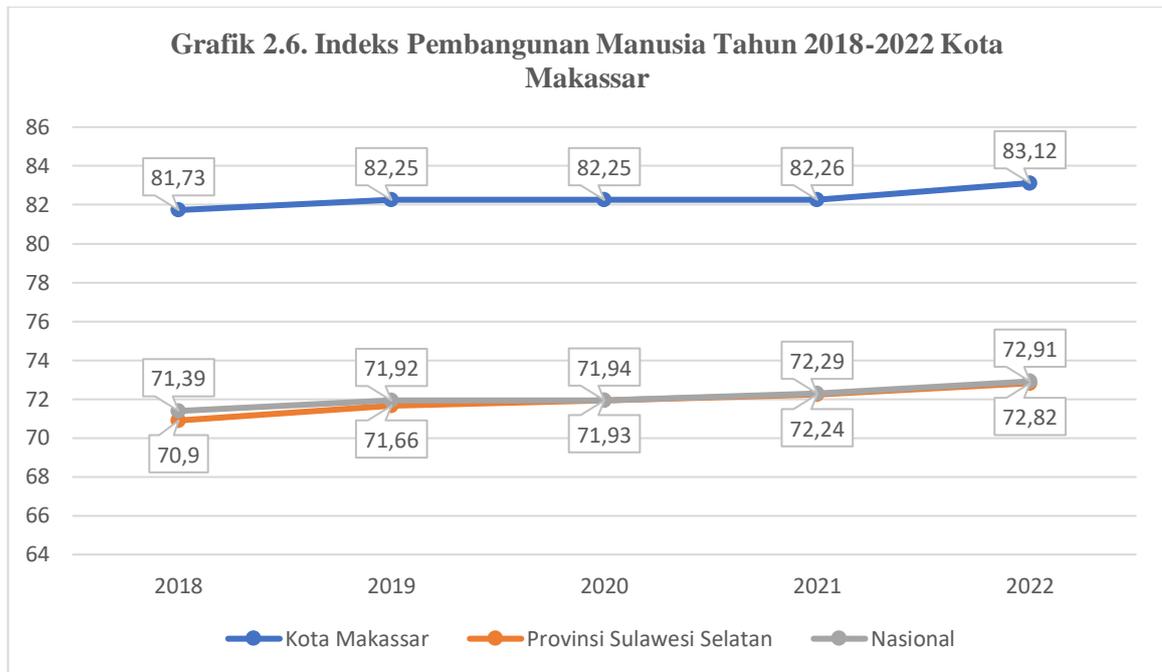
Pada tahun 2018, garis kemiskinan per kapita per bulan di Kota Makassar adalah Rp. 386.545, dan meningkat menjadi Rp. 418.831 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kota Makassar naik lagi menjadi Rp. 442.513 dan pada tahun 2021 menjadi Rp. 475.544 serta tahun 2022 sebesar Rp. 511.081. Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 65.120 jiwa, atau sekitar 4,28% dari total penduduk. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 8,56% dan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,22%.



*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

#### 2.1.4.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit yang dihitung dengan menggabungkan angka usia harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta indeks paritas daya beli (PPP). IPM digunakan sebagai indikator kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM juga digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah yang membantu dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

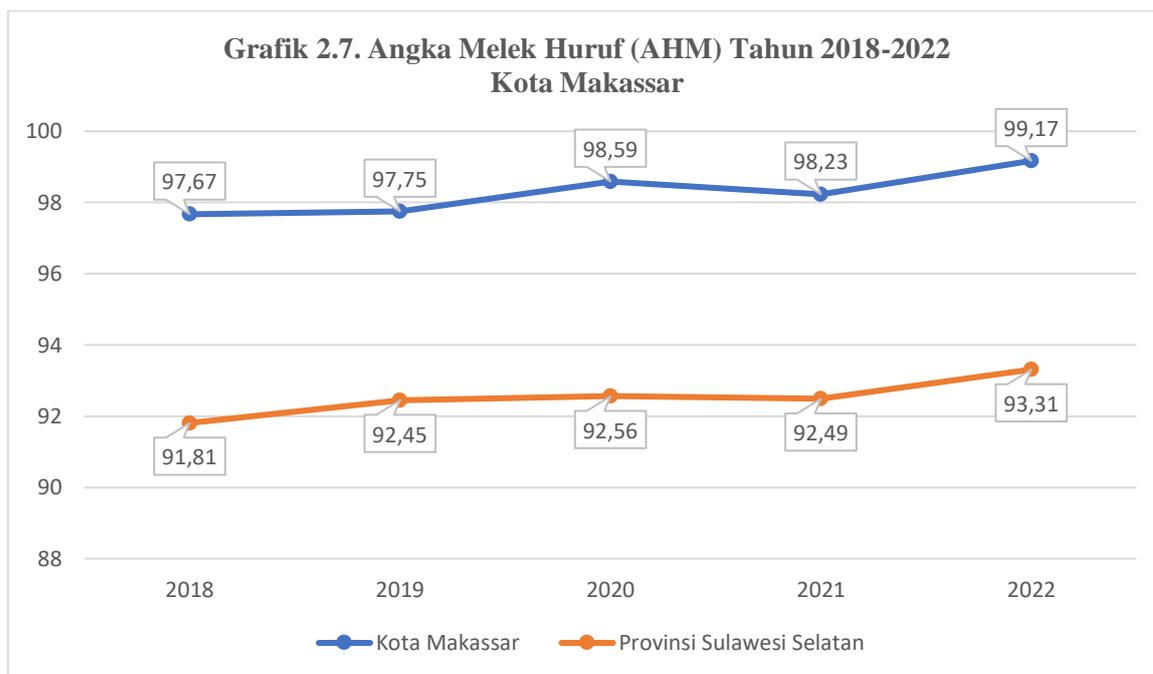
IPM Kota Makassar secara konsisten mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 2018 hingga 2022, dan mencapai angka 82,25 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, IPM Kota Makassar mengalami kenaikan menjadi, yaitu 83,12, atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (>80). IPM Kota Makassar juga lebih tinggi daripada rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM nasional yang masih berada pada angka 70. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat sangat penting untuk terus meningkatkan IPM suatu daerah.

#### 2.1.4.7. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf mencerminkan kualitas manusia secara umum, aksesibilitas, dan kondisi ekonomi suatu daerah. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kota Makassar menunjukkan angka 100%. Ini berarti semua penduduk Kota Makassar dalam kelompok usia tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin maupun huruf lainnya.

Angka melek huruf yang tinggi di Kota Makassar menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan telah berhasil memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan dalam menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Berikut ini adalah data angka melek

huruf Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:

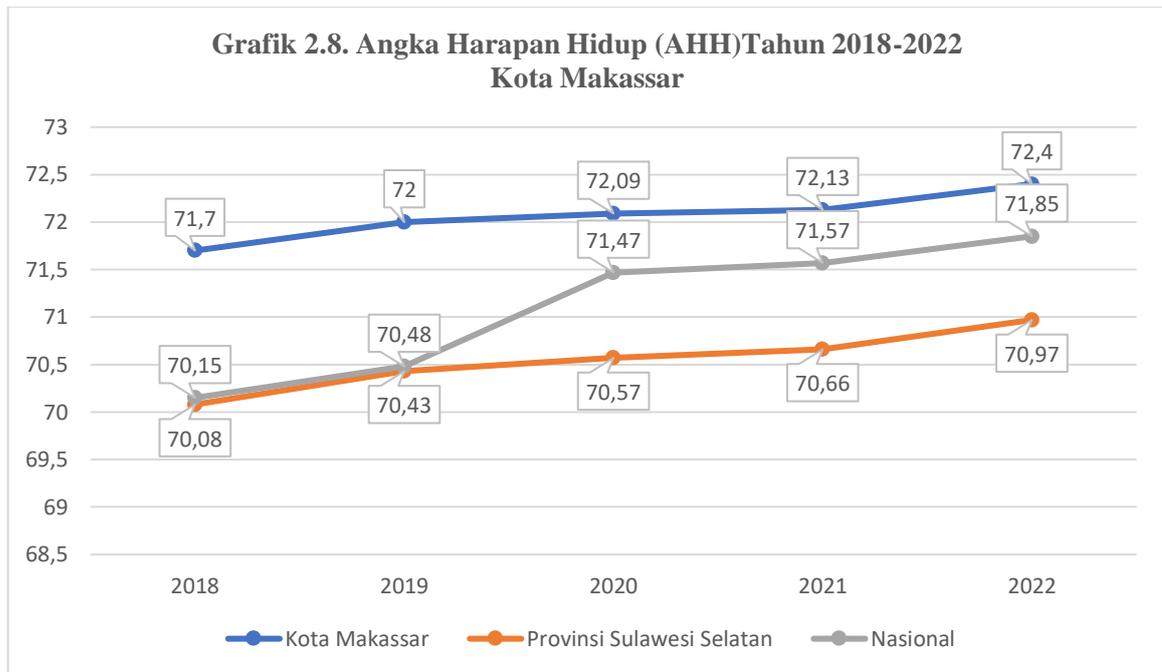


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

#### 2.1.4.8. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dapat digunakan sebagai penilaian terhadap status kesehatan penduduk. AHH digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum, serta meningkatkan tingkat kesehatan secara khusus. Jika angka harapan hidup rendah di suatu daerah, maka program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, seperti kesehatan lingkungan, gizi yang mencukupi, dan program penanggulangan kemiskinan, harus diperhatikan.

Data menunjukkan bahwa AHH di Kota Makassar telah mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, AHH sebesar 71,49% meningkat menjadi 72,09% pada tahun 2020. AHH Kota Makassar secara konsisten selalu berada di atas AHH Provinsi Sulawesi Selatan dan AHH Nasional. Pola hidup masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian target usia harapan hidup yang ditetapkan sebesar 74,63% pada tahun 2015. Informasi mengenai Angka Harapan Hidup Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

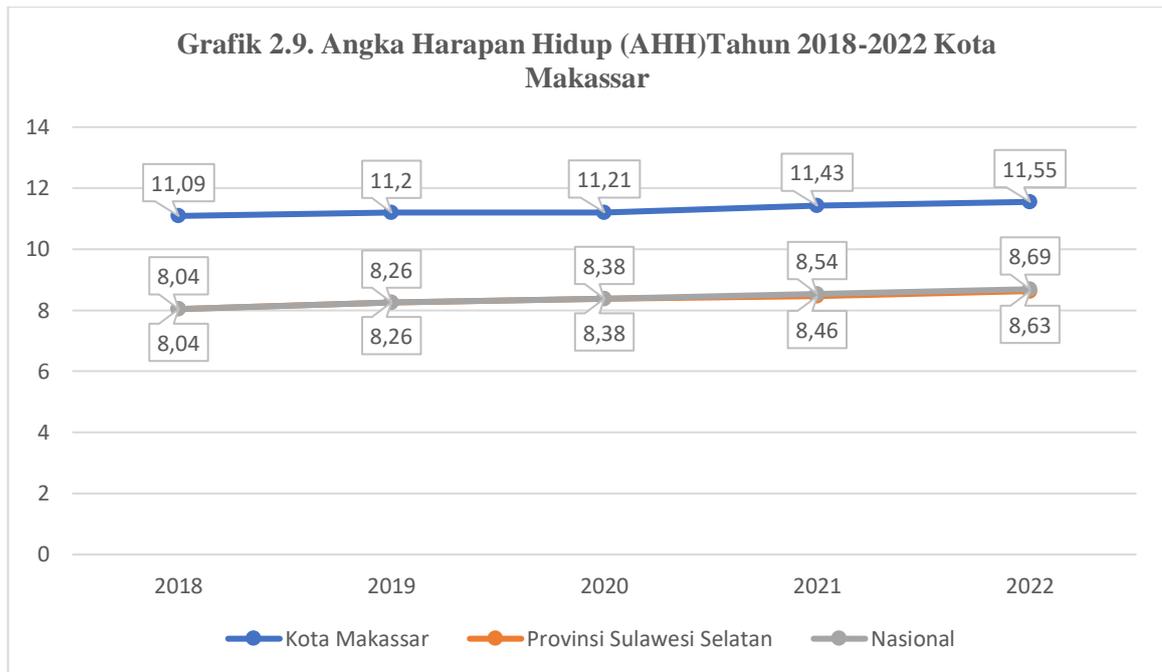


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

#### 2.1.4.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan langkah-langkah seperti mengurangi angka putus sekolah dan mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke lingkungan pendidikan, serta meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Makassar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sebesar 0,01%. Pada tahun 2016, angka rata-rata lama sekolah di Kota Makassar adalah 11,07% dan meningkat menjadi 11,21% pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir secara konsisten berada di atas rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Informasi mengenai angka rata-rata lama sekolah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional disajikan dalam tabel berikut ini:



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

#### 2.1.4.10. Status Gizi Balita

Status gizi balita adalah salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi yang cukup pada balita sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jika gizi tidak terpenuhi dengan baik pada anak-anak, hal ini dapat menghambat sintesis protein DNA yang berdampak pada pembentukan sel otak dan perkembangan otak yang terhambat.

Indeks Berat Badan (Body Mass Index/BMI) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai status gizi balita. Pengukuran antropometri seperti berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) digunakan untuk memperoleh nilai BMI, yang kemudian dibandingkan dengan umur balita. Salah satu penggunaan yang umum adalah Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Hasil perhitungan BMI dikategorikan menjadi empat kelompok: gizi lebih (z-score  $> +2$  SD), gizi baik (z-score antara  $-2$  SD hingga  $+2$  SD), gizi kurang (z-score antara  $-2$  SD hingga  $-3$  SD), dan gizi buruk (z-score  $< -3$  SD).

Pentingnya gizi pada balita adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kurangnya asupan gizi yang cukup dapat menghambat sintesis protein DNA, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembentukan sel otak dan perkembangan otak.

**Table 2.9. Status Gizi Balita Kota Makassar Tahun 2018-2022**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah Balita Gizi Kurang</b>	6.781	5.516	5.811	394	490
<b>Jumlah Balita</b>	99.963	82.655	90.129	26.953	26.636
<b>Persentase Balita Gizi Kurang</b>	6,78	6,67	6,45	-	-

*Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2022.*

Berdasarkan data dalam Tabel 2.9, terlihat bahwa prevalensi balita dengan gizi buruk di Kota Makassar telah mengalami penurunan setiap tahun selama lima tahun terakhir. Penurunan ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, di antaranya adalah intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan dalam deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan, serta edukasi yang rutin dan berkala bagi petugas terkait.

Intervensi PMT, yang melibatkan pemberian makanan tambahan kepada balita dengan status gizi buruk, telah berkontribusi dalam menangani masalah gizi buruk di Kota Makassar. Selain itu, peningkatan dalam deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan memungkinkan identifikasi lebih awal terhadap balita yang berisiko mengalami gizi buruk. Hal ini memungkinkan tindakan yang tepat dapat diambil lebih awal untuk mencegah atau mengobati gizi buruk.

Edukasi yang diberikan secara rutin dan berkala kepada petugas yang terkait dengan kesehatan dan gizi juga memainkan peran penting dalam penurunan prevalensi gizi buruk. Pengetahuan yang ditingkatkan dan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda gizi buruk serta praktik gizi yang baik dapat membantu petugas dalam memberikan perawatan dan intervensi yang tepat kepada balita.

Dengan adanya intervensi PMT, deteksi dini yang lebih baik, dan edukasi yang rutin bagi petugas, prevalensi balita dengan gizi buruk di Kota Makassar telah mengalami penurunan yang positif selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam penanganan masalah gizi buruk dan perbaikan status gizi balita di Kota Makassar.

#### **2.1.4.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari pada suatu periode survei. TPAK mencakup penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja, dan pengangguran.

**Tabel 2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar Tahun 2018-2022**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</b>	671.044	661.226	725.529	729.635	729.635
<b>Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 – 64 Tahun)</b>	1.102.682	1.085.328	1.124.922	1.215.200	1.230.996
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	58,86	60,92	58,05	59,70	59,27

*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

Pada tahun 2020, TPAK di Kota Makassar mencapai 61,89 persen. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 1.124.922 jiwa (usia 15-64 tahun), sebanyak 725.529 jiwa merupakan penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Jika dilihat dari perkembangan TPAK selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan sebesar 3,78 persen. Pada tahun 2018, TPAK tercatat sebesar 58,86 persen, dan meningkat menjadi 59,27 persen pada tahun 2022.

Perbaikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan keterlibatan penduduk dalam kegiatan kerja di Kota Makassar selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat menggambarkan perkembangan ketenagakerjaan dan upaya untuk mendorong partisipasi angkatan kerja di kota tersebut.

#### **2.1.4.12. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Karena Makassar merupakan ibukota provinsi dan salah satu kota yang berkembang di Kawasan Timur Indonesia, hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Banyak orang yang datang ke Kota Makassar dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik, meskipun mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar berupaya membuka peluang usaha, memberikan kemudahan berusaha, dan memberikan pendampingan bagi UMKM dan wirausaha pemula sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Salah satu faktor rendahnya daya serap tenaga kerja di Kota Makassar adalah struktur perekonomian yang terfokus pada sektor jasa (tersier). Sektor ini cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah jika dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kota Makassar. Meskipun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran tidak selalu linier, namun pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap

penurunan tingkat pengangguran di Kota Makassar. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, angka pengangguran cenderung meningkat.

**Tabel 2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja</b>	81.823	68.709	110.833	95.596	86.267
<b>Jumlah Penduduk Angkatan Kerja</b>	671.044	661.226	696.158	725.529	729.635
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	12,19	10.39	15,92	13.18	11.82

*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, persentase angkatan kerja yang bekerja di Kota Makassar mencapai sebanyak 671.044 orang. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor perdagangan dengan persentase 35,59 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan hanya menyerap 9,52 persen tenaga kerja. Padahal, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan menjadi faktor yang menjelaskan mengapa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Makassar relatif tinggi. Pada tahun 2018, jumlah pengangguran mencapai 81.823 orang atau sekitar 12,19 persen dari total angkatan kerja. Jumlah pengangguran ini mengalami penurunan pada tahun 2019 di mana jumlah pengangguran mencapai 68.709 orang atau sekitar 10,39 persen dari total angkatan kerja. Namun, penurunan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2020 memberikan tekanan pada tingkat pengangguran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan dalam kisaran 9,0% hingga 10,0% per tahun.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha sebagai dampak langsung dari pandemi. Keadaan ini terjadi secara luas di seluruh negeri, termasuk di Kota Makassar. Data TPT Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki tingkat TPT yang tertinggi di wilayah tersebut, jauh melebihi 23 Kabupaten/Kota lainnya. Berdasarkan grafik, tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai 15,92 persen,

lebih tinggi daripada tingkat TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 persen dan tingkat TPT nasional sebesar 7,07 persen.

#### 2.1.4.13. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah ukuran jumlah dan persentase penduduk yang bekerja di Kota Makassar. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja, semakin tinggi tingkat penyerapan lapangan kerja terhadap angkatan kerja di daerah tersebut. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk yang bekerja di Kota Makassar mengalami fluktuasi antara 84% hingga 89% setiap tahunnya. Pada tahun 2018, rasio penduduk yang bekerja di Kota Makassar mencapai 87,81%, meningkat menjadi 89,61% pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan menjadi 84,08% pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 86,82% pada tahun 2021.

**Tabel 2.12. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Penduduk Yang Bekerja</b>	589.221	592.517	585.325	629.933	643.368
<b>Angkatan kerja</b>	671.044	661.226	696.158	725.529	729.635
<b>Rasio Penduduk Yang Bekerja</b>	87.81	89.61	84.08	86.82	88.17

*Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.*

Pada tahun 2022, sebanyak 643.368 penduduk Kota Makassar bekerja dari total 729.635 penduduk angkatan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 88,17% dari angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan, sementara sisanya masih mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Data mengenai rasio penduduk yang bekerja di Kota Makassar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel yang disajikan.

#### 2.1.4.14. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM, atau Indeks Kepuasan Masyarakat, merupakan kumpulan data dan informasi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Data ini diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapat masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Survei IKM bertujuan untuk memahami tingkat kinerja unit pelayanan secara rutin, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

**Tabel 2.13. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	77.47	77.74	77.66	78,96	80,47

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,3. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar memberikan apresiasi yang lebih rendah terhadap pelayanan publik pada tahun tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik, karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

#### 2.1.4.15. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat tergantung pada kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan terbesar daerah. Dengan peningkatan kontribusi PAD, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai kegiatan-kegiatannya. Tingkat kemandirian keuangan daerah ini dapat dilihat melalui kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat. Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar.

**Tabel 2.14. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	1.185.453.010.990	1.303.316.337.554	1.116.813.266.836	1.139.438.031.610	1.387.904.746.600
<b>Pendapatan Daerah</b>	3.428.479.729.163	3.666.359.990.155	3.362.146.992.169	3.284.342.522.200	3.587.333.925.540
<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>	34,58%	35,55%	33,22%	34,69%	38,68%

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2022.

## **B. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar**

### **2.2. Kemampuan Melakukan Kajian Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)**

Karakteristik kebijakan yang berkualitas mempunyai kekhasan tersendiri, seperti sifatnya lebih aplikatif, dan terukur serta disusun dengan berbasis ilmu pengetahuan (*Evidence Based Policy*) yang bersifat terkini, relevan, komprehensif dan valid melalui proses penyelidikan keilmiah yang lebih mendalam dan menyeluruh serta menempatkan aktifitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (LITBANGJIRAP) yang diselenggarakan oleh lembaga/badan pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, bukti-bukti keilmiah tersebut akan menjadi landasan atau acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan guna penuntasan problematika pembangunan tersebut serta kebijakan tersebut akan lebih mempunyai kekhasan tersendiri.

Aktivitas Litbangjirap seyogyanya linear dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata, data dan informasi yang relevan dan mendukung sistem pengambilan kebijakan yang berbasiskan pengetahuan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar sebagai *the best role model* penerapan konsep *smart city*, mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasiskan riset, menghasilkan riset-riset berdampak yang dapat menstimulus lahirnya terobosan-terobosan baru dan inovasi pada tataran perangkat daerah dan masyarakat guna pemajuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan hasil riset bagi masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, Balitbangda Kota Makassar dibentuk sebagai perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Litbang. Berhubung fungsi Litbang ini terkait dengan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, maka kegiatan Litbang yang dihasilkan digolongkan dalam kelibangan kebijakan.

Kegiatan Litbang utama yang diselenggarakan oleh Balitbangda terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan. Selain Litbang utama, Balitbangda Kota Makassar juga menyelenggarakan Litbang penunjang diantaranya adalah fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi; dan edukasi.

Sebagai bahan acuan penyelenggaraan Litbang di Balitbangda Kota Makassar, Balitbangda Kota Makassar menyusun pedoman kegiatan Litbang. Sedangkan sebagai

acuan rencana kerja Litbang, Balitbangda Kota Makassar menyusun Rencana Induk Litbang (Rinduk Litbang) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan. Namun demikian, pedoman penyelenggaraan kelitbangan yang ada tidak menjadi pedoman umum yang dipakai oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Balitbangda Kota Makassar dalam penyelenggaraan Litbang didukung oleh Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Litbang. Tim Litbang adalah tim teknis yang terdiri dari unsur penunjang dan unsur pelaksana. Secara teknis penyelenggaraan Litbang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan kerjasama.

Sejak pertama kali didirikan sampai dengan sekarang sudah banyak hasil Litbang dikeluarkan oleh Balitbangda Kota Makassar. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah masih sedikitnya hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam kebijakan pemerintah Kota Makassar. Tidak rekomendatif sering sekali muncul sebagai alasan utama minimnya pemanfaatan hasil Litbang. Perangkat daerah Kota Makassar sebagai pengguna utama hasil kelitbangan merasa rekomendasi Litbang yang dihasilkan Balitbangda Kota Makassar belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena hasilnya belum tepat sasaran, sering telat pendistribusian dan kualitasnya kurang teruji.

Minimnya pemanfaatan hasil Litbang mendiskreditkan Balitbangda Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang berkinerja “KURANG BAIK” sehingga muncul istilah “sulit berkembang”. Permasalahan pada tidak rekomendatifnya hasil kelitbangan tidak saja memunculkan berbagai istilah negatif bagi Balitbangda Kota Makassar namun juga berdampak ego sektoral dan akhirnya perangkat daerah lainnya pun berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Litbang secara mandiri.

Apabila di cermati lebih jauh sebenarnya permasalahan yang muncul di akibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah masalah klasik dukungan anggaran yang minim, sumberdaya manusia yang masih terbatas, baik dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan uraian di atas terkait kelembagaan dan penyelenggaraan Litbang yang dilaksanakan Balitbangda Kota Makassar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijadikan landasan empiris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Balitbangda Kota Makassar belum dapat merespon kebutuhan perangkat daerah lainnya di Lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan landasan ilmiah yang dibutuhkan atas lahirnya kebijakan. Meskipun selama ini penentuan kegiatan Litbang yang dilaksanakan Balitbangda Kota Makassar merupakan asil

usulan dari perangkat daerah lain, namun dalam penentuan judul sering kali kurang tepat, judul kegiatan Litbang sering kali melenceng dari usulan dan keinginan/kebutuhan pengusul sehingga terkesan muncul judul baru yang tidak sesuai kebutuhan perangkat daerah pengusul. Dengan tidak terpenuhinya keinginan perangkat daerah tersebut mengakibatkan kepercayaan terhadap Balitbangda Kota Makassar menurun dan akhirnya mereka (Perangkat Daerah) berinisiatif menyelenggarakan Litbang sendiri.

- 2) Hasil Litbang kurang tepat dalam menemukan sasaran yang tepat, banyak kegiatan tidak difokuskan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Makassar melainkan justru menunjang kebutuhan pemerintah Kota Makassar dan bahkan sering kali menysasar ruang hampa. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakcermatan azas bagi habis urusan pemerintahan yang dimuat dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan daerah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Penyelenggaraan Litbang tidak berkesinambungan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya keinginan dari pihak internal Balitbangda Kota Makassar yang berbeda-beda dan tidak memperhatikan penyelenggaraan Litbang sebagai sebuah sistem Litbang kebijakan. Kegiatan Litbang bersifat parsial dalam bentuk penggalan-penggalan kegiatan yang terpisah dan tidak saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan belum tersusunnya Rencana Induk (Rinduk) Litbang sehingga penyelenggaraan Litbang di Balitbangda Kota Makassar selalu berubah-ubah tiap tahunnya.
- 4) Hasil Litbang menjadi kurang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia penyelenggara fungsi Litbang sejak tahun 2017 Tim Pengendali Mutu (TPM) yang bertugas mengawal kualitas hasil Litbang belum terbentuk, sehingga kualitas hasil Litbang belum terjamin karena pengendali kualitas hasil Litbang hanya dinilai oleh narasumber/reviewer yang disesuaikan latar belakang pendidikan sesuai topik penelitian.



		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik	PAUD= 72%	PAUD= 74%	PAUD= 76%	PAUD= 78%	PAUD= 80%	PAUD= 80%		
			SD= 72%	SD= 74%	SD= 76%	SD= 78%	SD= 80%	SD= 94%		
			SMP= 87%	SMP= 89%	SMP= 91%	SMP= 92%	SMP= 94%	SMP= 87%		
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan (A,B,C)	88.26%	90.26%	92.26%	94.26%	96.26%	96.26%		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 1:21	PAUD= 1:20	PAUD= 1:19	PAUD= 1:18	PAUD= 1:16	PAUD= 1:16		
			SD= 1:40	SD= 1:36	SD= 1:33	SD= 1:30	SD= 1:28	SD= 1:28		
			SMP= 1:34	SMP= 1:34	SMP= 1:33	SMP= 1:32	SMP= 1:32	SMP= 1:30		
			Persentase Guru yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 36.49%	PAUD= 37.49%	PAUD= 38.49%	PAUD= 39.49%	PAUD= 40.5%	PAUD= 40.5%	
				SD= 42.18%	SD= 43.83%	SD= 45.83%	SD= 47.83%	SD= 50%	SD= 50%	
				SMP= 45.43%	SMP= 46.23%	SMP= 47.03%	SMP= 47.88%	SMP= 48.73%	SMP= 48.73%	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Angka Budaya Baca Kota Makassar	50%	55%	60%	65%	70%	70%		
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertama	500.000 orang/tahun	520.000 orang/tahun	540.00 orang/tahun	560.000 orang/tahun	580.000 orang/tahun	580.000 orang/tahun		
		Jumlah Koleksi Judul Yang	27.712	29.212	30.712	32.212	33.712	33.712		





		Dan Pelayanan Publik di Kecamatan							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

### 2.3. Penentuan Tema Prioritas

Penentuan tema prioritas rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek Kota Makassar cluster sosial pemerintahan disusun dengan berlandaskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 guna akselerasi pencapaian target setiap programnya dan isu-isu strategis kota Makassar yang relevan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Secara eksplisit tema prioritas riset termaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Tema Prioritas Riset Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Tata Kelola Pemerintahan**

<b>Tema</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Program/Kegiatan/ Tema Prioritas</b>	<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>Perangkat Daerah Terkait</b>
<b>Bidang Pendidikan</b>				
Strategi Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Tersedianya rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di kota Makassar	Pemerataan Akses dan kualitas sarana prasarana pendidikan	2024-2029	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
		Evaluasi tingkat kepuasan pelayanan infrastruktur dan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan	2024-2029	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
		Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak	2024-2029	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
		Optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendidikan untuk aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi semua anak	2024-2029	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
		Evaluasi aksesibilitas pendidikan berbasis kolaboratif government	2024-2029	Dinas Pendidikan

		Tata kelola pendidikan dan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	2024-2029	Dinas Pendidikan
		Transformasi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkualitas	2024-2029	Dinas Pendidikan, BKPSDMD, Bagian Ortala Setda Kota Makassar
		Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas untuk transformasi pendidikan	2024-2029	Dinas Pendidikan, BKPSDMD, Bagian Ortala Setda Kota Makassar
		Evaluasi kebijakan “Semua Harus Sekolah” dalam peningkatan kualitas pendidikan secara inklusif dan merata	2024-2029	Dinas Pendidikan
		Evaluasi kebijakan Program Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi” dalam meningkatkan akses dan prestasi siswa	2024-2029	Dinas Pendidikan
		Evaluasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar di bidang Pendidikan	2024-2029	Dinas Pendidikan
<b>Tata Kelola Pemerintahan</b>				
Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere" dan "Smart" dan peningkatan	Tersedianya rekomendasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Analisis Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2024-2029	Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Seluruh

kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Yang Bersih dan Efektif			Kecamatan dan Kelurahan
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan publik	2024-2029	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Analisis Pengelolaan Sistem Manajemen SDM untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi	2024-2029	
		Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan	2024-2029	
		Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kepuasan Masyarakat	2024-2029	
		Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Publik	2024-2029	
		Peningkatan Kapabilitas SDM dan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi dan	2024-2029	

		Transparansi Administrasi Publik		
		Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	2024-2029	
		Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah dalam Memberikan Dividen kepada Pemerintah Kota Makassar	2024-2029	
		Analisis Kompetensi Asesor Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Makassar	2024-2029	
		Analisis Terbatasnya Kemampuan Aparatur dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi	2024-2029	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Mendorong Rasio Pasangan Berakta Nikah dan Mengelola Perpindahan Penduduk yang Masuk ke Wilayah Kota Makassar.	2024-2029	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2024-2029	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam	2024-2029	

		Pemerintahan Lokal untuk Meningkatkan Kinerja RT/RW, Fungsi Penasehat Walikota, dan Peran Local Influencer		
		Evaluasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar di Pemerintahan	2024-2029	
<b>Bidang Kesehatan</b>				
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Tersedianya rekomendasi untuk peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan perlindungan masyarakat miskin	Mengurangi Potensi Penyebaran Covid-19 melalui Implementasi Strategi Pengendalian Infeksi, Peningkatan Kesadaran Masyarakat, dan Penyediaan Sumber Daya Kesehatan yang Memadai	2024-2029	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan
		Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Maternal	2024-2029	
		Meningkatkan Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita yang Dilayani melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Layanan Posyandu	2024-2029	
		Meningkatkan Cakupan Pelayanan Terhadap Balita Penderita Pneumonia melalui Penguatan Sistem Pemeriksaan Dini, Diagnosa yang	2024-2029	

		Cepat, dan Intervensi yang Tepat	
		Meningkatkan Penanganan Penderita Penyakit Tuberkulosis BTA melalui Penguatan Sistem Deteksi Dini, Diagnosa Akurat, dan Akses Terhadap Pengobatan yang Efektif	2024-2029
		Meningkatkan Tingkat Kesintasan Pasien Tuberkulosis melalui Pendekatan Holistik dalam Pengobatan dan Perawatan	2024-2029
		Meningkatkan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas melalui Pendekatan Multidisiplin dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2024-2029
		Pemetaan dan Peningkatan Rasio Tenaga Medis untuk Mengatasi Penurunan Ketersediaan Tenaga Kesehatan	2024-2029
		Penanggulangan Meningkatnya Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang: Pendekatan Multidisiplin untuk Pencegahan, Intervensi, dan Rehabilitasi	2024-2029

		Meningkatkan Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB): Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Strategi Peningkatan Partisipasi	2024-2029	
		Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Layanan Kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber-Keluarga Berencana (KB) namun Tidak Terlayani: Analisis Hambatan dan Strategi Peningkatan Pelayanan	2024-2029	
		Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Keluarga Berencana (KB) untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Terlayani: Strategi Inovatif dalam Meningkatkan Pelayanan dan Kesadaran Masyarakat	2024-2029	
		Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dalam Program Keluarga Berencana (KB): Identifikasi Hambatan dan Pengembangan	2024-2029	

		Strategi Peningkatan Awareness dan Aksesibilitas	
		Peningkatan Ketersediaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan: Analisis Tantangan dan Strategi Perluasan Jaringan Pelayanan Keluarga Sejahtera	2024-2029
		Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran tentang Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja: Analisis Keberlanjutan dan Peningkatan Ketersediaan Data Jumlah Kasus IMS pada Remaja	2024-2029
		Meningkatkan Pemahaman dan Pelaksanaan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Strategi Peningkatan Kesadaran dan Praktik Keluarga	2024-2029
		Meningkatkan Imunitas Kesehatan: Pendekatan Multidisiplin dalam Peningkatan Kesadaran,	2024-2029

		Pengetahuan, dan Praktik Kesehatan Masyarakat	
		Analisis Efektivitas Gerakan 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak) dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	2024-2029
		Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat: Pendekatan Holistik dan Strategi Inovatif untuk Pemulihan Pasca-Krisis	2024-2029
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial: Pendekatan Terintegrasi dalam Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Komunitas	2024-2029
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Identifikasi Faktor-Faktor Penentu dan Strategi Inovatif dalam Meningkatkan	2024-2029

		Kualitas Layanan Kesehatan		
		Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat Perkuatan Imunitas (Makassar Recover) dan Peningkatan Kapasitas serta Pemerataan Tenaga Medis: Analisis Dampak, Tantangan, dan Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	2024-2029	
		Evaluasi Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Protokol Kesehatan yang Ketat: Analisis Implementasi, Dampak, dan Strategi Peningkatan Keberlanjutan Penanganan Pandemi	2024-2029	
		Pemulihan Kesehatan dan Pemantapan Imunitas Pasca Pandemi Covid-19: Strategi Optimalisasi Kesehatan dan Kualitas Hidup dalam Era Pasca-Pandemi	2024-2029	
		Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah: Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Akses,	2024-2029	

		Keberlanjutan, dan Kepuasan Pasien		
		Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Medis dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat: Strategi Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Kesehatan yang Berkualitas dan Proporsional	2024-2029	
		Penguatan Imunitas Kesehatan dan Ekonomi melalui Gerakan Masyarakat: Pendekatan Multidisiplin untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Komunitas	2024-2029	
		Optimalisasi Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	2024-2029	

*Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023*

Isu-isu strategis yang relevan dengan bidang sosial dan kemasyarakatan perlu diakomodir dalam program prioritas riset di bidang sosial dan kemasyarakatan. Isu pokok tersebut adalah permasalahan terkait dengan upaya peningkatan kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua yang secara detail dapat dilihat pada tabel 2.17.

**Tabel 2.17 Tema Prioritas Riset Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kebudayaan**

<b>Tema</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Program/Kegiatan/Tema Prioritas</b>	<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>Perangkat Daerah Terkait</b>
<b>Sosial Kemasyarakatan</b>				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Strategi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya merekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	Optimalisasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer	2024-2029	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Seluruh Kecamatan
		Meningkatkan Keimanan Umat untuk Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dalam Masyarakat Modern	2024-2029	
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	2024-2029	
		Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Peningkatan Layanan dan Dukungan bagi Korban Kekerasan.	2024-2029	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2024-2029	
		Evaluasi dan Peningkatan Efektivitas Program Jagai Ana' Ta dan Program Smart Millennial dalam Mewujudkan Mitigasi Sosial: Analisis Implementasi, Dampak, dan Tantangan serta Rekomendasi Strategi untuk Meningkatkan Keberhasilan Program Jagai Ana' Ta dan Program	2024-2029	

		Smart Millenial dalam Memitigasi Masalah Sosial dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Tingkat Lokal.		
		Mewujudkan Makassar sebagai Livable City dan Resilient City: Analisis Kesiapan Infrastruktur, Lingkungan, dan Sosial dalam Menghadapi Tantangan Perkotaan, serta Rekomendasi Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Kota Makassar.	2024-2029	
		Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kriminalitas untuk Mencegah Kasus Kejahatan dan Kekerasan	2024-2029	
		Peningkatan Pembinaan Cabang Olahraga dan Pengembangan Potensi Atletik dalam Rangka Mendorong Prestasi, Kewirausahaan Muda, Sertifikasi Pelatih, dan Pembinaan Atlet Pelajar.	2024-2029	
		Mewujudkan Makassar sebagai Livable City dan Resilient City: Analisis Kesiapan Infrastruktur, Lingkungan, dan Sosial dalam Menghadapi Tantangan Perkotaan, serta Rekomendasi Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ketahanan Kota Makassar.	2024-2029	
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Strategi dan rekomendasi kebijakan dalam upaya merekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan	Penguatan City Branding dan Pengembangan Festival dan MICE Bulanan sebagai Strategi Pemasaran Kota Makassar dalam Menarik Wisatawan dan Peningkatan Potensi Ekonomi.	2024-2029	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Kerjasama, Bagian

	budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	Peningkatan Daya Tarik dan Keberlanjutan Destinasi Budaya dan Sejarah melalui Penataan Total dan Pengelolaan yang Berkelanjutan.	2024-2029	Administrasi Pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh Kecamatan dan Kelurahan
		Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya untuk Meningkatkan Ketersediaan Festival Seni dan Budaya, Pemeliharaan Benda dan Situs Cagar Budaya, Revitalisasi Karya Budaya, serta Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya.	2024-2029	
		Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Lama Kunjungan, Pendapatan Asli Daerah, Kualitas Destinasi Pariwisata, Pengelolaan Destinasi Wisata Kepulauan, dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif.	2024-2029	

*Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023*

## **2.4. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar Sesuai Tema Prioritas**

### **2.4.1. Kondisi Sumber Daya Riset dan Inovasi**

Dalam mengakselerasi efektifitas tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar guna pencapaian tujuannya, amatlah dibutuhkan sumber daya yang memadai. Pertama, sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, Pemerintah Daerah memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan agar dapat menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif.

Kedua, sumberdaya keuangan juga merupakan hal yang penting. Pemerintah Daerah harus memiliki cukup alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan berbagai program dan proyek. Sumberdaya keuangan yang memadai akan memungkinkan Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka tanpa hambatan finansial yang signifikan.

Selanjutnya, kemampuan pengembangan jejaring juga menjadi hal yang penting. Pemerintah Daerah Kota Makassar perlu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kemampuan untuk membangun dan memperluas jejaring ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam mendapatkan sumberdaya, informasi, dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Terakhir, ketersediaan infrastruktur yang optimal juga merupakan faktor penting dalam mendukung kelitbangan Pemerintah Daerah. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kantor yang memadai, infrastruktur komunikasi yang baik, dan akses yang memadai ke teknologi informasi, akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Secara keseluruhan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Makassar, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sumberdaya keuangan yang cukup, kemampuan pengembangan jejaring yang baik, dan ketersediaan infrastruktur riset yang optimal. Semua hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan kesuksesan Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat dengan baik.

### **2.4.2. Kelembagaan**

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar. Dalam peraturan tersebut, fungsi kelitbangan

diimplementasikan melalui Balitbangda Kota Makassar yang bertanggung jawab membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan tugas dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Balitbangda Kota Makassar, mencakup berbagai fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi badan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, Balitbangda Kota Makassar bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang relevan, serta memastikan hasil setiap kelitbangan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **2.4.3. Sumber daya Manusia Kelitbangan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi acuan pengintegrasian kelembagaan IPTEK ke dalam BRIN terdapat 7 (tujuh) jabatan fungsional yang dibina oleh BRIN mencakup, peneliti, perekayasa, pengembang teknologi nuklir, pranata nuklir, analis pemanfaatan Iptek, analis data ilmiah, kurator koleksi hayati, pranata penerbitan ilmiah, dan teknisi penelitian dan perekayasaan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sumber daya manusia dalam bidang kelitbangan terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian mencakup pejabat fungsional terdiri atas peneliti, perekayasa, analis kebijakan, Sedangkan tenaga lainnya termasuk pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai pejabat administrator, pengawas, pelaksana, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dan tenaga non pns yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, serta Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 14 Tahun 2018.

Sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional keahlian, dan pejabat fungsional umum. Pada bulan Mei 2023, rincian jumlah personil pelaksana kelitbangan di Balitbangda Kota Makassar adalah 7 (tujuh) pejabat struktural, termasuk Kepala Balitbangda Kota Makassar, Sekretaris Balitbangda Makassar, 3 (orang) kepala bidang dan 2 (dua) orang kepala sub bagian.

Kondisi eksisting Pemerintah Daerah Kota Makassar mempunyai 5 (lima) orang fungsional peneliti ahli muda, 2 (dua) orang fungsional peneliti ahli pratama dan 2 (dua) orang analis kebijakan. Namun, untuk mencapai kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan, masih diperlukan peneliti dan perekayasa yang memiliki kepakaran di berbagai bidang yang terkait dengan urusan pemerintahan, terutama di tingkat pemerintah daerah.

#### **2.4.4. Pendanaan Kelitbangan**

Ketersediaan alokasi anggaran sangat penting bagi kelitbangan untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan dan inovasi daerah. Pendanaan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung penyempurnaan perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun melalui kegiatan kelitbangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sayangnya, alokasi anggaran riset di Indonesia masih tergolong rendah dan terus meroseot, dari Rp. 3,1 triliun atau 0,016 % terhadap PDB di tahun 2022, menjadi hanya sebesar Rp. 2,2 triliun atau 0,010 % terhadap PDB di tahun 2023. Padahal bila kita menengok kembali pada tahun 2017, anggaran riset sebesar Rp. 24,9 triliun atau 0,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut anjlok pada tahun 2023 menjadi Rp. 6,5 triliun atau 0,03% terhadap PDB yang juga secara tidak langsung berimplikasi terhadap penganggaran penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah. Meskipun demikian, dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola litbangjirap secara efektif dan meningkatkan hasil-hasil kelitbangan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pemerintah daerah.

Dalam konteks Balitbangda Makassar, kegiatan untuk mencapai sasaran program kelitbangan didukung oleh sumber pendanaan dari APBD. Namun, Pemerintah Daerah Kota Makassar memerlukan penguatan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menangkap peluang pembiayaan tersebut, termasuk dengan memperluas jejaring, meningkatkan kapasitas sumber daya, dan mengatur regulasi yang mendukung.

#### **2.4.5. Kerjasama Kelitbangan**

Mengembangkan jejaring kolaboratif dapat membantu meringankan tugas-tugas litbangjirap dalam mengatasi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan anggaran. Kolaborasi antara pemangku kepentingan litbangjirap juga dapat memberikan sinergi positif bagi perkembangan daerah, termasuk dalam hal program, penilaian dan pengembangan potensi daerah, serta penggabungan sumber daya dan kepentingan.

Meskipun Balitbangda Kota Makassar memiliki tugas utama membantu tugas Wali Kota dalam melaksanakan fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di daerah, namun keterbatasan yang ada membuat tidak semua kegiatan kelitbangan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Balitbangda Kota Makassar. Oleh karena itu, kebijakan kelitbangan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Peta Pemajuan Iptek cluster sosial pemerintahan perlu dilaksanakan melalui kerjasama kelitbangan dan pembagian peran dengan entitas peneliti di Kota Makassar, seperti perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, lembaga vertikal, dan lembaga penelitian lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab sektoral, masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan litbangjirap dengan mempertimbangkan Rencana Induk dan Peta Pemajuan Iptek cluster sosial-pemerintahan sesuai dengan urusan yang diampu oleh masing-masing OPD. Selain itu, pemerintah juga memiliki balai penelitian di daerah yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan litbangjirap sesuai dengan sektor masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi yang baik diperlukan agar hasil-hasil litbangjirap yang dihasilkan oleh balai penelitian di daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

## **BAB III**

### **TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR**

#### **3.1. Tantangan Riset dan Inovasi**

Tantangan Riset dan Inovasi yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tantangan pertama adalah kurangnya tata kelola riset yang terintegrasi di BALITBANGDA Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa perangkat daerah lainnya di lingkup Pemerintah Kota Makassar juga melakukan kegiatan riset. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyatukan dan mengoordinasikan aktivitas riset agar dapat dilakukan secara terpadu dan efisien.
- 2) Tantangan kedua adalah kurang optimalnya koordinasi dalam mensinergikan kepentingan riset dan inovasi pembangunan antara BALITBANGDA Kota Makassar dan perangkat daerah lainnya di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Penting bagi BALITBANGDA untuk menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat daerah lainnya guna memahami kebutuhan mereka dan menyelaraskan kegiatan riset dan inovasi dengan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- 3) Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas. BALITBANGDA Kota Makassar masih bergantung pada pihak ketiga, seperti tenaga akademisi, untuk melaksanakan kegiatan riset. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperkuat tim riset internal.
- 4) Tantangan terakhir adalah belum terbentuknya forum mitra peneliti antara BALITBANGDA Kota Makassar dengan peneliti dari akademisi, terutama perguruan tinggi yang berada di Wilayah Kota Makassar. Pembentukan forum ini penting untuk memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara BALITBANGDA dan peneliti eksternal guna memanfaatkan hasil riset sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, BALITBANGDA Kota Makassar perlu mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, memperkuat sumber daya manusia, mengembangkan jaringan mitra penelitian, serta menyusun kebijakan dan prosedur yang mendukung tata kelola riset yang terintegrasi. Dengan menghadapi dan mengatasi tantangan ini, BALITBANGDA Kota Makassar dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **3.2. Peluang Riset dan Inovasi**

Peluang adalah kemungkinan atau probabilitas terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam konteks Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Makassar, peluang tersebut dapat dielaborasi melalui penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi sinyal positif bagi BALITBANGDA Kota Makassar. Peraturan ini memperbaiki kinerja kelitbangan dengan pendekatan yang integratif, sinergi, efektif, dan efisien. Dengan adanya transformasi ini, proses kelitbangan menjadi lebih mudah bagi Pegawai fungsional Peneliti untuk mencapai jenjang jabatan fungsional ahli utama serta mendapatkan pengakuan melalui penganugerahan gelar profesor riset. Hal ini memberikan peluang bagi BALITBANGDA untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penelitian dan inovasi.

Kedua, tersedianya sumber daya aparatur yang memangku jabatan fungsional yang saat ini sejumlah 5 (lima) orang peneliti ahli muda, 2 (dua) orang peneliti ahli pertama dan 2 (dua) orang analis kebijakan yang menunjang penyelenggaraan riset dan inovasi di Balitbangda Kota Makassar.

Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi acuan dalam penyusunan struktur organisasi dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat Kabupaten/Kota. Pedoman ini memberikan landasan yang jelas bagi BALITBANGDA Kota Makassar dalam mengatur kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, dan inovasi) di tingkat daerah. Dengan adanya pedoman ini, BALITBANGDA dapat lebih terfokus dan terarah dalam mengelola riset dan inovasi di wilayahnya.

Keempat, terbitnya Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah memberikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman ini menjadi acuan bagi BALITBANGDA Kota Makassar dalam mengelola kegiatan riset dan inovasi di daerahnya. Dengan adanya pedoman ini, BALITBANGDA dapat meningkatkan tata kelola riset dan inovasi secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat menjadi landasan ilmiah yang kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, peluang yang dimiliki oleh BALITBANGDA Kota Makassar adalah memperkuat kelembagaan dalam bidang riset dan inovasi. Hal ini memberikan mereka kelebihan dan kekuatan dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, BALITBANGDA Kota Makassar dapat berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB IV

### ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM

#### RISET DAN INOVASI DI DAERAH

##### A. Analisis Kesenjangan (*Gap*) Kemampuan Melakukan Kajian Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) merupakan instrumen atau *tools* yang digunakan dengan menyandingkan antara kondisi ekisting (saat ini) dengan kondisi yang diharapkan. Pendekatan analisis kesenjangan pada kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kesenjangan yang terjadi di setiap sasaran rencana pembangunan tahun 2021-2025 yang belum terdapat data penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut. Apabila pada setiap rencana pembangunan didukung dengan data penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, maka diharapkan visi dan misi Kota Makassar Tahun 2021-2026 khususnya pada cluster/bidang sosial dan pemerintahan dapat tercapai selaras dengan maksud dan tujuan dari rencana pembangunan tersebut.

Pelaksanaan analisis gap ini dimulai dengan menyusun sasaran dan indikator kesalahan yang diperoleh dari dokumen RPJMD Kota Makassar 2021.2026. indikator sasaran ini memberi kemudahan dalam penentuan data-data kelitbangan yang dapat menunjang akselerasi pencapaian tujuan tersebut. sasaran pembangunan kota Makassar Tahun 2021-2026 disandingkan dengan data yang diperoleh terkait dengan kegiatan kelitbangan cluster sosial dan pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2022. Data-data tersebut berdasarkan bidang urusan pemerintahan Dengan data penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan yang mendukung atau pertalian secara langsung dan tidak langsung terhadap indikator sasaran yang telah tersusun sebagaimana termuat dalam RPJMD kota Makassar tahun 2021-2026. Hasil dari analisis gap ini menunjukkan jumlah data yang diperoleh terkait dengan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan di bidang sosial dan pemerintahan yang terlaksana pada tahun 2021-2006 yang berkaitan dengan indikator sasaran. Adapun sasaran dan indikator sasaran yang telah dilengkapi dengan judul penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang telah dilakukan pada tahun 2021-2026 yaitu dapat dilihat secara eksplisit pada tabel berikut ini

Tabel 4.1. Komparasi Kelitbangan Tahun 2016-2021 Terhadap rencana Pembangunan Kota Makassar Makassar Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator	Bidang	Judul Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan 2016-2021			
	Sasaran	Pemerintahan				
<b>Fokus Utama Berdasarkan Kesesuaian Cluster/Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>						
<b>Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b>						
1.1.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Pendidikan,	1	R	Revolusi Pendidikan SMP di Kota Makassar	
			2	R	Studi Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar	
			3	R	Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dasar di Kota Makassar	
			4	R	Implementasi Merdeka Belajar dalam Mewujudkan Revolusi Pendidikan di Kota Makassar	
			5	R	Manajemen 18 Revolusi Pendidikan Kota Makassar	
	Perpustakaan					
	Pemerintahan Umum					
<b>Daya Beli Masyarakat</b>						
1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Penanaman Modal	1	R	Kapabilitas Organisasi Publik: Pengembangan Sistem Sumber Daya Manusia Berbasis Impotance (Performance Analysis (IPA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar	
			2	R	Model Pelayanan Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang Perumahan ke Pemerintah Kota Makassar	
		Perdagangan,	1	R	Pengelolaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar	
		Koperasi dan UKM	1	D	Kajian Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Lorong (BULO) dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lorong	
			2	D	Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha	
			3	R	Strategi dan Arah Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM pada Kota Makassar	
			4	R	Strategi pengembangan UKM kota Makassar berbasis lorong	
			5	R	Peran Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar	
			6	R	Makassar Recovery the Increase Economy via UMKM	
			7	D	Kajian Ekonomi Program Bank Sampah di Makassar ( <i>Study on Economic Benefit of Garbage Bank Programm in Makassar</i> )	

		Perikanan dan Pertanian	1	D	Kajian Ekonomi Program Lorong Garden di Kota Makassar ( <i>Study on Economic Benefit of Longgar Program in Makassar</i> )
<b>Pelayanan Publik yang “Sombere” dan “Smart”</b>					
1.2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang “Sombere” dan “Smart”	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Komunikasi dan Informatika,	1	R	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2018
			2	R	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2019
			3	R	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2020
			4	R	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2021
			5	R	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2022
			6	D	Naskah Akademik dan Ranperda Makassar Sombere dan Smart City
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	R	Formalisme oleh Birokrat Garis Depan dalam Pelayanan Kantor Kecamatan di Kota Makassar
			2	R	Implementasi <i>Open Government</i> dan Transparansi Masyarakat Dalam Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan di Kota Makassar
		Pemerintahan Umum	1	R	Model Pemetaan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus BKPSDM Kota Makassar)
			2	R	Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota Makassar
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
		Perhubungan	1	R	Analisa Tingkat Pelayanan Lalu Lintas dan Perparkiran (Studi Kasus: Kawasan Perdagangan Somba Opu Kota Makassar)
			2	R	Model Penerapan Sistem Transportasi Bagi Masyarakat Kota Makassar
			3	R	Sistem Perparkiran Berbasis Smart City di Kota Makassar
			4	R	Analisis Model Pelayanan Pete-Pete Smart di Kota Makassar
			5	R	Analisis Potensi Titik Rawan Kemacetan dan Titik Parkir serta Alternatif Penanggulannya di Kota Makassar
		<b>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			
1.2.2	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	E	Analisis Kebijakan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan					
		Pengelolaan Keuangan Daerah	1	D	Akuntabilitas Pengelolaan Program CSR oleh Dewan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) di Kota Makassar
		Pendapatan Daerah	1	D	Kajian Kebijakan Kontribusi PD Parkir dan PD Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
<b>Kualitas Layanan Kesehatan</b>					
2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	1	E	Evaluasi Program <i>Home Care</i> dan <i>Telemedicine</i> di Kota Makassar
			2	D	Kajian Sosial Determinan Kesehatan Ibu dan Anak
<b>Fokus Pilihan dan Penunjang Berdasarkan Kesesuaian Cluster/Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>					
<b>Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin</b>					
2.1.2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	Persentase Angka Kemiskinan	Sosial	1	R	Sosial Media Jaringan Komunikasi (Communication Network) untuk Program Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang Anak Jalanan di Kota Makassar
			2	D	Kajian Penanganan Anak Gelandangan dan Pengemis Kota Makassar
		Pemberdayaan Perempuan			
		Pangan	1	R	Konsep Pengempangan <i>Logistik dan Supply Chain</i> untuk Strategi Ketahanan Pangan Kota Makassar
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	D	Pembuatan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
			2	D	Peraturan Walikota Makassar Makassar tentang Agent of Innovation
3	D	Naskah Akademik dan Ranperda BRIDA Kota Makassar			
<b>Kemudahan Akses Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru</b>					
2.2.1 Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Ketenagakerjaan,	1	R	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makassar
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				

		Pemuda dan Olahraga,			
		Koperasi dan UKM	1	R	Strategi pengembangan UKM kota Makassar berbasis lorong
		Pariwisata,			
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Kebudayaan			
<b>Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi</b>					
2.2.2 Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Rasio Gini	Perdagangan,	1	D	Kajian Potensi UMKM Lorong Wisata di Kota Makassar
		Pariwisata	1	R	Pusat Kuliner Jalan Nusantara Kota Makassar
			2	R	Naskah Akademik dan Ranperda Pembentukan Makassar Incorporated
			3	D	Kajian Kebutuhan pendirian usaha PT Makassar Incorporated
			4	R	Studi Kelayakan Bisnis Pembentukan Makassar Incorporated
			5	D	Kajian Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar
		Kebudayaan,	1	R	Sejarah Kampung di Kota Makassar sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal
			2	R	Pemanfaatan Sumber Daya Budaya Sebagai Objek dan Destinasi Wisata Sejarah Budaya di Kota Makassar
		Perikanan dan Pertanian,			
Ketahanan Pangan					

Berdasarkan hasil analisis gap antara penelitian dan pengembangan tahun 2017-2022 dengan rencana sasaran pembangunan tahun 2021-2026, telah dikelompokkan 72 data penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta evaluasi kebijakan cluster sosial pemerintahan ke dalam beberapa indikator sasaran yang telah tersusun. Untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu gap yang terjadi antara kegiatan kelitbangan yang mendukung sasaran rencana pembangunan, perlu adanya analisis gap di antara keduanya dan disetiap sasaran rencana pembangunan (klasterisasi). Gap tinggi ditunjukkan dengan jumlah kegiatan kelitbangan yang mendukung suatu klaster tersebut kurang dari median yang telah terumuskan. Sedangkan kesenjangan atau *gap* rendah apabila terjadi sebaliknya. Hasil analisis gap tersebut dapat terlihat pada tabel 4.3 berdasarkan data rekapitulasi dengan memperhatikan bidang urusan dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Kelitbangan 2017-2022 Per Klaster Sasaran**

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan	Data yang Mendukung			
				R	D	E	Total
<b>Fokus Utama Berdasarkan Kesesuaian Cluster/Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>							
<b>Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</b>							
1	1.1	1.1.1	Pendidikan	5	0	0	5
			Perpustakaan	0	0	0	0
			Pemerintahan Umum	0	0	0	0
			Total	5	0	0	5
		1.1.2	Penanaman Modal	2	0	0	2
			Perdagangan	1	0	0	1
			Koperasi dan UKM	4	3	0	7
			Perikanan dan Pertanian	0	1	0	1
			Total	7	4	0	11
		1.2.1	Komunikasi dan Informatika	5	1	0	6
			Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	0	2
			Pemerintahan Umum	2	0	0	2
			Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0
			Perhubungan	5	0	0	5
			Total	14	1	0	15
		1.2.2	Percanaan Pembangunan Daerah	0	0	1	1
Pengelolaan Keuangan Daerah	0		1	0	1		
Pendapatan Daerah	0		1	0	1		
Total	0		2	1	3		
2.	2.1	2.1.1	Kesehatan	1	1	0	2
			Total	1	1	0	2
<b>Fokus Pilihan dan Penunjang Berdasarkan Kesesuaian Cluster/Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>							
2	2.1	2.1.2	Sosial	1	1	0	2
			Pemberdayaan Perempuan	0	0	0	0
			Pangan	1	0	0	1
			Penelitian dan Pengembangan	0	3	0	3
			Total	2	4	0	6
	2.2	2.2.1	Ketenagakerjaan	1	0	0	1

		Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0
		Koperasi dan UKM	1	0	0	1
		Pariwisata	0	0	0	0
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0
		Kebudayaan	0	0	0	0
		Total	2	0	0	2
	2.2.2	Perdagangan	0	1	0	1
	2.2.2	Pariwisata	3	2	0	5
	2.2.2	Kebudayaan	2	0	0	2
	2.2.2	Perikanan dan Pertanian	0	0	0	0
	2.2.2	Ketahanan Pangan	0	0	0	0
	2.2.2	Total	5	3	0	8

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023.

Hasil analisis gap yang terjadi pada 8 (delapan) klaster tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Hasil Analisis Gap Kelitbangan 2017-2022**

Klaster	Kelitbangan 2017-2022 yang Mendukung				Keterangan Gap
	R	D	E	Total	
1	5	0	0	5	Tinggi
2	7	4	0	11	Rendah
3	14	1	0	15	Rendah
4	0	2	1	3	Tinggi
5	1	1	0	2	Tinggi
6	2	4	0	6	Rendah
7	2	0	0	2	Tinggi
8	5	3	0	8	Rendah
Median	3,5	1,5	0	5,5	

Keterangan: R (Penelitian), D (Pengembangan), E (Evaluasi Kebijakan)

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023.

Klaster pada tabel 4.3 adalah sasaran rencana pembangunan kota Makassar Tahun 2021-2026 di bidang sosial dan pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat gap yang terjadi di antara 8 (delapan) klaster tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan. Beranjak dari hasil analisis, gap yang tinggi terjadi pada klaster 1, klaster 4, klaster 5, dan klaster 8. Hal tersebut dikarenakan jumlah data kelitbangan periodik 2017-2022 yang mendukung rencanan pembangunan pada klaster di maksud masih rendah. Adapun kategori gap yang terjadi di 8 (delapan) klaster terbagi menjadi 6 (enam) kategori yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Kategori Gap Klaster Berdasarkan Gap Per Jenis Kegiatan**

KATEGORI GAP 1 (R Rendah; D, E Tinggi)	KATEGORI GAP 2 (R, D Rendah; E Tinggi)
R>M; D<M; E<M	R>M; D>M; E<M
Klaster 1 Klaster 3	Klaster 2 Klaster 8
KATEGORI GAP 3 (R Tinggi; D, E Rendah)	KATEGORI GAP 4 (R, D, E Tinggi)
R<M; D>M; E>M	R>M; D<M; E<M
Klaster 4	Klaster 5 Klaster 7
KATEGORI GAP 5 (D Rendah, R,E Tinggi)	
D>M; R<M; E<M	
Klaster 6	

Sumber: Analisis Tim Peneliti, 2023

Keterangan:

Hijau: Klaster dengan gap total kelitbangan rendah

Merah: Klaster dengan gap total kelitbangan tinggi

Berdasarkan tabel 4.4 terdapat 5 (lima) kategori gap yang terjadi pada klaster tersebut, dimana klaster dengan gap total kelitbangan yang termasuk dalam kategori tinggi adalah kategori gap 1, 3 dan 4. Kemudian, Klaster 5 dan 7 berada pada kategori gap ke 4 dimana data penelitian, pengembangan dan evaluasi kebijakannya memiliki gap yang tinggi. Gap yang tinggi tersebut teridentifikasi dari jumlah data kelitbangan 2017-2022 berada di bawah median untuk jenis kegiatan kelitbangannya. Klaster data kelitbangan yang mendukung atau berada pada kategori gap rendah tersebut menjadi *supply* aktifitas yang belum terpenuhi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kesenjangan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan ketidakmampuan atau rendahnya kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan tersebut. Hal ini menjadi prioritas kebutuhan riset dengan beberapa alternatif agar dapat terlaksanakan secara optimal.

## **B. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan**

Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah merupakan konektifitas atau keterhubungan elemen yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Berikut ini dideksripsikan kondisi ekosistem riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar saat ini dan kondisi yang diharapkan berdasarkan elemen-elemen sistem dari ekosistem riset dan inovasi daerah.

### **1. Kebijakan Dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Di Daerah**

Pemerintah Kota Makassar memiliki setidaknya tiga dokumen yang digunakan sebagai landasan kebijakan riset dan inovasi di Kota Makassar. Yang pertama adalah dokumen

pembentukan Balitbangda sebagai badan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Balitbangda Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kedua, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026). RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang dimandatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dokumen ini merupakan penjabaran dari periode keempat (terakhir) dari dokumen 20 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025. Secara signifikan, ilmu pengetahuan menjadi salah satu bagian dalam dokumen tersebut.

Ketiga, dokumen pedoman pelaksanaan kelitbang di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan. Dokumen ini merupakan pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang di kota Makassar.

Meskipun kebijakan penyelenggaraan riset dan inovasi oleh Balitbangda Kota Makassar telah diatur dengan baik, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perlunya dukungan infrastruktur dan pendanaan untuk riset yang mungkin tidak memiliki nilai pasar yang tinggi, namun penting untuk pembangunan inklusif. Sebagai contoh, penemuan vaksin adalah hasil inovasi yang dapat memberikan manfaat finansial bagi daerah. Namun, riset dasar yang memahami pandemi dan penyebaran penyakit juga diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat (Elyazar dkk., 2020).

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar memiliki kerangka kebijakan dan struktur institusi yang mengatur riset dan inovasi melalui dokumen-dokumen seperti pembentukan Balitbangda, RPJMD, dan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Namun, pelaksanaan riset dan inovasi masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik di berbagai perangkat daerah, dan pendanaan

serta infrastruktur yang mendukung riset yang memiliki nilai strategis, meskipun tidak memberikan keuntungan finansial langsung, masih kurang.

Di masa mendatang, diharapkan Pemerintah Kota Makassar mampu mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan riset dan inovasi melalui mekanisme yang disusun dalam kebijakan. Balitbangda diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan program riset dan inovasi di seluruh perangkat daerah, sehingga terjadi sinergi yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan dalam alokasi pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung riset dasar dan inovasi yang memiliki dampak strategis, sekalipun tidak bernilai komersial. Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam menghadapi situasi pandemi dan penyakit yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

## **2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi**

Kondisi selanjutnya terkait dengan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar. Hingga saat ini, koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di Kota Makassar belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh pelaksanaan riset dan inovasi yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah, serta penganggarannya yang masih ditangani oleh setiap perangkat daerah tersebut. Hal ini diperparah secara empiris bahwa Balitbangda Kota Makassar tidak memiliki kewenangan yang kuat secara yuridis untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program riset dan inovasi di bawah naungannya, karena wewenang terkait program riset dan inovasi serta DPA sepenuhnya masih berada di institusi masing-masing. Hal ini menyebabkan program-program tumpang tindih antar lembaga, bahkan terlihat bersaing, alih-alih berkolaborasi. Fungsi yang dominan melekat di Balitbangda hanya mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang terkait riset dan inovasi. Penyempurnaan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem iptek nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisas IPTEK dan peraturan pelaksanaannya yakni, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan PerBRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Kondisi yang berhubungan dengan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini, koordinasi dan sinkronisasi program riset dan inovasi di kota Makassar belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan riset dan inovasi yang masih terfragmentasi di setiap perangkat daerah, serta pengelolaan anggaran yang masih berada di tangan masing-masing perangkat daerah.

Situasi ini sejalan dengan pentingnya penyempurnaan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi di Kota Makassar dengan bertransformasi menjadi BRIDA Kota Makassar sebagai bagian tak terpisahkan dari kerangka sistem Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Nasional (Sisnas IPTEK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas IPTEK dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Presiden Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (PerBRIN) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Selain itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2023 juga turut mengatur pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Ditinjau dari aspek Sumber daya manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional keahlian, dan pejabat fungsional umum. Pada bulan Mei 2023, rincian jumlah personil pelaksana kelitbang di Balitbangda Kota Makassar adalah 7 (tujuh) pejabat struktural, termasuk Kepala Balitbangda Kota Makassar, Sekretaris Balitbangda Makassar, 3 (orang) kepala bidang dan 2 (dua) orang kepala sub bagian. Kondisi eksisting Pemerintah Daerah Kota Makassar mempunyai 5 (lima) orang fungsional peneliti ahli muda, 2 (dua) orang fungsional peneliti ahli pratama dan 2 (dua) orang analis kebijakan. Namun, untuk mencapai kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang, masih diperlukan peneliti dan perekayasa yang memiliki kepakaran di berbagai bidang yang terkait dengan urusan pemerintahan, terutama di tingkat pemerintah daerah

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, integrasi dan penguatan koordinasi program riset dan inovasi yang dilakukan oleh Balitbangda menjadi penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya arah yang jelas dalam pengembangan riset dan inovasi guna meningkatkan kapasitas dalam pembangunan daerah. Perlu dilakukan transformasi kelembagaan yang komprehensif dan penguatan SDM Riset dan Inovasi di Balitbangda Kota Makassar, termasuk memperkuat peran Balitbangda dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan, serta melakukan tindakan

terintegrasi untuk mengoptimalkan hasil riset dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar dengan bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar serta penguatan SDM melalui diklat formal, teknis dan substansi.

### **3. Kemitraan riset dan inovasi**

Kondisi kemitraan riset dan inovasi Balitbangda Kota Makassar saat ini secara umum dapat ditinjau dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

- a. Riset dan Inovasi Daerah: Balitbangda Kota Makassar sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 telah menghasilkan 61 rekomendasi hasil riset di bidang kebijakan dan pembangunan daerah dan 440 inovasi yang telah dilegalitaskan dalam bentuk Perkada guna akselerasi visi misi Pemerintah Kota Makassar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Jejaring kelitbang yang masih terbatas. Kerjasama dengan lembaga riset baik PTN dan PTS, instansi pemerintah lainnya dan dunia usaha masih cukup terbatas dan belum terstruktur dengan baik sehingga hal tersebut juga menghambat pengembangan solutif inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- c. Sumber daya IPTEK yang masih terbatas. Alokasi anggaran dalam mendukung aktifitas riset dan inovasi yang terbatas, ketersediaan sumber daya IPTEK yang belum memadai baik fungsional peneliti, analis kebijakan, perekayasa, analis pemanfaatan Iptek, analis data ilmiah, analis perkebunrayaan, kurator koleksi hayati, penata penerbitan ilmiah, teknisi penelitian dan perekayasa dan teknisi perkebunrayaan.
- d. Kesadaran stakeholder terkait. Kesadaran stakeholder perangkat daerah terkait, dunia usaha dan masyarakat terhadap pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan daerah masih rendah sehingga perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi dan dukungan dalam pengembangan riset dan inovasi kedepannya.

Berangkat dari penjelasan mengenai kondisi eksisting Balitbangda saat ini yang terurai kedalam 4 dimensi secara umum, sehingga untuk menyongsong dan menghadapi tantangan ekosistem riset dan inovasi di masa yang akan datang Balitbangda Kota Makassar perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Jejaring riset dan inovasi yang kuat. Balitbangda kota Makassar diharapkan dapat membangun atau menjalin kemitraan riset dan inovasi yang lebih utuh dan berkelanjutan dengan lembaga riset, PTN dan PTS, dunia industri dan komunitas lokal. Dengan kolaborasi tersebut memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang lebih efektif dan efisien

sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan mutu dan kualitas riset dan inovasi yang dihasilkan oleh Balitbangda Kota Makassar;

- b. Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti yang Berkelanjutan. Kemitraan riset dan inovasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan berkelanjutan yang dapat diimplementasikan atau dioperasionalisasikan oleh stakeholder terkait, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat kota Makassar.
- c. Pengembangan talenta lokal. Melalui jejaring kemitraan riset dan inovasi yang kuat diharapkan dapat terjadi sharing knowledge dan sumber daya dan pengembangan talenta lokal dalam berbagai disiplin ilmu sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sifatnya lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
- d. Dukungan stakeholder. Kondisi ideal membutuhkan pelibatan dukungan yang kuat dari stakeholder terkait dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan Kota Makassar yang lebih efektif, berkualitas dan berkelanjutan di masa depan.

#### **4. Budaya riset dan inovasi**

Kondisi eksisting budaya riset dan inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya riset dan inovasi yang kuat di lingkungannya. Kesadaran tentang pentingnya riset dan inovasi dalam pembangunan kota mungkin masih terbatas di kalangan pelaku kelitbangannya itu sendiri, maupun di kalangan masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga ahli riset, mungkin membatasi kemampuan Balitbangda untuk melaksanakan program riset dan inovasi secara komprehensif. Kurangnya kolaborasi antara Balitbangda, perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan masyarakat juga bisa menghambat pertukaran ide dan pengetahuan yang diperlukan untuk merangsang inovasi. Selain itu, minimnya insentif bagi para peneliti dan inovator lokal mungkin menghambat minat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas riset dan inovasi.

Dalam beberapa tahun ke depan, kondisi Balitbangda Kota Makassar diharapkan untuk mengubah dinamika ini dan membentuk budaya riset dan inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Balitbangda berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis tentang peran krusial riset dan inovasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui berbagai program edukasi dan kampanye informasi, diharapkan akan tercipta pemahaman yang

lebih baik tentang bagaimana riset dan inovasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap solusi-solusi inovatif yang mengatasi masalah lokal. Kemitraan yang lebih erat dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri direncanakan untuk diciptakan, memungkinkan pertukaran gagasan dan pengetahuan yang lebih luas. Di samping itu, Balitbangda juga perlu untuk memberikan dukungan insentif yang bagi para peneliti dan inovator, termasuk dana hibah, penghargaan, dan fasilitas penelitian yang ditingkatkan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, seperti penyediaan fasilitas riset yang modern dan pelatihan dalam metodologi riset terkini, diharapkan akan terbentuk ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar yang memudahkan pengembangan ide-ide baru. Penerapan hasil riset dan inovasi dalam keputusan pemerintahan dan program-program pembangunan kota menjadi tujuan akhir dalam upaya membangun budaya riset dan inovasi yang sukses di Balitbangda Kota Makassar.

### **5. Keterpaduan riset dan inovasi di daerah**

Kondisi keterpaduan riset dan inovasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun telah ada upaya riset yang dilakukan, integrasi antara hasil riset dan implementasi inovasi mungkin belum optimal. Terdapat kesenjangan antara temuan riset yang dihasilkan dan penerapannya dalam solusi konkret yang dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antara lembaga riset, pemerintah, dan industri, serta keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan konsep-konsep inovatif mempengaruhi keterpaduan ini serta belum terpusatnya program dan kegiatan riset dan inovasi di Balitbangda Kota Makassar menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mengintegrasikan dan mengembangkan riset dan inovasi di Kota Makassar secara efektif dan berkelanjutan.

Berangkat terhadap permasalahan tersebut, Balitbangda Kota Makassar kedepannya diharapkan dapat mengintegrasikan antara riset dan inovasi secara menyeluruh dalam beberapa tahun mendatang. Di masa depan, diharapkan akan terjadi sinergi yang lebih erat antara penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda dan penerapan hasil riset tersebut ke dalam upaya inovasi yang lebih konkret. Balitbangda berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kerjasama yang lebih terstruktur, diharapkan temuan-temuan riset dapat secara efektif diadaptasi menjadi solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata di Kota Makassar. Balitbangda mungkin akan memfasilitasi forum pertukaran pengetahuan dan ide antara berbagai

sektor, serta menggalakkan partisipasi aktif dari komunitas riset dan inovasi lokal. Dengan penerapan praktik-praktik terbaik dalam mengintegrasikan riset dan inovasi, diharapkan akan terwujud dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam pembangunan kota, serta mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

## **6. Penyelarasan dengan perkembangan global**

Konisi saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam penyelarasan dengan perkembangan global dalam hal riset dan inovasi. Kemajuan teknologi dan pengetahuan di tingkat global mungkin belum sepenuhnya diakomodasi dalam program-program riset dan inovasi yang dilakukan oleh Balitbangda. Masih terdapat kesenjangan antara tren inovasi global dan fokus riset yang sedang berlangsung di tingkat lokal. Keterbatasan akses terhadap sumber daya informasi internasional, serta keterbatasan kolaborasi internasional dalam riset dan inovasi, mungkin juga mempengaruhi upaya Balitbangda untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan global.

Menyongsong masa depan Balitbangda Kota Makassar diharapkan dapat meningkatkan penyelarasan dengan perkembangan global dalam beberapa tahun mendatang. Diharapkan akan terjadi pembaruan dalam strategi riset dan inovasi yang memperhitungkan tren dan perkembangan terbaru di tingkat global. Balitbangda mungkin akan mengintensifkan upaya untuk memonitor perkembangan teknologi, pengetahuan, dan inovasi yang terjadi di seluruh dunia, sehingga dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan bagi Kota Makassar. Kolaborasi internasional dalam bentuk kemitraan dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri dari luar negeri juga mungkin akan ditingkatkan. Dengan membuka saluran komunikasi dan pertukaran pengetahuan lintas batas, diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman yang dapat memperkaya program riset dan inovasi di tingkat lokal. Melalui penyelarasan yang lebih baik dengan perkembangan global, Balitbangda berharap dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dan merespons secara efektif terhadap dinamika global dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Makassar.

## BAB V

### STRATEGI DAN INOVASI

#### A. Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Dalam era dinamika dan kompleksitas pembangunan kota yang semakin meningkat, penyusunan kebijakan yang tepat dan berdampak positif menjadi esensial bagi kemajuan suatu daerah. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi di Indonesia mengakui pentingnya mengambil keputusan berdasarkan pada bukti-bukti empiris yang kuat dan data yang valid. Oleh karena itu, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbangda) Kota Makassar telah merumuskan Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) yang akan menjadi dasar panduan bagi pengambilan keputusan di semua tingkatan pemerintahan.

Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti di Balitbangda Kota Makassar adalah suatu pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti empiris dan data yang akurat dalam proses perumusan kebijakan. Beberapa langkah strategis dan penting yang dilakukan oleh Balitbangda untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan didukung oleh informasi yang kuat dan relevan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Tujuan Kebijakan: Tahap awal ini melibatkan pengidentifikasian permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Makassar dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diusulkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan memiliki fokus yang jelas dan terarah.
2. Pengumpulan Data: Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Ini melibatkan survei, analisis statistik, wawancara, dan pemantauan lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang dianalisis.
3. Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang sesuai, seperti analisis statistik, pemodelan ekonomi, atau analisis dampak sosial. Hasil analisis ini membantu mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi dari data yang diolah.
4. Evaluasi Kebijakan yang Ada: Jika ada kebijakan yang sedang berjalan terkait dengan isu yang sama, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan tersebut. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan yang ada perlu disempurnakan atau digantikan.
5. Penyusunan Rekomendasi: Berdasarkan analisis data dan evaluasi, rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terukur dirumuskan. Rekomendasi ini mencakup rincian tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Konsultasi Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, dilibatkan dalam proses konsultasi. Masukan dari pemangku kepentingan membantu memperbaiki dan mengkustomisasi rekomendasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan nyata.
7. Komunikasi dan Diseminasi Hasil: Hasil analisis dan rekomendasi disajikan dengan jelas

kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media, seperti laporan tertulis, presentasi, dan seminar. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman dan dukungan yang lebih luas terhadap rekomendasi kebijakan.

8. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Setelah implementasi, kebijakan dievaluasi secara berkala untuk memantau dampak yang dicapai. Evaluasi ini membantu mengukur keberhasilan dan memungkinkan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Strategi ini memungkinkan Balitbangda Kota Makassar untuk menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kebijakan berdasarkan pada bukti-bukti empiris. Dengan menerapkan pendekatan ini, Balitbangda berperan sebagai mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, menghasilkan dampak yang positif, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan Kota Makassar. Lebih lanjut pada tabel 5.1 disajikan strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi, misi dan program strategis pemerintah kota Makassar sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1 Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Permasalahan Pembangunan Daerah prioritas dan sasaran pembangunan daerah Permasalahan pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah			Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah	Indikator	Bidang	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Judul Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan 2016-2021	R	D	E	Ket.	Strategi Menghasilkan Rekomendasi Berbasis Bukti ( <i>Evidence Based Policy</i> )
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah												
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	masih rendahnya kemampuan asesor reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan.	Indeks Pendidikan	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	Revolusi pendidikan SMP di Kota Makassar	√	x	x	√	
								Implementasi merdeka belajar dalam mewujudkan revolusi pendidikan di kota Makassar	√	x	x	√		
								Manajemen 18 revolusi pendidikan kota Makassar	√	x	x	√		
								Angka Harapan Lama Sekolah	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset dengan fokus angka harapan sekolah di kota Makassar	

--	--	--	--	--

Angka Rata-Rata Lama Sekolah		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset dengan fokus angka rata-rata lama sekolah di kota Makassar
Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD, dan SMP)		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset dengan fokus angka partisipasi murni (PAUD, SD, dan SMP) di kota Makassar
Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD dan SMP)		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset dengan fokus angka partisipasi kasar (PAUD, SD, dan SMP) di kota Makassar
Persentase sarana dan prasarana pendidikan (PAUD, SD, SMP) dalam kondisi baik	Pemenuhan standar nasional pendidikan dasar di kota Makassar	√	x	x	√	
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan (A,B,C)		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai ketuntasan pendidikan kesetaraan (A,B,C) di Kota Makassar

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024		
--	---	--	--	--

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai rasio guru murid (PAUD, SD, SMP) di Kota Makassar
	Persentase Guru yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)	√	x	x	√	
	Pemenuhan standar nasional pendidikan dasar di kota Makassar	√	x	x	√	
	Implementasi merdeka belajar dalam mewujudkan revolusi pendidikan di kota Makassar	√	x	x	√	

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024		

			Manajemen 18 revolusi pendidikan kota Makassar	√	x	x	√	
Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Angka Budaya Baca Kota Makassar		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tingkat budaya baca di Kota Makassar
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tingkat pengunjung perpustakaan di Kota Makassar setiap tahunnya
		Jumlah koleksi judul yang tersedia di perpustakaan daerah		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tingkat koleksi judul yang tersedia di perpustakaan daerah kota Makassar
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024				Pemerintahan Umum	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi kelompok masyarakat di kota Makassar
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengendalian inflasi serta peningkatan kesempatan berusaha dengan melibatkan usaha melalui link and match dunia yang menciptakan iklim investasi yang kondusif	Pengeluaran perkapita	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayananan perizinan	Kapabilitas Organisasi Publik: Pengembangan Sistem Sumber Daya Manusia Berbasis <i>(Importance Performance Analysis)</i> (IPA) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar	√	x	x	√	
								Model Pelayanan Penyerahan Fasilitas		√	x	x	√	

							Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembangan Perumahan ke Pemerintah Kota Makassar					
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Jasa Lainnya			Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran produk Dalam negeri	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Pengelolaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar	√	x	x	√
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Industri Pengolahan						Kajian Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Lorong (BULO) dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lorong	x	√	x	√
								Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai Upaya	x	√	x	√



							Makassar <i>Recovery the Increase Economy via UMKM</i>	√	x	x	√		
							Kajian Ekonomi Program Bank Sampah di Makassar (Study on Economic Benefit of Garbage Bank Programm in Makassar)	x	√	x	√		
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				Koperasi dan UKM	Program pengembangan UMKM	persentase usaha mikro dan kecil	x	√	x	√	
							Kajian Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Lorong (BULO) dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lorong	x	√	x	√		

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraknya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraknya lapangan usaha Penyediaan Transportasi dan Pergudangan					Pengelolaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar	√	x	x	√	
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraknya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraknya lapangan usaha Jasa Lainnya					Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha	x	√	x	√	
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraknya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraknya lapangan usaha Industri Pengolahan					Strategi dan Arah Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM pada Kota Makassar	√	x	x	√	

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran							Strategi dan Arah Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM pada Kota Makassar	√	x	x	√	
								Peran Koperasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar	√	x	x	√		
								Makassar <i>Recovery the Increase Economy via UMKM</i>	√	x	x	√		
								Kajian Ekonomi Program Bank Sampah di Makassar (Study on Economic Benefit of Garbage Bank Programm	x	√	x	√		

							in Makassar)					
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum efektifnya penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis kewirausahaan						x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai wirausaha baru (start-up) di kota Makassar
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Industri Pengolahan		Perikanan dan Pertanian	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Kajian Ekonomi Program Lorong Garden di Kota Makassar ( <i>Study on Economic Benefit of Longgar Program in Makassar</i> )	x	√	x	√	
						Cakupan bina kelompok nelayan		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai pembinaan kelompok nelayan di Kota Makassar

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere" dan "Smart"	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di Kecamatan dan Kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Komunikasi dan Informatika	Program aplikasi informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2018	√	x	x	√	
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD							Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2019	√	x	x	√	
									Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2020	√	x	x	√	
									Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2021	√	x	x	√	
									Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar	√	x	x	√	

							Tahun 2022					
							Naskah Akademik dan Ranperda Makassar Sombere dan Smart City	x	√	x	√	
						Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2018	√	x	x	√	
							Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2019	√	x	x	√	
							Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2020	√	x	x	√	
							Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	√	x	x	√	

						t Kota Makassar Tahun 2021								
						Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2022	√	x	x	√				
						Naskah Akademik dan Ranperda Makassar Sombere dan Smart City	x	√	x	√				
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024				Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program pendaftaran penduduk	Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki kartu identitas anak (KIA)	Formalisasi oleh Birokrat Garis Depan dalam Pelayanan Kantor Kecamatan di Kota Makassar	√	x	x	√	
									Implementasi Open Government dan Transparansi Masyarakat Dalam	√	x	x	√	

							Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan di Kota Makassar					
						cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	Formalisme oleh Birokrat Garis Depan dalam Pelayanan Kantor Kecamatan di Kota Makassar	√	x	x	√	
							Implementasi Open Government dan Transparansi Masyarakat Dalam Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan di Kota Makassar	√	x	x	√	

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Belum maksimalnya penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal				Seluruh Kecamatan / Pemerintahan Umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Model Pemetaan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus BKPSDM Kota Makassar)	√	x	x	√	
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat							Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota Makassar	√	x	x	√	
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Belum maksimalnya penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemanfaatan TIK, penggalia	Status laporan penyelenggaraan pemeritnah daerah (LPPD)	Seluruh Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2018	√	x	x	√	
									Survei Indeks Kepuasan	√	x	x	√	

			n sumber PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan sistem manajemen aparatur				Masyarakat Kota Makassar Tahun 2019					
				Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2020	√	x	x	√				
				Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2021	√	x	x	√				
				Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2022	√	x	x	√				
				Naskah Akademik dan Ranperda Makassar Sombere dan Smart City	x	√	x	√				



		evaluasi pencapaian target kinerja		
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Masih rendahnya realisasi PAD		
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD		

			Daerah Kota Makassar					
Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kajian Kebijakan Kontribusi PD Parkir dan PD Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	x	√	x	√	
		Deviasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran PAD dalam APBD	Kajian Kebijakan Kontribusi PD Parkir dan PD Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	x	√	x	√	

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Belum optimalnya penggalan potensi-potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah												
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Belum optimalnya kinerja perusahaan daerah dalam memberikan dividen ke Pemerintah Kota Makassar												
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat	Usia harapan hidup	Kesehatan	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
				perkuatan imunitas (Makassar Recover) serta peningkat					Kajian Sosial Determinan Kesehatan Ibu dan Anak	x	√	x	√	


an kapasitas dan pemerataan tenaga medis	

Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
	Kajian Sosial Determinan Kesehatan Ibu dan Anak	x	√	x	√	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√
		Kajian Sosial Determinan Kesehatan Ibu dan Anak	x	√	x	√
	Persentase balita yang mendapat layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√
		Kajian Sosial Determinan	x	√	x	√


--

	Kesehatan Ibu dan Anak					
Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
	Kajian Sosial Determinan Kesehatan Ibu dan Anak	x	√	x	√	
Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	


--

	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
	Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	

belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya a road map reformasi birokrasi 2020-2024					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	cakupan bayi mendapat asi eksklusif	Evaluasi Program Home Care dan Telemedicine di Kota Makassar	x	x	√	√	
								persentase posyandu aktif		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai posyandu aktif di kota Makassar
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat miskin	Perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan, yang tepat sasaran	Persentase angka kemiskinan	Sosial	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		x	x	x	x	
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Tumpang tindihnya pendataan dan program penanganan kemiskinan						Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sosial Media Jaringan Komunikasi ( <i>Communication Network</i> ) untuk Program Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang Anak Jalanan di Kota Makassar	√	x	x	√	



Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat		
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat		
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Tumpang tindihnya pendataan dan program penanganan kemiskinan		
belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya road map reformasi birokrasi 2020-2024		

Pemberdayaan Perempuan	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase kelurahan ramah anak		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai kelurahan ramah anak
Pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Konsep Pengemangan Logistik dan <i>Supply Chain</i> untuk Strategi Ketahanan Pangan Kota Makassar	x	√	x	√	
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai implementasi rencana kelitbangan
		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Pembuatan Peraturan Walikota Makassar tentang	x	√	x	√	

							Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan					
							Peraturan Walikota Makassar tentang Agent of Innovation	x	√	x	x	
							Naskah Akademik dan Ranperda BRIDA Kota Makassar	x	√	x	x	
							Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	x	√	x	√	Perlunya dilakukan riset mengenai implementasi rencana kelitbangan
							Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di kota Makassar	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai kebijakan inovasi yang diterapkan di Kota Makassar

Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya link and match antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan tenaga kerja	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital	Tingkat pengangguran terbutkan (TPT)	Ketenagakerjaan	Program Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota Makassar		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota Makassar
					Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)			Jumlah peluang kerja dan peluang bisnis baru	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Makassar	√	x	x	√	
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tenaga kerja bersertifikat kompetensi
								tingkat produktivitas tenaga kerja		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai tingkat produktivitas tenaga kerja
						jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor ketenagakerjaan			x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai peserta pelatihan skill training gratis sektor	



											training gratis sektor UMKM			
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata lokal				Pariwisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor pariwisata		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor pariwisata
								Persentase SDM pariwisata yang mendapat sertifikasi		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai SDM pariwisata yang mendapat sertifikasi
								Persentase SDM ekonomi kreatif yang mendapat peningkatan kapasitas		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai SDM ekonomi kreatif yang mendapat peningkatan kapasitas
Naiknya angka kemiskinan	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan



							Incorporated					
							Studi Kelayakan Bisnis Pembentukan Makassar Incorporated	√	x	x	√	
							Kajian Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar	x	√	x	√	
						Persentase penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring Tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (Sismonteptra)		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring Tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (Sismonteptra)
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata lokal			Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai cagar budaya yang dilestarikan

							Program pengelolaan permuseuman	Persentase koleksi museum kota makassar yang terawat dengan baik		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai koleksi museum kota makassar yang terawat dengan baik
								Jumlah pengunjung museum kota Makassar		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Jumlah pengunjung museum kota Makassar
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata lokal				Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Tingkat hunian akomodasi		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Tingkat hunian akomodasi
								Jumlah destinasi wisata berstandar nasional		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Jumlah destinasi wisata berstandar nasional
Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraknya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraknya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi	Penguatan aktifitas ekonomi pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi	Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita	Perdagangan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota Makassar	Kajian Potensi UMKM Lorong Wisata di Kota Makassar	x	√	x	√	





							Pemanfaat an Sumber Daya Budaya Sebagai Objek dan Destinasi Wisata Sejarah Budaya di Kota Makassar	√	x	x	√		
						Perikanan dan pertanian	Program penyediaan dan pengemban gan sarana pertanian	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
								Produktivitas pertanian per hektar per tahun	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Produktivitas pertanian per hektar per tahun
								Cakupan pengawasan mutu pakan dan produksi benih/bibit ternak	x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Cakupan pengawasan mutu pakan dan produksi benih/bibit ternak

Naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat	Belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat	Kegiatan ekonomi lebih dominan pada sektor padat modal				Ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Ketersediaan energi dan protein perkapita
								Jumlah lorong garden dan lorong wisata		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Jumlah lorong garden dan lorong wisata
								Skor pola pangan harapan		x	x	x	x	Perlunya dilakukan riset mengenai Skor pola pangan harapan

Sumber: Hasil analisis Tim Riset, 2023

Keterangan:

√ = sudah dilakukan riset

x = tidak pernah dilakukan riset

Kuning = rekomendasi

## **B. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah**

Pengembangan produk unggulan daerah dan solusi untuk permasalahan utama dalam suatu wilayah, seperti Kota Makassar, melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi, adalah langkah penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor industri, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan produk baru. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pengembangan produk unggulan dan penyelesaian permasalahan utama melalui ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar yaitu:

Pertama, melakukan penelitian dan analisis mendalam untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menjadi produk unggulan dan juga mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu diselesaikan melalui inovasi.

Kedua, membangun kemitraan erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri. Kemitraan ini dapat memfasilitasi kolaborasi dalam penelitian, pengembangan, dan implementasi inovasi.

Ketiga, investasi dalam pembangunan dan perawatan fasilitas riset yang diperlukan, seperti laboratorium, pusat inovasi, dan infrastruktur teknologi tinggi lainnya.

Keempat, menyediakan dukungan keuangan, pembebasan pajak, insentif fiskal, dan bantuan pendanaan lainnya kepada pelaku riset, inovator, dan industri yang terlibat dalam pengembangan produk unggulan dan solusi permasalahan.

Kelima, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang riset dan inovasi.

Keenam, membangun jaringan kolaborasi antara semua pihak terkait, baik dari dalam maupun luar daerah, guna memperluas akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan pasar. Dan ketujuh, melakukan kampanye pemasaran dan promosi aktif untuk produk unggulan daerah melalui berbagai saluran, seperti pameran dagang, platform online, dan media sosial.

Terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres pengembangan produk unggulan dan implementasi solusi permasalahan, serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar, dapat berkembang menjadi pusat yang produktif dan berdaya saing tinggi, menghasilkan produk unggulan yang inovatif, serta memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di kota makassar secara detail dapat dilihat pada tabel 5.2.

**Tabel 5.2 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar**

No	Program Prioritas/Prioritas Utama/Produk Unggulan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab	Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah													
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global								
I	1	1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Gerakan "Semua Harus Sekolah"	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	Pengembangan Kurikulum Inovatif: Balitbangda akan berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan kurikulum inovatif yang mendukung gerakan "Semua Harus Sekolah," termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan.	1	Peningkatan Kapasitas SDM: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan stafnya dalam bidang riset, inovasi, dan pendidikan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung program "Semua Harus Sekolah."	1	Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah untuk merancang program inovatif yang mendukung tujuan "Semua Harus Sekolah."	1	Mendorong Inovasi Pendidikan: Balitbangda akan mempromosikan budaya inovasi dalam sistem pendidikan, mendorong penerapan metode pengajaran yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	1	Koordinasi Antar Sektor: Balitbangda akan berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara berbagai sektor, seperti pendidikan, teknologi, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan terpadu.	1	Pemantauan Terhadap Tren Pendidikan Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren pendidikan global, termasuk penggunaan teknologi dan metode pembelajaran inovatif, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks "Semua Harus Sekolah."



1	2	Perkuatan Keimanan Umat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	Pemantapan Kerangka Kebijakan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga agama dan tokoh-tokoh keagamaan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan.	1	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Balitbangda akan mengembangkan program pelatihan untuk memperkuat kapasitas pegawai dalam mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dalam pengembangan produk unggulan dan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi umat.	1	Kemitraan dengan Pemuka Agama: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh agama dan pemuka agama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang relevan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	1	Peningkatan Kesadaran Keagamaan: Balitbangda akan merancang kampanye budaya yang mendukung peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, melalui inovasi dalam metode komunikasi dan pendidikan.	1	Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga agama, pendidikan, dan bisnis, dalam mengembangkan produk unggulan yang berhubungan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	1	Pengenalan Inovasi Internasional: Balitbangda akan memantau perkembangan inovasi dalam bidang keagamaan dan memperkenalkan praktik-praktik terbaik internasional yang relevan dengan pengembangan produk unggulan berbasis keimanan.
---	---	-------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--



1	3	1.000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi			1	Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan akademisi untuk merumuskan pedoman beasiswa yang komprehensif dan terukur, termasuk kriteria seleksi, tahapan, dan indikator prestasi.	1	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Balitbangda akan merancang program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staf dan pegawai dalam mengelola program beasiswa, termasuk keterampilan pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan.	1	Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa-siswa berprestasi dari lorong-lorong tertentu.	1	Penanaman Semangat Berprestasi: Balitbangda akan meluncurkan kampanye budaya yang mendorong semangat berprestasi di kalangan anak-anak lorong melalui program beasiswa ini, termasuk pembinaan karakter dan nilai-nilai positif.	1	Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, tokoh-tokoh lorong, dan komunitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program beasiswa.	1	Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan studi banding internasional untuk memahami praktik terbaik dalam pelaksanaan program beasiswa serupa, sehingga mendukung pencapaian target prestasi yang lebih tinggi.
1	4	10.000 Beasiswa Skill Training Gratis	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	1	Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam menyusun pedoman beasiswa skill training, termasuk kriteria seleksi, jadwal penerimaan, tahapan seleksi, dan indikator keberhasilan.	1	Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merancang program pelatihan bagi staf dan pegawai terkait pelaksanaan program beasiswa skill training. Hal ini meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi program, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan.	1	Kemitraan dengan Industri: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan industri di Kota Makassar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	1	Penumbuhan Budaya Belajar: Balitbangda akan menginisiasi kampanye budaya yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat, dengan mengikuti pelatihan skill training untuk peningkatan kualifikasi dan peluang kerja.	1	Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.	1	Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga													
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UMKM													
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata												
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Dan Pertanian												
1	5	Percepatan Tata Kelola Pemerintahan "Sombere Dan Smart" Bersih Dari Indikasi Korupsi	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menyusun kebijakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan mengandung prinsip anti-korupsi.	1	Penguatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas pegawai dalam hal etika pemerintahan dan manajemen tata kelola yang baik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	1	Kemitraan dengan Lembaga Anti-Korupsi: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga anti-korupsi untuk mendapatkan panduan dan dukungan dalam melaksanakan program tata kelola pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.	1	Pembentukan Budaya Integritas: Balitbangda akan mendorong penanaman nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat, melalui kampanye, pelatihan, dan sosialisasi.	1	Kolaborasi dengan Stakeholder Lokal: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lokal untuk menyelaraskan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi.	1	Melibatkan Praktik Terbaik Global: Balitbangda akan melakukan studi perbandingan dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks Kota Makassar.
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			2	Pengembangan Tim Riset: Balitbangda akan membentuk tim khusus yang berfokus pada analisis dan penelitian terkait tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih cerdas.								

1	6	Menuju PAD Rp. 2 Triliun	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1	Penyusunan Kebijakan Pendukung: Balitbangda akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan produk unggulan dan peningkatan PAD.	1	Penguatan Kelembagaan: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas dan struktur organisasi untuk mengelola program pengembangan ekosistem riset dan inovasi, termasuk rekrutmen tenaga ahli dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai.	1	Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri untuk mengakselerasi pengembangan produk unggulan dan mendukung peningkatan PAD.	1	Mendorong Budaya Inovasi: Melalui kampanye dan sosialisasi, Balitbangda akan mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam semua lapisan masyarakat untuk merangsang pengembangan produk unggulan.	1	Kolaborasi Antar Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kritis yang dapat dipecahkan melalui inovasi.	1	Melihat Peluang Global: Balitbangda akan mengidentifikasi tren global dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat meningkatkan PAD.
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2	Infrastruktur Riset: Membangun atau meningkatkan fasilitas riset dan laboratorium untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk unggulan.	2	Pengembangan Keterampilan: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk pegawai Balitbangda guna meningkatkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengembangan produk.								

1	7	Menuju Insentif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta Dan Perkuat Fungsi RT/RW Dan Penasehat Walikota Serta Para Local Influencer	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan	1	Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	1	Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	1	Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset, universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	1	Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	1	Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW, dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.
					2	Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	2	Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.							

1	8	Kelurahan Menjadi Pusat Pelayanan Publik Yang "Sombere Dan Smart"	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	1	Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	1	Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset, universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	1	Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.	1	Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	1	Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW, dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan	2	Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	2	Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.								
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Can Pencatatan Sipil												
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP												

II	2	1	Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Dan Ekonomi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Pembuatan Kebijakan Inovasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan produk dan inisiatif inovatif terkait imunitas kesehatan dan ekonomi.	1	Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi, termasuk pengetahuan tentang imunitas kesehatan dan manajemen ekonomi.	1	Kolaborasi dengan Institusi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan rumah sakit, universitas, dan lembaga kesehatan lainnya untuk berkolaborasi dalam riset kesehatan dan pengembangan produk imunitas.	1	Promosi Budaya Sehat: Balitbangda akan mengadakan kampanye dan acara yang mendorong budaya hidup sehat dan edukasi masyarakat tentang pentingnya imunitas kesehatan.	1	Pusat Informasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan mendukung pendirian pusat informasi di kelurahan-kelurahan yang memberikan akses ke informasi tentang imunitas kesehatan dan peluang ekonomi.	1	Studi Komparatif Internasional: Balitbangda akan melakukan studi komparatif internasional untuk memahami praktik-praktik terbaik dalam pengembangan imunitas kesehatan dan ekonomi.
----	---	---	---	--	-----------------	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

				2	Infrastruktur Laboratorium dan Pusat Inovasi: Balitbangda akan menyediakan fasilitas laboratorium dan pusat inovasi untuk mendukung riset dan pengembangan produk baru dalam rangka mendukung imunitas kesehatan dan ekonomi.	2	Pengembangan Keterampilan Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan pelatihan keterampilan riset dan inovasi kepada warga untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan produk unggulan.	2	Kemitraan dengan Pelaku Ekonomi: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi.	2	Inovasi dalam Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan tentang imunitas kesehatan dan ekonomi dalam kurikulum.	2	Koordinasi Program: Balitbangda akan berperan sebagai koordinator antara program-program yang terkait dengan imunitas kesehatan dan ekonomi, memastikan sinergi dan efektivitas.	2	Jaringan Internasional: Balitbangda akan menjalin hubungan dengan lembaga riset dan inovasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--

	2	2	Perkuat Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1	Kebijakan Riset Kesehatan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung riset kesehatan, termasuk pengembangan produk-produk unggulan di bidang kesehatan.	1	Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi dan mengembangkan bakat serta kemampuan internal staf dalam bidang riset dan inovasi terkait kesehatan. Ini meliputi pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemberian sumber daya yang dibutuhkan.	1	Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan erat dengan perguruan tinggi kesehatan di wilayah untuk mengarahkan riset dan inovasi ke solusi-solusi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.	1	Mendorong Budaya Inovasi: Balitbangda akan mengadakan program-program pendidikan dan kesadaran untuk masyarakat dan pelaku kesehatan agar mengadopsi budaya inovasi dalam upaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.	1	Forum Kolaborasi Kesehatan: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk merumuskan strategi terpadu dalam memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan.	1	Mengadopsi Inovasi Global: Balitbangda akan mengikuti tren dan perkembangan global dalam bidang kesehatan dan menerapkan praktik terbaik serta teknologi terkini yang relevan dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
--	---	---	--	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

				2	Infrastruktur Riset Kesehatan: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan untuk penelitian dan inovasi di sektor kesehatan, termasuk fasilitas laboratorium dan teknologi medis terkini.	2	Penguatan Laboratorium dan Fasilitas: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset dan rumah sakit untuk memperkuat infrastruktur laboratorium serta fasilitas penelitian terkait kesehatan. Hal ini akan memungkinkan pelaksanaan penelitian berkualitas tinggi.	2	Kolaborasi dengan Industri Farmasi dan Kesehatan: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan industri farmasi dan kesehatan untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang mendukung penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.					
--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

2	3	Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	1	Pengembangan Kebijakan BUMD: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung transformasi BUMD dalam rangka penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	1	Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation. Pelatihan dan pendidikan akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.	1	Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	1	Penguatan Budaya Inovasi: Balitbangda akan merancang program untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi BUMD dan Makassar Incorporation, sehingga mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi baru.	1	Forum Kolaborasi Stakeholder: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	1	Analisis Trend Global: Balitbangda akan melakukan analisis tren global dalam pengelolaan BUMD dan perusahaan inklusi, serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan	2	Infrastruktur Penelitian dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur penelitian dan inovasi yang diperlukan, seperti laboratorium dan fasilitas prototyping, untuk	2	Peningkatan Daya Dukung Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset dan inovasi dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	2	Kemitraan dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan dengan tujuan program strategis Walikota Terpilih.	2	Promosi Kearifan Lokal: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya kota Makassar dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	2	Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan aspek-aspek riset dan inovasi dalam berbagai program strategis lainnya yang mendukung tujuan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	2	Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang telah berhasil melaksanakan transformasi serupa dalam penataan BUMD dan pendirian perusahaan inklusi.



					fasilitas prototyping, untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan.	pembentukan Makassar Incorporation.	strategis Walikota Terpilih.	pembentukan Makassar Incorporation.	pembentukan Makassar Incorporation.	
--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

	2	5	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota Dunia"	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1	Penyusunan Regulasi Inovasi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi di berbagai sektor yang relevan dengan "Makassar Kota Dunia".	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam riset dan inovasi. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pendidikan akan diberikan untuk memastikan keahlian yang relevan dan diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	1	Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk mendorong penelitian yang relevan dengan fokus "Makassar Kota Dunia".	1	Promosi Inovasi Budaya: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan budaya dan seni lokal yang unik dalam upaya mewujudkan "Makassar Kota Dunia".	1	Forum Kolaborasi: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan strategi dan langkah konkret dalam rangka Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	1	Pemantauan Tren Internasional: Balitbangda akan terus memantau tren inovasi dan pengembangan di tingkat global, serta menerapkan praktik terbaik yang relevan dalam konteks pembuatan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".
--	---	---	--	---	---------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--

				2	Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung riset dan inovasi, termasuk laboratorium dan ruang kolaborasi.	2	Pengembangan Tim Riset dan Inovasi: Balitbangda akan membentuk tim riset dan inovasi yang terdiri dari berbagai bidang keahlian untuk mendukung penyusunan regulasi dalam Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	2	Kerjasama dengan Industri: Balitbangda akan bekerja sama dengan sektor industri untuk mendorong penerapan inovasi dalam praktek bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap konsep "Makassar Kota Dunia".	2	Pendukung Kreativitas Masyarakat: Balitbangda akan merancang program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi budaya dan seni yang dapat memperkaya identitas "Makassar Kota Dunia".	2	Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu dalam mengintegrasikan aspek-aspek inovasi dan riset dalam berbagai program strategis lainnya yang berkontribusi pada visi "Makassar Kota Dunia".	2	Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan konsep serupa, untuk mendapatkan wawasan dan pelajaran berharga.
--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

	2	6	Percepatan Program Jagai Ana'Ta Dan Program Smart Millennial Serta Mitigasi Sosial	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Penyusunan Kebijakan Terkait: Balitbangda akan berperan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan "Jagai Ana'Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial, termasuk regulasi terkait riset dan inovasi.	1 Peningkatan Keahlian Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan dalam mendukung program-program "Jagai Ana'Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial. Pelatihan dan pengembangan staf akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas internal dalam aspek yang relevan.	1 Kerjasama dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dan industri terkait untuk mendukung implementasi program "Smart Millennial" serta mendorong inovasi teknologi.	1 Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mendorong pengembangan program-program yang mempromosikan budaya lokal dalam pelaksanaan "Jagai Ana'Ta", serta mendukung inovasi budaya dalam program "Smart Millennial".	1 Sinergi Antar Instansi: Balitbangda akan memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan program "Jagai Ana'Ta", "Smart Millennial", dan mitigasi sosial untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program.	1 Pemantauan Tren Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren dan inovasi global dalam pengembangan teknologi, kewirausahaan, dan mitigasi sosial, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.
--	---	---	--	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--

			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	2	Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi dalam pelaksanaan program-program tersebut, seperti laboratorium dan fasilitas penelitian.	2	Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan tenaga ahli yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program-program tersebut.	2	Kolaborasi dengan Lembaga Riset: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset nasional dan internasional untuk mendapatkan wawasan dan dukungan dalam pelaksanaan program-program tersebut.	2	Kegiatan Kreatif dan Seni: Balitbangda akan mendukung pengembangan kegiatan kreatif dan seni yang dapat memperkaya pengalaman masyarakat dalam menjalani program-program tersebut.	2	Integrasi Program Mitigasi Sosial: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan program mitigasi sosial ke dalam inisiatif yang ada, sehingga terjadi keterpaduan dalam penanganan masalah-masalah sosial.	2	Kemitraan Internasional: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan inovasi internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai tujuan program strategis tersebut.
2	7	Penataan Total Destinasi Budaya Dan Sejarah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan	1	Pengembangan Rencana Induk Destinasi Budaya: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk merumuskan rencana induk yang jelas untuk pengembangan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar.	1	Peningkatan Kompetensi Personel: Balitbangda akan melakukan pelatihan dan pengembangan untuk stafnya agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah Kota Makassar serta keterampilan dalam pengelolaan destinasi budaya.	1	Kemitraan dengan Komunitas Lokal: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, seniman, dan budayawan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi budaya.	1	Inovasi dalam Presentasi Budaya: Balitbangda akan mendorong inovasi dalam penyajian budaya dan sejarah, seperti penggunaan teknologi digital dan interaktif, untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung.	1	Koordinasi Antara Pihak Terkait: Balitbangda akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dinas pariwisata, pendidikan, dan budaya, untuk memastikan sinergi dalam pengembangan destinasi budaya.	1	Pemetaan dan Analisis Tren Pariwisata Budaya Global: Balitbangda akan melakukan pemetaan dan analisis terhadap tren pariwisata budaya global guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.

			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	2	Pembenahan Infrastruktur: Balitbangda akan berperan dalam merencanakan dan mengawasi pembenahan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman wisatawan di destinasi budaya.	2	Pengembangan Tim Ahli: Balitbangda akan mengumpulkan tim ahli dalam bidang budaya dan sejarah untuk memberikan masukan dan panduan dalam proses pengembangan destinasi budaya.	2	Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk merencanakan program-program edukasi tentang budaya dan sejarah bagi masyarakat dan wisatawan.	2	Pengembangan Acara Budaya Kreatif: Balitbangda akan merancang dan mendukung acara budaya kreatif yang melibatkan masyarakat dan merayakan kekayaan budaya Kota Makassar.	2	Pusat Informasi Destinasi Budaya: Balitbangda akan merancang dan mengelola pusat informasi destinasi budaya yang memberikan panduan lengkap bagi wisatawan.	2	Promosi Internasional: Balitbangda akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mempromosikan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar di tingkat internasional.
2	8	Penguatan City Branding Dan Peningkatan Festival Dan MICE Bulanan Dalam Skala Nasional Dan Internasional	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	Perumusan Kebijakan Event Management: Balitbangda akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan acara MICE dan festival dalam skala nasional dan internasional.	1	Pelatihan Keterampilan Inovasi: Balitbangda akan mengembangkan program pelatihan keterampilan inovasi untuk masyarakat dan pelaku usaha, termasuk pelatihan manajemen acara, branding, dan pengelolaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).	1	Kemitraan dengan Pihak Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan event organizer dan industri pariwisata, untuk bersama-sama mengembangkan acara MICE dan festival yang menarik.	1	Inovasi dalam Konsep Acara: Balitbangda akan mendorong penerapan inovasi dalam konsep dan pelaksanaan acara MICE dan festival untuk menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan bagi peserta.	1	Forum Kolaborasi Acara: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai pihak terkait penyelenggaraan acara MICE dan festival untuk memastikan sinergi dan efektivitas.	1	Studi Pasar Internasional: Balitbangda akan melakukan studi pasar internasional untuk mengidentifikasi tren terbaru dalam penyelenggaraan acara MICE dan festival, serta menganalisis potensi pasar.

				Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	2	Infrastruktur dan Pusat Konvensi: Balitbangda akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan acara MICE dan festival dalam skala besar.	2	Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kemampuan internal dalam mengelola dan mendukung acara-acara MICE skala besar, termasuk aspek pemasaran, logistik, dan teknis	2	Jaringan Industri Kreatif: Balitbangda akan bekerja sama dengan pelaku industri kreatif lokal dalam merancang acara dan festival yang menggabungkan unsur seni, budaya, dan teknologi.	2	Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mempromosikan budaya lokal Kota Makassar melalui acara MICE dan festival, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peserta.	2	Koordinasi Agenda Event: Balitbangda akan berperan dalam koordinasi jadwal dan agenda acara MICE dan festival di seluruh kota, sehingga terjadi distribusi yang seimbang dan optimal.	2	Partisipasi dalam Event Internasional: Balitbangda akan mendorong partisipasi dalam event MICE dan festival internasional sebagai platform untuk mempromosikan Kota Makassar dan membangun jaringan global.
--	--	--	--	---------------------------------	------------------	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

Sumber: Hasil analisis Tim Riset, 2023

## BAB VI

### PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR

#### A. Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

Bagian ini membahas dengan rinci sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti yang diadopsi dan dieksekusi oleh pemerintah kota untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan bukti empiris yang valid. Sasaran strategis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk unggulan daerah hingga penyelesaian permasalahan prioritas, serta upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan berbasis bukti, Kota Makassar bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien, transparan, dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam Bagian ini, akan diuraikan secara detail sasaran strategis yang diidentifikasi oleh Balitbangda Kota Makassar, serta bagaimana fokus kebijakan berbasis bukti diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Penekanan akan diberikan pada proses identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat.

Langkah-langkah strategis ini membentuk dasar peta jalan riset dan inovasi di Kota Makassar yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan berbasis bukti, Kota Makassar bertekad untuk menjadi contoh dalam pengambilan keputusan yang cerdas, terinformasi, dan berdampak positif bagi perkembangan kota serta kesejahteraan masyarakatnya. Adapun sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di kota makassar tahun 2024-2026 cluster sosial pemerintahan dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1 Matriks Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) Cluster Sosial Pemerintahan di Kota Makassar Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis	Fokus Kebijakan Berbasis Bukti ( <i>Evidence Based Policy</i> )	Penanggung Jawab	Usulan Riset Tahun Pelaksanaan			Bentuk Pelaksanaan
			2024	2025	2026	
<b>Fokus Utama Berdasarkan Kesesuaian Bidang Sosial Pemerintahan</b>						
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Transformasi infrastruktur pendidikan menuju aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang optimal di Kota Makassar	Dinas Pendidikan dan Balitbangda	R,D	D	E	Swakelola/Hibah
	Pengembangan Model Kolaborasi Pemberian Beasiswa antara Dunia Usaha dan Institusi Pendidikan untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Dinas Pendidikan dan Balitbangda	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas dalam Upaya Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Dinas Pendidikan dan Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Strategi peningkatan angka budaya baca di kota Makassar	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan di kota Makassar	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Berdasarkan Sertifikasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan di Kota Makassar	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Kelompok Masyarakat	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar	R	D	E	Swakelola/Hibah

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi Penggunaan Produk UMKM Lokal dalam Kegiatan Pemerintahan sebagai Pendorong Peningkatan Daya Beli Masyarakat	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	R,D	E		Swakelola/Hibah
	Pengembangan model kolaborasi dengan dunias usaha, industri dan lembaga pelatihan kerja untuk peningkatan daya beli masyarakat	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Strategi peningkatan wirausaha baru ( <i>start-up</i> ) di kota Makassar	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kualitas pembinaan kelompok nelayan dalam rangka mendorong peningkatan daya beli masyarakat	Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
Terwujudnya pelayanan publik yang “Sombere dan Smart”	Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik di tingkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Dinas PU, Seluruh Kecamatan, Disdukcapil, , Balitbangda	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standardisasi layanan publik	BKPSDMD, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>	Diskominfo, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Analisis kesesuaian Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026	Bappeda, Balitbangda	E	R	D	Swakelola/Hibah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kajian road map reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar	Diskominfo, Bag Hukum, Bag Ortala, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Balitbangda, Inspektorat, Seluruh Kecamatan	D,E	D	P	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapasitas asesor internal	Bag Otrala, Bappeda, Inspektorat, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Bappeda, Inspektorat, Bag Tata Pemerintahan, Bag Ortala, Bag Hukum dan HAM, Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapabilitas SDM	BKPSDMD, Bag Ortala, Seluruh Kecamatan, Balitbangda	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Diskominfo, Bapenda, BPKAD, Bappeda, Balitbangda Seluruh Kecamatan	D	P	E	Swakelola/Hibah
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas masyarakat	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dna rumah sakit umum daerah	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemerataan tenaga medis	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi posyandu sebagai pilar utama meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan,	R	D	E	Swakelola/Hibah

Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat miskin		Balitbangda, Seluruh Kecamatan				
	perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan lanjut usia terlantar	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan gelandangan/pengemis	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Kajian perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga rentan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D,E	E	R	Swakelola/Hibah
	Optimalisasi kelurahan ramah anak	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R, D	E	P	Swakelola/Hibah
	Peningkatan Mutu dan Kualitas Hasil Riset serta Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D	P	E	Swakelola/Hibah

Optimalisasi layanan antar kerja bagi tenaga kerja di kota Makassar	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kota Makassar	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi tenaga kerja di Kota Makassar	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D	E	P	Swakelola/Hibah
Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi UMKM	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas	D, E	P	E	Swakelola/Hibah

		Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan				
	Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi pelaku usaha di sektor pariwisata	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D,E	P	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kapasitas bagi SDM ekonomi kreatif	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Manajemen proyek konstruksi pemerintah kota Makassar	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Pengelolaan pengadaan berbasis metode kompetitif	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah

	Efektifitas penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (sismontepra)	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan daya tarik sektor pariwisata	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi	Penguatan city branding (citra kota)	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D	P	E	Swakelola/Hibah
	Pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi sektor industri	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas	D, E	P	E	Swakelola/Hibah

		ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan				
	Pemanfaatan dan perlindungan HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	R	D	E	Swakelola/Hibah
	Pengembangan sarana pertanian di Kota Makassar	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan	D,E	P	E	Swakelola/Hibah
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan				Swakelola/Hibah

*Sumber: Hasil analisis Tim Riset, 2023*

Keterangan:

R= Riset      D= Development

E= Evaluasi      P= Penerapan

## **B. Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar, Terutama Terkait Pengembangan Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah**

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, program strategis Pemerintah Kota Makassar, Balitbangda memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing secara berkelanjutan, mengembangkan ekosistem riset dan inovasi dan merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang berfokus pada pengembangan produk unggulan daerah serta penyelesaian permasalahan prioritas yang dihadapi oleh kota. Bagian ini menguraikan secara rinci sasaran strategis dan fokus utama yang diarahkan pada pengembangan ekosistem riset dan inovasi, dengan penekanan pada pengembangan produk unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

Sasaran strategis ini mengarah pada penguatan kapasitas riset dan inovasi di Kota Makassar, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan produk unggulan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, fokus utama adalah mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan serta merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengatasi permasalahan prioritas yang dihadapi oleh kota.

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi, Kota Makassar bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor industri, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif yang didukung oleh bukti empiris dan memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Bagian ini juga akan dijelaskan dengan rinci (lihat tabel 6.2) tentang sasaran strategis yang ditekankan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar, serta bagaimana fokus pengembangan ekosistem tersebut akan diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Rincian langkah-langkah konkret, termasuk identifikasi potensi unggulan daerah, kolaborasi lintas sektor, pengembangan infrastruktur riset, dan pendekatan inovatif dalam mengatasi permasalahan prioritas, akan dipaparkan dengan tujuan menghasilkan kebijakan yang berlandaskan pada bukti empiris dan mampu menghadirkan dampak positif bagi perkembangan Kota Makassar.

Tabel 6.2 Matriks Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar, Terutama Terkait Pengembangan Unggulan Daerah dan/atau Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Cluster Sosial Pemerintahan Tahun 2024-2026

No	Program Prioritas Utama/ Isu Utama/ Produk Unggulan		Indikator Program	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Indikator	Target Tahun			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
						2024	2025	2026		
I	1	1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Gerakan "Semua Harus Sekolah"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>					Dinas Pendidikan, Balitbangda
					Pengembangan Kurikulum Inovatif: Balitbangda akan berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan kurikulum inovatif yang mendukung gerakan "Semua Harus Sekolah," termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	
					Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengembangkan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	100%
					<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>					
				Peningkatan Kapasitas SDM: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan stafnya dalam bidang riset, inovasi, dan pendidikan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung program "Semua Harus Sekolah."	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	100%	


Pengembangan Keahlian: Balitbangda akan membantu mengidentifikasi keahlian yang diperlukan dalam pendidikan dan merancang program pelatihan yang relevan untuk guru dan tenaga pendidik.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah untuk merancang program inovatif yang mendukung tujuan "Semua Harus Sekolah."	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
Pemberdayaan Komunitas Pendidikan: Balitbangda akan mendukung pembentukan komunitas pendidikan yang melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih baik.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
Mendorong Inovasi Pendidikan: Balitbangda akan mempromosikan budaya inovasi dalam sistem pendidikan, mendorong penerapan metode pengajaran yang kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	


Pengenalan Teknologi dalam Pendidikan: Balitbangda akan mengadakan pelatihan dan kampanye untuk memperkenalkan teknologi kepada guru dan siswa sehingga mereka dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
Koordinasi Antar Sektor: Balitbangda akan berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara berbagai sektor, seperti pendidikan, teknologi, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan terpadu.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
Pengembangan Riset Kolaboratif: Balitbangda akan mendorong kolaborasi antara lembaga riset dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
Pemantauan Terhadap Tren Pendidikan Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren pendidikan global, termasuk penggunaan teknologi dan metode pembelajaran inovatif, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks "Semua Harus Sekolah."	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Jejaring Internasional: Balitbangda akan menjalin kemitraan internasional dalam bidang pendidikan untuk mendapatkan wawasan dan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	2	Perkuatan Keimanan Umat	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Pemantapan Kerangka Kebijakan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga agama dan tokoh-tokoh keagamaan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda

			Pengembangan Infrastruktur: Balitbangda akan memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan produk unggulan yang berhubungan dengan keimanan, seperti pusat-pusat keagamaan dan tempat ibadah, tersedia dan terintegrasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Balitbangda akan mengembangkan program pelatihan untuk memperkuat kapasitas pegawai dalam mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dalam pengembangan produk unggulan dan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi umat.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kemitraan dengan Pemuka Agama: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh agama dan pemuka agama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang relevan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						

				Peningkatan Kesadaran Keagamaan: Balitbangda akan merancang kampanye budaya yang mendukung peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, melalui inovasi dalam metode komunikasi dan pendidikan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga agama, pendidikan, dan bisnis, dalam mengembangkan produk unggulan yang berhubungan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pengenalan Inovasi Internasional: Balitbangda akan memantau perkembangan inovasi dalam bidang keagamaan dan memperkenalkan praktik-praktik terbaik internasional yang relevan dengan pengembangan produk unggulan berbasis keimanan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	3	1.000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						

			Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan akademisi untuk merumuskan pedoman beasiswa yang komprehensif dan terukur, termasuk kriteria seleksi, tahapan, dan indikator prestasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Balitbangda akan merancang program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staf dan pegawai dalam mengelola program beasiswa, termasuk keterampilan pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa-siswa berprestasi dari lorong-lorong tertentu.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√		
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Penanaman Semangat Berprestasi: Balitbangda akan meluncurkan kampanye budaya yang mendorong semangat berprestasi di kalangan anak-anak lorong melalui program beasiswa	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				ini, termasuk pembinaan karakter dan nilai-nilai positif.						
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, tokoh-tokoh lorong, dan komunitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program beasiswa.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan studi banding internasional untuk memahami praktik terbaik dalam pelaksanaan program beasiswa serupa, sehingga mendukung pencapaian target prestasi yang lebih tinggi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	4	10.000 Beasiswa Skill Training Gratis	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Ketenagakerjaan
				Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam menyusun pedoman beasiswa skill training, termasuk kriteria seleksi, jadwal penerimaan, tahapan seleksi, dan indikator keberhasilan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Pemuda Dan Olahraga

				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>					Dinas Koperasi UMKM
			Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merancang program pelatihan bagi staf dan pegawai terkait pelaksanaan program beasiswa skill training. Hal ini meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi program, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>					Dinas Pariwisata
			Kemitraan dengan Industri: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan industri di Kota Makassar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Perikanan Dan Pertanian
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>					
			Penumbuhan Budaya Belajar: Balitbangda akan menginisiasi kampanye budaya yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat, dengan mengikuti pelatihan skill training untuk peningkatan kualifikasi dan peluang kerja.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	5	Percepatan Tata Kelola Pemerintahan "Sombere Dan Smart" Bersih Dari Indikasi Korupsi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Komunikasi Dan Informatika

			Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menyusun kebijakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan mengandung prinsip anti-korupsi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Penguatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas pegawai dalam hal etika pemerintahan dan manajemen tata kelola yang baik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Pengembangan Tim Riset: Balitbangda akan membentuk tim khusus yang berfokus pada analisis dan penelitian terkait tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih cerdas.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kemitraan dengan Lembaga Anti-Korupsi: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga anti-korupsi untuk mendapatkan panduan dan dukungan dalam melaksanakan program tata kelola pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						

			Pembentukan Budaya Integritas: Balitbangda akan mendorong penanaman nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat, melalui kampanye, pelatihan, dan sosialisasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Kolaborasi dengan Stakeholder Lokal: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lokal untuk menyelaraskan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						

				Melibatkan Praktik Terbaik Global: Balitbangda akan melakukan studi perbandingan dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks Kota Makassar.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	6	Menuju PAD Rp. 2 Triliun	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Badan Pendapatan Daerah
				Penyusunan Kebijakan Pendukung: Balitbangda akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan produk unggulan dan peningkatan PAD.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Infrastruktur Riset: Membangun atau meningkatkan fasilitas riset dan laboratorium untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk unggulan.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Penguatan Kelembagaan: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas dan struktur organisasi untuk mengelola program pengembangan ekosistem riset dan inovasi, termasuk rekrutmen	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				tenaga ahli dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai.						
				Pengembangan Keterampilan: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk pegawai Balitbangda guna meningkatkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengembangan produk.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri untuk mengakselerasi pengembangan produk unggulan dan mendukung peningkatan PAD.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Mendorong Budaya Inovasi: Melalui kampanye dan sosialisasi, Balitbangda akan mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam semua lapisan masyarakat untuk merangsang pengembangan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						

				Kolaborasi Antar Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah kritis yang dapat dipecahkan melalui inovasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Melihat Peluang Global: Balitbangda akan mengidentifikasi tren global dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat meningkatkan PAD.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	7	Menuju Insentif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta Dan Perkuat Fungsi RT/RW Dan Penasehat Walikota Serta Para Local Influencer	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Seluruh Kecamatan
				Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda

					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						

				Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset, universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						

				Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW, dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
1	8	Kelurahan Menjadi Pusat Pelayanan Publik Yang "Sombere Dan Smart"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Seluruh Kecamatan
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
				Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Kependudukan Can Pencatatan Sipil
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
				Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset, universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						

				Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW, dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
II	2	1	Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Dan Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>					Dinas Kesehatan
					Pembuatan Kebijakan Inovasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan produk dan inisiatif inovatif terkait imunitas kesehatan dan ekonomi.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>

				Infrastruktur Laboratorium dan Pusat Inovasi: Balitbangda akan menyediakan fasilitas laboratorium dan pusat inovasi untuk mendukung riset dan pengembangan produk baru dalam rangka mendukung imunitas kesehatan dan ekonomi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi, termasuk pengetahuan tentang imunitas kesehatan dan manajemen ekonomi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Pengembangan Keterampilan Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan pelatihan keterampilan riset dan inovasi kepada warga untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kolaborasi dengan Institusi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan rumah sakit, universitas, dan lembaga kesehatan lainnya untuk berkolaborasi dalam riset kesehatan dan pengembangan produk imunitas.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

			Kemitraan dengan Pelaku Ekonomi: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Promosi Budaya Sehat: Balitbangda akan mengadakan kampanye dan acara yang mendorong budaya hidup sehat dan edukasi masyarakat tentang pentingnya imunitas kesehatan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Inovasi dalam Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan tentang imunitas kesehatan dan ekonomi dalam kurikulum.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Pusat Informasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan mendukung pendirian pusat informasi di kelurahan-kelurahan yang memberikan akses ke informasi tentang imunitas kesehatan dan peluang ekonomi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Koordinasi Program: Balitbangda akan berperan sebagai koordinator antara program-program yang terkait dengan imunitas kesehatan dan ekonomi, memastikan sinergi dan efektivitas.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Studi Komparatif Internasional: Balitbangda akan melakukan studi komparatif internasional untuk memahami praktik-praktik terbaik dalam pengembangan imunitas kesehatan dan ekonomi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Jaringan Internasional: Balitbangda akan menjalin hubungan dengan lembaga riset dan inovasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
2	2	Perkuat Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Kesehatan
				Kebijakan Riset Kesehatan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung riset kesehatan, termasuk pengembangan produk-produk unggulan di bidang kesehatan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
				Infrastruktur Riset Kesehatan: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan untuk penelitian dan inovasi di sektor kesehatan, termasuk fasilitas laboratorium dan teknologi medis terkini.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						

				Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi dan mengembangkan bakat serta kemampuan internal staf dalam bidang riset dan inovasi terkait kesehatan. Ini meliputi pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemberian sumber daya yang dibutuhkan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Penguatan Laboratorium dan Fasilitas: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset dan rumah sakit untuk memperkuat infrastruktur laboratorium serta fasilitas penelitian terkait kesehatan. Hal ini akan memungkinkan pelaksanaan penelitian berkualitas tinggi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan erat dengan perguruan tinggi kesehatan di wilayah untuk mengarahkan riset dan inovasi ke solusi-solusi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Kolaborasi dengan Industri Farmasi dan Kesehatan: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan industri farmasi dan kesehatan untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang mendukung penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Mendorong Budaya Inovasi: Balitbangda akan mengadakan program-program pendidikan dan kesadaran untuk masyarakat dan pelaku kesehatan agar mengadopsi budaya inovasi dalam upaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						

				Forum Kolaborasi Kesehatan: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk merumuskan strategi terpadu dalam memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Mengadopsi Inovasi Global: Balitbangda akan mengikuti tren dan perkembangan global dalam bidang kesehatan dan menerapkan praktik terbaik serta teknologi terkini yang relevan dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
2	3	Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Ketenagakerjaan
				Pengembangan Kebijakan BUMD: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung transformasi BUMD dalam rangka penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Perdagangan

			Infrastruktur Penelitian dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur penelitian dan inovasi yang diperlukan, seperti laboratorium dan fasilitas prototyping, untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Koperasi UMKM
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation. Pelatihan dan pendidikan akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
			Peningkatan Daya Dukung Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset dan inovasi dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

			Kemitraan dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan dengan tujuan program strategis Walikota Terpilih.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Penguatan Budaya Inovasi: Balitbangda akan merancang program untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi BUMD dan Makassar Incorporation, sehingga mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi baru.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Promosi Kearifan Lokal: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya kota Makassar dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Forum Kolaborasi Stakeholder: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan aspek-aspek riset dan inovasi dalam berbagai program strategis lainnya yang mendukung tujuan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	100%	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				100%	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Trend Global: Balitbangda akan melakukan analisis tren global dalam pengelolaan BUMD dan perusahaan inklusi, serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	100%	
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang telah berhasil melaksanakan transformasi serupa dalam penataan BUMD dan pendirian perusahaan inklusi.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	100%	
2	4	Penataan Total Sistem BUMD Dan Pembentukan Makassar Incorporation	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
				Pengembangan Kebijakan BUMD: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung transformasi BUMD dalam rangka penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

			Infrastruktur Penelitian dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur penelitian dan inovasi yang diperlukan, seperti laboratorium dan fasilitas prototyping, untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation. Pelatihan dan pendidikan akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Peningkatan Daya Dukung Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset dan inovasi dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						

			Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Kemitraan dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan dengan tujuan program strategis Walikota Terpilih.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Penguatan Budaya Inovasi: Balitbangda akan merancang program untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi BUMD dan Makassar Incorporation, sehingga mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi baru.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Promosi Kearifan Lokal: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya kota Makassar dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Forum Kolaborasi Stakeholder: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

			penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.						
			Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan aspek-aspek riset dan inovasi dalam berbagai program strategis lainnya yang mendukung tujuan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
			Analisis Trend Global: Balitbangda akan melakukan analisis tren global dalam pengelolaan BUMD dan perusahaan inklusi, serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang telah berhasil melaksanakan transformasi serupa dalam penataan BUMD dan pendirian perusahaan inklusi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

2	5	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota Dunia"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Bagian Hukum Sekretariat Daerah
				Penyusunan Regulasi Inovasi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi di berbagai sektor yang relevan dengan "Makassar Kota Dunia".	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung riset dan inovasi, termasuk laboratorium dan ruang kolaborasi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>		
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>							
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam riset dan inovasi. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pendidikan akan diberikan untuk memastikan keahlian yang relevan dan diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>		
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

		Pengembangan Tim Riset dan Inovasi: Balitbangda akan membentuk tim riset dan inovasi yang terdiri dari berbagai bidang keahlian untuk mendukung penyusunan regulasi dalam Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
		Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk mendorong penelitian yang relevan dengan fokus "Makassar Kota Dunia".	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		Kerjasama dengan Industri: Balitbangda akan bekerja sama dengan sektor industri untuk mendorong penerapan inovasi dalam praktek bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap konsep "Makassar Kota Dunia".	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
		Promosi Inovasi Budaya: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan budaya dan seni lokal yang unik dalam upaya mewujudkan "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

		Pendukung Kreativitas Masyarakat: Balitbangda akan merancang program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi budaya dan seni yang dapat memperkaya identitas "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
		Forum Kolaborasi: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan strategi dan langkah konkret dalam rangka Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu dalam mengintegrasikan aspek-aspek inovasi dan riset dalam berbagai program strategis lainnya yang berkontribusi pada visi "Makassar Kota Dunia".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
		Pemantauan Tren Internasional: Balitbangda akan terus memantau tren inovasi dan pengembangan di tingkat global, serta menerapkan praktik terbaik yang relevan dalam konteks pembuatan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan konsep serupa, untuk mendapatkan wawasan dan pelajaran berharga.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
2	6	Percepatan Program Jagai Ana'Ta Dan Program Smart Millenial Serta Mitigasi Sosial	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Penyusunan Kebijakan Terkait: Balitbangda akan berperan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan "Jagai Ana'Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial, termasuk regulasi terkait riset dan inovasi.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Sosial
				Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi dalam pelaksanaan program-program tersebut, seperti laboratorium dan fasilitas penelitian.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						

		Peningkatan Keahlian Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan dalam mendukung program-program "Jagai Ana'Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial. Pelatihan dan pengembangan staf akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas internal dalam aspek yang relevan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan tenaga ahli yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program-program tersebut.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
		Kerjasama dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dan industri terkait untuk mendukung implementasi program "Smart	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

		Millennial" serta mendorong inovasi teknologi.						
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		Kolaborasi dengan Lembaga Riset: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset nasional dan internasional untuk mendapatkan wawasan dan dukungan dalam pelaksanaan program-program tersebut.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
		Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mendorong pengembangan program-program yang mempromosikan budaya lokal dalam pelaksanaan "Jagai Ana'Ta", serta mendukung inovasi budaya dalam program "Smart Millennial".	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

		Kegiatan Kreatif dan Seni: Balitbangda akan mendukung pengembangan kegiatan kreatif dan seni yang dapat memperkaya pengalaman masyarakat dalam menjalani program-program tersebut.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
		Sinergi Antar Instansi: Balitbangda akan memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan program "Jagai Ana'Ta", "Smart Millennial", dan mitigasi sosial untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		Integrasi Program Mitigasi Sosial: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan program mitigasi sosial ke dalam inisiatif yang ada, sehingga terjadi keterpaduan dalam penanganan masalah-masalah sosial.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
		<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						

				Pemantauan Tren Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren dan inovasi global dalam pengembangan teknologi, kewirausahaan, dan mitigasi sosial, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Kemitraan Internasional: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan inovasi internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai tujuan program strategis tersebut.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
2	7	Penataan Total Destinasi Budaya Dan Sejarah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Kebudayaan
				Pengembangan Rencana Induk Destinasi Budaya: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk merumuskan rencana induk yang jelas untuk pengembangan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Kebudayaan
				Pembenahan Infrastruktur: Balitbangda akan berperan dalam merencanakan dan mengawasi pembenahan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman wisatawan di destinasi budaya.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda

					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>					
					Peningkatan Kompetensi Personel: Balitbangda akan melakukan pelatihan dan pengembangan untuk stafnya agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah Kota Makassar serta keterampilan dalam pengelolaan destinasi budaya.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>
					Pengembangan Tim Ahli: Balitbangda akan mengumpulkan tim ahli dalam bidang budaya dan sejarah untuk memberikan masukan dan panduan dalam proses pengembangan destinasi budaya.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>
					<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>					
					Kemitraan dengan Komunitas Lokal: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, seniman, dan budayawan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi budaya.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>
						Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>

				Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk merencanakan program-program edukasi tentang budaya dan sejarah bagi masyarakat dan wisatawan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Inovasi dalam Presentasi Budaya: Balitbangda akan mendorong inovasi dalam penyajian budaya dan sejarah, seperti penggunaan teknologi digital dan interaktif, untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Pengembangan Acara Budaya Kreatif: Balitbangda akan merancang dan mendukung acara budaya kreatif yang melibatkan masyarakat dan merayakan kekayaan budaya Kota Makassar.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Koordinasi Antara Pihak Terkait: Balitbangda akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dinas pariwisata, pendidikan, dan budaya, untuk memastikan sinergi dalam pengembangan destinasi budaya.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Pusat Informasi Destinasi Budaya: Balitbangda akan merancang dan mengelola pusat informasi destinasi budaya yang memberikan panduan lengkap bagi wisatawan.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pemetaan dan Analisis Tren Pariwisata Budaya Global: Balitbangda akan melakukan pemetaan dan analisis terhadap tren pariwisata budaya global guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Promosi Internasional: Balitbangda akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mempromosikan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar di tingkat internasional.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
2	8	Penguatan City Branding Dan Peningkatan Festival Dan MICE Bulanan Dalam Skala Nasional Dan Internasional	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Pariwisata
				Perumusan Kebijakan Event Management: Balitbangda akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan acara MICE dan festival dalam skala nasional dan internasional.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Dinas Kebudayaan
				Infrastruktur dan Pusat Konvensi: Balitbangda akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan acara MICE dan festival dalam skala besar.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	Balitbangda

					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>					
					Pelatihan Keterampilan Inovasi: Balitbangda akan mengembangkan program pelatihan keterampilan inovasi untuk masyarakat dan pelaku usaha, termasuk pelatihan manajemen acara, branding, dan pengelolaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>
						Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>
					Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kemampuan internal dalam mengelola dan mendukung acara-acara MICE skala besar, termasuk aspek pemasaran, logistik, dan teknis	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>
						Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>
					<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>					
					Kemitraan dengan Pihak Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan event organizer dan industri pariwisata, untuk bersama-sama mengembangkan acara MICE dan festival yang menarik.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>
						Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>

			Jaringan Industri Kreatif: Balitbangda akan bekerja sama dengan pelaku industri kreatif lokal dalam merancang acara dan festival yang menggabungkan unsur seni, budaya, dan teknologi.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Inovasi dalam Konsep Acara: Balitbangda akan mendorong penerapan inovasi dalam konsep dan pelaksanaan acara MICE dan festival untuk menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan bagi peserta.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mempromosikan budaya lokal Kota Makassar melalui acara MICE dan festival, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peserta.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Forum Kolaborasi Acara: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai pihak terkait penyelenggaraan acara MICE dan festival untuk memastikan sinergi dan efektivitas.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

				Koordinasi Agenda Event: Balitbangda akan berperan dalam koordinasi jadwal dan agenda acara MICE dan festival di seluruh kota, sehingga terjadi distribusi yang seimbang dan optimal.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Studi Pasar Internasional: Balitbangda akan melakukan studi pasar internasional untuk mengidentifikasi tren terbaru dalam penyelenggaraan acara MICE dan festival, serta menganalisis potensi pasar.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	√	√	√	<b>100%</b>	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	√	√	√	<b>100%</b>	

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023.

## **BAB VII**

### **RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR**

#### **A. Program dan Target Tahunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)**

Pada bagian ini diisi dengan penjabaran terhadap Sasaran Strategis dan fokus kebijakan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan tahunan secara rinci

**Tabel 7.1 Matriks Program Riset dan Inovasi di Kota Makassar Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) Cluster Sosial Pemerintahan Tahun 2024-2026**

Prioritas Permasalahan Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
				2024	2025	2026		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Transformasi infrastruktur pendidikan menuju aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang optimal di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
	Pengembangan Model Kolaborasi Pemberian Beasiswa antara Dunia Usaha dan Institusi Pendidikan untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
	Optimalisasi Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas dalam Upaya Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda

			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√		√	100%	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
	Strategi peningkatan angka budaya baca di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda
	Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda
	Optimalisasi Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Berdasarkan Sertifikasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Kelompok Masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	√	√	100%	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar	
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	√	√	100%	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi Penggunaan Produk UMKM Lokal dalam Kegiatan Pemerintahan sebagai Pendorong Peningkatan Daya Beli Masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
Pengembangan model kolaborasi dengan dunias usaha, industri dan lembaga pelatihan kerja untuk peningkatan daya beli masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
Strategi peningkatan wirausaha baru ( <i>start-up</i> ) di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda

			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
	Peningkatan kualitas pembinaan kelompok nelayan dalam rangka mendorong peningkatan daya beli masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
Terwujudnya pelayanan publik yang “Sombere dan Smart”	Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik di tingkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas PU, Seluruh Kecamatan, Disdukcapil, , Balitbangda
	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standardisasi layanan publik	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	BKPSDMD, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda
	Optimalisasi pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Diskominfo, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda

			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Diskominfo, Kecamatan, Bag Tata Balitbangda Seluruh Bagian Ortala, Pemerintahan,
	Analisis kesesuaian Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Bappeda, Balitbangda
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kajian road map reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Diskominfo, Bag Hukum, Bag Ortala, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Balitbangda, Inspektorat, Seluruh Kecamatan
	Peningkatan kapasitas asesor internal	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Bag Otrala, Bappeda, Inspektorat, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Bappeda, Inspektorat, Bag Tata Pemerintahan, Bag Ortala, Bag Hukum dan HAM, Balitbangda
	Peningkatan kapabilitas SDM	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	BKPSDMD, Bag Ortala, Seluruh Kecamatan, Balitbangda

	Digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Diskominfo, BPKAD, Balitbangda Kecamatan	Bapenda, Bappeda, Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Diskominfo, BPKAD, Balitbangda Kecamatan	Bapenda, Bappeda, Seluruh
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pemulihan kesehatan dan pematapan imunitas masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Seluruh
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Seluruh
	Peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemerataan tenaga medis	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Seluruh

			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
	Optimalisasi posyandu sebagai pilar utama meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat miskin	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh

perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan lanjut usia terlantar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan gelandangan/pengemis	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan,

							Balitbangda, Kecamatan	Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
Kajian perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga rentan	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
Optimalisasi kelurahan ramah anak	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh
Peningkatan Mutu dan Kualitas Hasil Riset serta Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Balitbangda, Kecamatan	DP2A, Dinas Pangan, Seluruh

Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Optimalisasi layanan antar kerja bagi tenaga kerja di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi tenaga kerja di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi UMKM	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi pelaku usaha di sektor pariwisata	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan kapasitas bagi SDM ekonomi kreatif	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Manajemen proyek konstruksi pemerintah kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengelolaan pengadaan berbasis metode kompetitif	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Efektifitas penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (sismontepa)	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan daya tarik sektor pariwisata	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi	Penguatan city branding (citra kota)	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi sektor industri	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pemanfaatan dan perlindungan HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif	Penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Pengembangan sarana pertanian di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	√	√	100%	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

*Sumber: Hasil analisis Tim Riset, 2023*

**Tabel 7.2 Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan Riset dan Inovasi di Kota Makassar Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Cluster Sosial Pemerintahan Tahun 2024**

Prioritas Permasalahan Daerah	Fokus Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Utama	Target	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
						2024		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Transformasi infrastruktur pendidikan menuju aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang optimal di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
	Pengembangan Model Kolaborasi Pemberian Beasiswa antara Dunia Usaha dan Institusi Pendidikan untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
Optimalisasi Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Balitbangda	

dalam Upaya Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Kota Makassar		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Balitbangda
Strategi peningkatan angka budaya baca di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda
Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda

						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
Optimalisasi Kualifikasi dan Jumlah Tenaga Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Berdasarkan Sertifikasi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Balitbangda
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Kelompok Masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar

							dan Perlindungan Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kesbangpol, Seluruh Kecamatan, Balitbangda Kota Makassar
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi Penggunaan Produk UMKM Lokal dalam Kegiatan Pemerintahan sebagai Pendorong Peningkatan Daya Beli Masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan

						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pertanian, Balitbangda
Pengembangan model kolaborasi dengan dunias usaha, industri dan lembaga pelatihan kerja untuk peningkatan daya beli masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan

						Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Pertanian, Balitbangda
Strategi peningkatan wirausaha baru ( <i>start-up</i> ) di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perikanan dan

						Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Pertanian, Balitbangda	
Peningkatan kualitas pembinaan kelompok nelayan dalam rangka mendorong peningkatan daya beli masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Perikanan dan Pertanian, Balitbangda	
Terwujudnya pelayanan publik yang “Sombere dan Smart”	Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik di tingkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dinas PU, Seluruh Kecamatan, Disdukcapil, , Balitbangda

Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standardisasi layanan publik	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	BKPSDMD, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda
Optimalisasi pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Diskominfo, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Diskominfo, Seluruh Kecamatan, Bagian Ortala, Bag Tata Pemerintahan, Balitbangda
Analisis kesesuaian Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda, Balitbangda

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kajian road map reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Diskominfo, Bag Hukum, Bag Ortala, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Balitbangda, Inspektorat, Seluruh Kecamatan
	Peningkatan kapasitas asesor internal	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bag Otrala, Bappeda, Inspektorat, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda, Inspektorat, Bag Tata Pemerintahan, Bag Ortala, Bag Hukum dan HAM, Balitbangda
	Peningkatan kapabilitas SDM	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	BKPSDMD, Bag Ortala, Seluruh Kecamatan, Balitbangda

							Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
	Digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Diskominfo, Bapenda, BPKAD, Bappeda, Balitbangda Seluruh Kecamatan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Diskominfo, Bapenda, BPKAD, Bappeda, Balitbangda Seluruh Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Peningkatan kapasitas dan kualitas serta pemerataan tenaga medis	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Optimalisasi posyandu sebagai pilar utama meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Kesehatan, DP2A, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat miskin	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

						Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan lanjut usia terlantar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan gelandangan/pengemis	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian perlindungan dan jaminan sosial bagi rumah tangga rentan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Optimalisasi kelurahan ramah anak	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

							Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
	Peningkatan Mutu dan Kualitas Hasil Riset serta Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dinas Sosial, DP2A, Dinas Ketahanan Pangan, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	dan dan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Optimalisasi layanan antar kerja bagi tenaga kerja di kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	dan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi tenaga kerja di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan dan Kepemudaan dan Olahraga	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan dan Kepemudaan dan Olahraga	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi UMKM	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

							Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	v	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi pelaku usaha di sektor pariwisata	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	v	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan kapasitas bagi SDM ekonomi kreatif	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Manajemen proyek konstruksi pemerintah kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	v	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	v	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengelolaan pengadaan berbasis metode kompetitif	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	v	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Efektifitas penyerapan realisasi anggaran melalui sistem monitoring tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran (sismonteptra)	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas

						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan daya tarik sektor pariwisata	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disnaker, Dispora, Dinas Koperasi & UKM DP2A, Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi	Penguatan city branding (citra kota)	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda,

						Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Seluruh Kecamatan
Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Kajian kebijakan pelatihan skill training gratis bagi sektor industri	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		1 Rekomendasi Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pemanfaatan dan perlindungan HAKI bagi pelaku ekonomi kreatif	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Pengembangan sarana pertanian di Kota Makassar	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	√	1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	√	1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Disperindag, Dispar, Dinas Kebudayaan, DP2, Dinas ketapang, Balitbangda, Seluruh Kecamatan

Sumber: Hasil analisis Tim Riset, 2023

## **B. Program dan Target Tahunan Pengembangan Produk Unggulan Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah**

Pada bagian ini diisi dengan penjabaran terhadap Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang merupakan hasil elaborasi tim riset yang berlandaskan pada dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan memperhatikan isu-isu strategi dan aktual pembangunan daerah Kota Makassar yang selanjutnya disusun dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun t atau berjalan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Kota Makassar (Pengembangan Produk Unggulan Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi) Cluster

Sosial Pemerintahan Tahun 2024

No	Program Prioritas Utama/ Isu Utama/ Produk Unggulan		Indikator Program	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2024	Satuan	Kinerja	Perangkat Daerah	
I	1	1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Gerakan "Semua Harus Sekolah"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>					Dinas Pendidikan	
					Pengembangan Kurikulum Inovatif: Balitbangda akan berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan kurikulum inovatif yang mendukung gerakan "Semua Harus Sekolah," termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengembangkan infrastruktur pendidikan yang memadai untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
					Peningkatan Kapasitas SDM: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan stafnya dalam bidang riset, inovasi, dan pendidikan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung program "Semua Harus Sekolah."	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pengembangan Keahlian: Balitbangda akan membantu mengidentifikasi keahlian yang	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		

				diperlukan dalam pendidikan dan merancang program pelatihan yang relevan untuk guru dan tenaga pendidik.						
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah untuk merancang program inovatif yang mendukung tujuan "Semua Harus Sekolah."	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pemberdayaan Komunitas Pendidikan: Balitbangda akan mendukung pembentukan komunitas pendidikan yang melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih baik.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Mendorong Inovasi Pendidikan: Balitbangda akan mempromosikan budaya inovasi dalam sistem pendidikan, mendorong penerapan metode pengajaran yang kreatif dan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

				interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.						
				Pengenalan Teknologi dalam Pendidikan: Balitbangda akan mengadakan pelatihan dan kampanye untuk memperkenalkan teknologi kepada guru dan siswa sehingga mereka dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Koordinasi Antar Sektor: Balitbangda akan berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara berbagai sektor, seperti pendidikan, teknologi, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan terpadu.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pengembangan Riset Kolaboratif: Balitbangda akan mendorong kolaborasi antara lembaga riset dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						

				Pemantauan Terhadap Tren Pendidikan Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren pendidikan global, termasuk penggunaan teknologi dan metode pembelajaran inovatif, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks "Semua Harus Sekolah."	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Jejaring Internasional: Balitbangda akan menjalin kemitraan internasional dalam bidang pendidikan untuk mendapatkan wawasan dan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
1	2	Perkuatan Keimanan Umat	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Pemantapan Kerangka Kebijakan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga agama dan tokoh-tokoh keagamaan untuk merumuskan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan produk unggulan yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan	



				Kemitraan dengan Pemuka Agama: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh agama dan pemuka agama dalam mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang relevan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
							√			
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Peningkatan Kesadaran Keagamaan: Balitbangda akan merancang kampanye budaya yang mendukung peningkatan kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, melalui inovasi dalam metode komunikasi dan pendidikan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga agama, pendidikan, dan bisnis, dalam mengembangkan produk unggulan yang berhubungan dengan keimanan dan nilai-nilai agama.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pengenalan Inovasi Internasional: Balitbangda akan memantau perkembangan inovasi dalam	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian,	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan	

				bidang keagamaan dan memperkenalkan praktik-praktik terbaik internasional yang relevan dengan pengembangan produk unggulan berbasis keimanan.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
1	3	1.000 Beasiswa Anak Lorong Berprestasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan akademisi untuk merumuskan pedoman beasiswa yang komprehensif dan terukur, termasuk kriteria seleksi, tahapan, dan indikator prestasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Balitbangda akan merancang program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staf dan pegawai dalam mengelola program beasiswa, termasuk keterampilan pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						

				Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa-siswa berprestasi dari lorong-lorong tertentu.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penanaman Semangat Berprestasi: Balitbangda akan meluncurkan kampanye budaya yang mendorong semangat berprestasi di kalangan anak-anak lorong melalui program beasiswa ini, termasuk pembinaan karakter dan nilai-nilai positif.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi Lintas Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, tokoh-tokoh lorong, dan komunitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program beasiswa.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan studi banding internasional untuk memahami praktik terbaik dalam pelaksanaan program beasiswa serupa, sehingga mendukung pencapaian target prestasi yang lebih tinggi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
1	4	10.000 Beasiswa Skill Training Gratis	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Ketenagakerjaan
				Penyusunan Pedoman Beasiswa: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam menyusun pedoman beasiswa skill training, termasuk kriteria seleksi, jadwal penerimaan, tahapan seleksi, dan indikator keberhasilan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Pemuda Dan Olahraga
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						Dinas Koperasi UMKM

			Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merancang program pelatihan bagi staf dan pegawai terkait pelaksanaan program beasiswa skill training. Hal ini meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi program, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						Dinas Pariwisata
			Kemitraan dengan Industri: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan industri di Kota Makassar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Dinas Perikanan Dan Pertanian
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
			Penumbuhan Budaya Belajar: Balitbangda akan menginisiasi kampanye budaya yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat,	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	

				dengan mengikuti pelatihan skill training untuk peningkatan kualifikasi dan peluang kerja.					Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan berkerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kota Makassar dalam menyediakan pelatihan skill training yang berkualitas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
1	5	Percepatan Tata Kelola Pemerintahan "Sombere Dan Smart" Bersih Dari Indikasi Korupsi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan instansi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian,	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan	Badan Perencanaan

				terkait untuk menyusun kebijakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan mengandung prinsip anti-korupsi.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pembangunan Daerah
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Penguatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas pegawai dalam hal etika pemerintahan dan manajemen tata kelola yang baik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Tim Riset: Balitbangda akan membentuk tim khusus yang berfokus pada analisis dan penelitian terkait tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih cerdas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan dengan Lembaga Anti-Korupsi: Balitbangda akan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga anti-korupsi untuk mendapatkan panduan dan dukungan dalam melaksanakan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

				program tata kelola pemerintahan yang bersih dari indikasi korupsi.						
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Pembentukan Budaya Integritas: Balitbangda akan mendorong penanaman nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat, melalui kampanye, pelatihan, dan sosialisasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi dengan Stakeholder Lokal: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lokal untuk menyelaraskan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Melibatkan Praktik Terbaik Global: Balitbangda akan melakukan studi perbandingan dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

				baik dan bersih dari korupsi, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks Kota Makassar.						
							√			
1	6	Menuju PAD Rp. 2 Triliun	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Badan Pendapatan Daerah
				Penyusunan Kebijakan Pendukung: Balitbangda akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan produk unggulan dan peningkatan PAD.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Infrastruktur Riset: Membangun atau meningkatkan fasilitas riset dan laboratorium untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Penguatan Kelembagaan: Balitbangda akan meningkatkan kapasitas dan struktur organisasi untuk mengelola program pengembangan ekosistem riset dan inovasi, termasuk rekrutmen	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

				tenaga ahli dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai.						
				Pengembangan Keterampilan: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk pegawai Balitbangda guna meningkatkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengembangan produk.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Industri: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor industri untuk mengakselerasi pengembangan produk unggulan dan mendukung peningkatan PAD.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Mendorong Budaya Inovasi: Melalui kampanye dan sosialisasi, Balitbangda akan mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam semua lapisan masyarakat untuk merangsang pengembangan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Kolaborasi Antar Sektor: Balitbangda akan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	

				mengidentifikasi dan mengatasi masalah kritis yang dapat dipecahkan melalui inovasi.		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Melihat Peluang Global: Balitbangda akan mengidentifikasi tren global dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat meningkatkan PAD.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
1	7	Menuju Insentif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta Dan Perkuat Fungsi RT/RW Dan Penasehat Walikota Serta Para Local Influencer	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Seluruh Kecamatan
				Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan	

				Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset, universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	

				agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.					Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terseleenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√		Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	√		Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW, dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	
1	8	Kelurahan Menjadi Pusat Pelayanan Publik Yang "Sombere Dan Smart"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Kebijakan Inovasi: Bersama dengan pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan insentif	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian,	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan	Seluruh Kecamatan

			kinerja dan inovasi untuk RT/RW serta menyediakan panduan praktis dalam mengajukan proyek inovatif.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Pusat Inovasi Lokal: Membangun pusat inovasi lokal atau memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung RT/RW dalam mengembangkan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
			Pelatihan dan Pendidikan: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan khusus untuk anggota RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar memiliki pengetahuan tentang pengembangan produk unggulan dan inovasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Penguatan Kapasitas: Membantu RT/RW dalam mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi lokal, mengelola proyek inovasi, dan mengukur dampak dari insentif kinerja.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kemitraan Strategis: Menjalin kemitraan dengan lembaga riset,	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis,	

				universitas, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung RT/RW dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan produk unggulan.	Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penyuluhan dan Sosialisasi: Mengadakan kampanye penyuluhan dan sosialisasi untuk mendorong budaya inovasi di kalangan RT/RW, penasehat walikota, dan local influencer agar terlibat aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Pusat Kolaborasi Lokal: Membantu mendirikan pusat kolaborasi lokal di wilayah RT/RW untuk memfasilitasi pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya dalam rangka mengembangkan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Potensi Pasar: Mengidentifikasi peluang pasar global yang dapat diakses oleh produk unggulan yang dikembangkan oleh RT/RW,	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

				dengan mempertimbangkan tren dan permintaan global.						
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
II	2	1	Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Dan Ekonomi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>					Dinas Kesehatan
					Pembuatan Kebijakan Inovasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan produk dan inisiatif inovatif terkait imunitas kesehatan dan ekonomi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					Infrastruktur Laboratorium dan Pusat Inovasi: Balitbangda akan menyediakan fasilitas laboratorium dan pusat inovasi untuk mendukung riset dan pengembangan produk baru dalam rangka mendukung imunitas kesehatan dan ekonomi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Peningkatan Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan merencanakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi, termasuk pengetahuan tentang imunitas kesehatan dan manajemen ekonomi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Keterampilan Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan pelatihan keterampilan riset dan inovasi kepada warga untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan produk unggulan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kolaborasi dengan Institusi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan rumah sakit, universitas, dan lembaga kesehatan lainnya untuk berkolaborasi dalam riset kesehatan dan pengembangan produk imunitas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Kemitraan dengan Pelaku Ekonomi: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						

			Promosi Budaya Sehat: Balitbangda akan mengadakan kampanye dan acara yang mendorong budaya hidup sehat dan edukasi masyarakat tentang pentingnya imunitas kesehatan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Inovasi dalam Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendidikan tentang imunitas kesehatan dan ekonomi dalam kurikulum.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Pusat Informasi Kesehatan dan Ekonomi: Balitbangda akan mendukung pendirian pusat informasi di kelurahan-kelurahan yang memberikan akses ke informasi tentang imunitas kesehatan dan peluang ekonomi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Koordinasi Program: Balitbangda akan berperan sebagai koordinator antara program-program yang terkait dengan imunitas kesehatan dan ekonomi, memastikan sinergi dan efektivitas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
			Studi Komparatif Internasional: Balitbangda akan melakukan studi komparatif internasional	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian,	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan	

				untuk memahami praktik-praktik terbaik dalam pengembangan imunitas kesehatan dan ekonomi.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Jaringan Internasional: Balitbangda akan menjalin hubungan dengan lembaga riset dan inovasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
2	2	Perkuat Fasilitas Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Kesehatan
				Kebijakan Riset Kesehatan: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung riset kesehatan, termasuk pengembangan produk-produk unggulan di bidang kesehatan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Infrastruktur Riset Kesehatan: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur yang	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang	

			diperlukan untuk penelitian dan inovasi di sektor kesehatan, termasuk fasilitas laboratorium dan teknologi medis terkini.	Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
			Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi dan mengembangkan bakat serta kemampuan internal staf dalam bidang riset dan inovasi terkait kesehatan. Ini meliputi pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemberian sumber daya yang dibutuhkan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Penguatan Laboratorium dan Fasilitas: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset dan rumah sakit untuk memperkuat infrastruktur laboratorium serta fasilitas penelitian terkait kesehatan. Hal ini akan memungkinkan pelaksanaan penelitian berkualitas tinggi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
			Kemitraan dengan Perguruan Tinggi Kesehatan: Balitbangda akan menjalin kemitraan erat dengan perguruan tinggi kesehatan di wilayah untuk mengarahkan riset dan inovasi ke solusi-solusi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis,	

				Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Kolaborasi dengan Industri Farmasi dan Kesehatan: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan industri farmasi dan kesehatan untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang mendukung penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>					
				Mendorong Budaya Inovasi: Balitbangda akan mengadakan program-program pendidikan dan kesadaran untuk masyarakat dan pelaku kesehatan agar mengadopsi budaya inovasi dalam upaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terseleenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>					
				Forum Kolaborasi Kesehatan: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara lembaga kesehatan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk merumuskan strategi terpadu dalam memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Mengadopsi Inovasi Global: Balitbangda akan mengikuti tren dan perkembangan global dalam bidang kesehatan dan menerapkan praktik terbaik serta teknologi terkini yang relevan dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
2	3	Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Ketenagakerjaan
				Pengembangan Kebijakan BUMD: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung transformasi BUMD dalam rangka penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Perdagangan
				Infrastruktur Penelitian dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur penelitian dan inovasi yang diperlukan, seperti laboratorium dan fasilitas prototyping, untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dinas Koperasi UMKM
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan fokus pada	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan	

				pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation. Pelatihan dan pendidikan akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.	Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Peningkatan Daya Dukung Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset dan inovasi dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Kemitraan dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan dengan tujuan program strategis Walikota Terpilih.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						

				Penguatan Budaya Inovasi: Balitbangda akan merancang program untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi BUMD dan Makassar Incorporation, sehingga mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi baru.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Promosi Kearifan Lokal: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya kota Makassar dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Forum Kolaborasi Stakeholder: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan aspek-aspek riset dan inovasi dalam berbagai program strategis lainnya yang mendukung tujuan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Trend Global: Balitbangda akan melakukan analisis tren global dalam pengelolaan BUMD dan perusahaan inklusi, serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang telah berhasil melaksanakan transformasi serupa dalam penataan BUMD dan pendirian perusahaan inklusi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
2	4	Penataan Total Sistem BUMD Dan Pembentukan Makassar Incorporation	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
				Pengembangan Kebijakan BUMD: Balitbangda akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung transformasi BUMD dalam rangka penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Infrastruktur Penelitian dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan infrastruktur penelitian dan inovasi yang diperlukan, seperti laboratorium dan fasilitas prototyping, untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>					
				Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation. Pelatihan dan pendidikan akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
				Peningkatan Daya Dukung Riset dan Inovasi: Balitbangda akan menyediakan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan riset dan inovasi dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>					
				Kerjasama dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan penataan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

				BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.						
				Kemitraan dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan produk unggulan dan solusi inovatif yang relevan dengan tujuan program strategis Walikota Terpilih.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Penguatan Budaya Inovasi: Balitbangda akan merancang program untuk mendorong budaya inovasi di dalam organisasi BUMD dan Makassar Incorporation, sehingga mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi baru.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Promosi Kearifan Lokal: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal dan budaya kota Makassar dalam konteks penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Forum Kolaborasi Stakeholder: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam penataan total	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.						
				Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan aspek-aspek riset dan inovasi dalam berbagai program strategis lainnya yang mendukung tujuan penataan BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Analisis Trend Global: Balitbangda akan melakukan analisis tren global dalam pengelolaan BUMD dan perusahaan inklusi, serta menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota atau wilayah-wilayah lain yang telah berhasil melaksanakan transformasi serupa dalam penataan BUMD dan pendirian perusahaan inklusi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan	

					Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
2	5	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota Dunia"	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Bagian Hukum Sekretariat Daerah
				Penyusunan Regulasi Inovasi: Balitbangda akan berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi di berbagai sektor yang relevan dengan "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung riset dan inovasi, termasuk laboratorium dan ruang kolaborasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Balitbangda akan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam riset dan inovasi. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pendidikan akan diberikan untuk memastikan keahlian yang relevan dan diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Perda	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				Omnibus "Makassar Kota Dunia".						
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Tim Riset dan Inovasi: Balitbangda akan membentuk tim riset dan inovasi yang terdiri dari berbagai bidang keahlian untuk mendukung penyusunan regulasi dalam Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk mendorong penelitian yang relevan dengan fokus "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Kerjasama dengan Industri: Balitbangda akan bekerja sama dengan sektor industri untuk mendorong penerapan inovasi dalam praktek bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap konsep "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Promosi Inovasi Budaya: Balitbangda akan mendukung program-program yang mempromosikan budaya dan seni lokal yang unik dalam upaya mewujudkan "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pendukung Kreativitas Masyarakat: Balitbangda akan merancang program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi budaya dan seni yang dapat memperkaya identitas "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Forum Kolaborasi: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat, untuk bersama-sama merumuskan strategi dan langkah konkret dalam rangka Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Integrasi Program Strategis: Balitbangda akan membantu	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis,	

				dalam mengintegrasikan aspek-aspek inovasi dan riset dalam berbagai program strategis lainnya yang berkontribusi pada visi "Makassar Kota Dunia".	Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pemantauan Tren Internasional: Balitbangda akan terus memantau tren inovasi dan pengembangan di tingkat global, serta menerapkan praktik terbaik yang relevan dalam konteks pembuatan Perda Omnibus "Makassar Kota Dunia".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Benchmarking Internasional: Balitbangda akan melakukan benchmarking dengan kota-kota lain yang telah berhasil mengimplementasikan konsep serupa, untuk mendapatkan wawasan dan pelajaran berharga.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
2	6	Percepatan Program Jagai Ana-Ta Dan Program Smart Millennial Serta Mitigasi Sosial	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Penyusunan Kebijakan Terkait: Balitbangda akan berperan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan "Jagai Ana-Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial, termasuk regulasi terkait riset dan inovasi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dinas Sosial
				Infrastruktur Riset dan Inovasi: Balitbangda akan memastikan tersedianya infrastruktur yang mendukung riset dan inovasi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	

				dalam pelaksanaan program-program tersebut, seperti laboratorium dan fasilitas penelitian.		Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Peningkatan Keahlian Internal: Balitbangda akan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan dalam mendukung program-program "Jagai Ana"Ta" dan "Smart Millennial" serta mitigasi sosial. Pelatihan dan pengembangan staf akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas internal dalam aspek yang relevan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Tenaga Ahli: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan tenaga ahli yang dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program-program tersebut.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>					
				Kerjasama dengan Sektor Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dan industri terkait untuk mendukung implementasi program "Smart Millennial" serta mendorong inovasi teknologi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
				Kolaborasi dengan Lembaga Riset: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga riset nasional dan internasional untuk mendapatkan wawasan dan dukungan dalam pelaksanaan program-program tersebut.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>					
				Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mendorong pengembangan program-program yang mempromosikan budaya lokal dalam pelaksanaan "Jagai Ana'Ta", serta mendukung inovasi budaya dalam program "Smart Millennial".	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Kegiatan Kreatif dan Seni: Balitbangda akan mendukung pengembangan kegiatan kreatif dan seni yang dapat memperkaya pengalaman masyarakat dalam menjalani program-program tersebut.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
			Sinergi Antar Instansi: Balitbangda akan memfasilitasi koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan program "Jagai Ana'Ta", "Smart Millennial", dan mitigasi sosial untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan program.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Integrasi Program Mitigasi Sosial: Balitbangda akan membantu mengintegrasikan program mitigasi sosial ke dalam inisiatif yang ada, sehingga terjadi keterpaduan dalam	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

				penanganan masalah-masalah sosial.						
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pemantauan Tren Global: Balitbangda akan melakukan pemantauan terhadap tren dan inovasi global dalam pengembangan teknologi, kewirausahaan, dan mitigasi sosial, serta menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Kemitraan Internasional: Balitbangda akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan inovasi internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mencapai tujuan program strategis tersebut.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
2	7	Penataan Total Destinasi Budaya Dan Sejarah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Kebudayaan
				Pengembangan Rencana Induk Destinasi Budaya: Balitbangda akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	Dinas Kebudayaan

				merumuskan rencana induk yang jelas untuk pengembangan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar.		Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Pembenahan Infrastruktur: Balitbangda akan berperan dalam merencanakan dan mengawasi pembenahan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman wisatawan di destinasi budaya.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Peningkatan Kompetensi Personel: Balitbangda akan melakukan pelatihan dan pengembangan untuk stafnya agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan sejarah Kota Makassar serta keterampilan dalam pengelolaan destinasi budaya.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Pengembangan Tim Ahli: Balitbangda akan mengumpulkan tim ahli dalam bidang budaya dan sejarah untuk memberikan masukan dan panduan dalam proses pengembangan destinasi budaya.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan dengan Komunitas Lokal: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, seniman, dan budayawan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi budaya.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan: Balitbangda akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk merencanakan program-program edukasi tentang budaya dan sejarah bagi masyarakat dan wisatawan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						
				Inovasi dalam Presentasi Budaya: Balitbangda akan mendorong inovasi dalam penyajian budaya dan sejarah, seperti penggunaan teknologi digital dan interaktif, untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pengembangan Acara Budaya Kreatif: Balitbangda akan merancang dan mendukung acara budaya kreatif yang melibatkan masyarakat dan merayakan kekayaan budaya Kota Makassar.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Koordinasi Antara Pihak Terkait: Balitbangda akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dinas pariwisata, pendidikan, dan budaya, untuk memastikan sinergi dalam pengembangan destinasi budaya.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Pusat Informasi Destinasi Budaya: Balitbangda akan merancang dan mengelola pusat informasi destinasi budaya yang memberikan panduan lengkap bagi wisatawan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

						Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Pemetaan dan Analisis Tren Pariwisata Budaya Global: Balitbangda akan melakukan pemetaan dan analisis terhadap tren pariwisata budaya global guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Promosi Internasional: Balitbangda akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mempromosikan destinasi budaya dan sejarah Kota Makassar di tingkat internasional.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
2	8	Penguatan City Branding Dan Peningkatan Festival Dan MICE Bulanan Dalam Skala Nasional Dan Internasional	Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah</b>						Dinas Pariwisata
				Perumusan Kebijakan Event Management: Balitbangda akan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian,	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan,	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian,	Dinas Kebudayaan

				berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan acara MICE dan festival dalam skala nasional dan internasional.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Infrastruktur dan Pusat Konvensi: Balitbangda akan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan acara MICE dan festival dalam skala besar.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi</b>						
				Pelatihan Keterampilan Inovasi: Balitbangda akan mengembangkan program pelatihan keterampilan inovasi untuk masyarakat dan pelaku usaha, termasuk pelatihan manajemen acara, branding, dan pengelolaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	

				Peningkatan Kapasitas Internal: Balitbangda akan meningkatkan kemampuan internal dalam mengelola dan mendukung acara-acara MICE skala besar, termasuk aspek pemasaran, logistik, dan teknis	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
				<b>Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi</b>						
				Kemitraan dengan Pihak Swasta: Balitbangda akan menjalin kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan event organizer dan industri pariwisata, untuk bersama-sama mengembangkan acara MICE dan festival yang menarik.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
				Jaringan Industri Kreatif: Balitbangda akan bekerja sama dengan pelaku industri kreatif lokal dalam merancang acara dan festival yang menggabungkan unsur seni, budaya, dan teknologi.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	√	Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
				<b>Elemen Budaya Riset dan Inovasi</b>						

				Inovasi dalam Konsep Acara: Balitbangda akan mendorong penerapan inovasi dalam konsep dan pelaksanaan acara MICE dan festival untuk menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan bagi peserta.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/iseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				Promosi Budaya Lokal: Balitbangda akan mempromosikan budaya lokal Kota Makassar melalui acara MICE dan festival, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peserta.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	√	Laporan	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	Laporan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
				<b>Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah</b>						
				Forum Kolaborasi Acara: Balitbangda akan memfasilitasi forum kolaborasi antara berbagai pihak terkait penyelenggaraan acara MICE dan festival untuk memastikan sinergi dan efektivitas.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Koordinasi Agenda Event: Balitbangda akan berperan dalam koordinasi jadwal dan agenda acara MICE dan festival di seluruh kota, sehingga terjadi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang	√	Laporan	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi	

				distribusi yang seimbang dan optimal.		Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				<b>Elemen Penyelarasan dengan perkembangan global</b>						
				Studi Pasar Internasional: Balitbangda akan melakukan studi pasar internasional untuk mengidentifikasi tren terbaru dalam penyelenggaraan acara MICE dan festival, serta menganalisis potensi pasar.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	√	Dokumen	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

*Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2023.*

## BAB VIII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dokumen rencana induk dan peta kemajuan IPTEK dalam Cluster Sosial Pemerintahan Kota Makassar untuk periode 2024-2026 memberikan pandangan yang jelas dan terarah mengenai upaya peningkatan dalam bidang IPTEK di wilayah tersebut. Rencana tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor IPTEK, dengan fokus pada sektor sosial dan pemerintahan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari dokumen ini adalah:

1. Pentingnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Rencana ini menegaskan perlunya investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang IPTEK. Ini penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam sektor sosial dan pemerintahan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru.
2. Integrasi Teknologi dalam Pelayanan Publik: Dokumen ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam penyediaan layanan publik. Ini dapat mencakup pengembangan platform digital untuk memberikan layanan kepada warga, seperti aplikasi pemerintah berbasis mobile atau portal informasi online.
3. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Rencana ini menekankan pada pentingnya kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam memajukan IPTEK. Kemitraan ini dapat mendorong pengembangan solusi inovatif dan berkelanjutan yang dapat mengatasi tantangan sosial dan pemerintahan.
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Digital: Dokumen ini menunjukkan perlunya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang teknologi, masyarakat akan lebih siap untuk mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Penggunaan Data untuk Pengambilan Keputusan: Rencana ini menyoroti pentingnya pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat pemerintahan. Pemanfaatan data yang cerdas dapat membantu mengidentifikasi tren, mengukur dampak kebijakan, dan merencanakan langkah-langkah lebih efektif.

#### B. Saran

Dalam upaya mewujudkan visi kemajuan IPTEK di Cluster Sosial Pemerintahan Kota Makassar pada tahun 2024-2026, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas. Penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau akan membantu masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam mengadopsi teknologi.

2. **Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:** Menyediakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai pemerintahan dan masyarakat umum akan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan IPTEK.
3. **Stimulasi Inovasi:** Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang merangsang inovasi dengan memberikan dukungan kepada startup teknologi lokal dan mengadakan kompetisi atau penghargaan inovasi dalam sektor sosial dan pemerintahan.
4. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta akan mempercepat pengembangan solusi cerdas untuk masalah sosial dan pemerintahan.
5. **Penguatan Literasi Digital:** Melalui program-program literasi digital, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan etika penggunaan teknologi digital, serta memberikan keterampilan dasar dalam penggunaan perangkat dan aplikasi.
6. **Penggunaan Data Secara Bijak:** Pemerintah harus memiliki kebijakan dan mekanisme untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan aman dan etis. Penggunaan data yang cerdas akan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang informasional.
7. **Evaluasi dan Revisi Periodik:** Rencana induk dan peta kemajuan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai. Jika diperlukan, rencana tersebut harus direvisi untuk mencerminkan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, pemerintah Kota Makassar dapat memajukan IPTEK dalam Cluster Sosial Pemerintahan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan, membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan pemerintahan.